

SUMBANGSIH PEMIKIRAN DUNIA
USAHA DI INDONESIA UNTUK
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI 2009 - 2014



ROADMAP
PEMBANGUNAN
EKONOMI
INDONESIA
2009 - 2014



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Menara Kadin Indonesia Lt. 29

Jl. HR Rasuna Said X-5 Kav. 2-3

Jakarta 12950

www.kadin-indonesia.or.id

DAFTAR ISI

ROADMAP PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2009 – 2014

BAGIAN A LINGKUNGAN STRATEGIS

I. LINGKUNGAN GLOBAL	2
1. Pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia.....	2
2. Krisis Energi, Krisis Pangan, dan Perubahan Iklim.....	6
3. Penanaman Modal Asing Langsung	7
II. LINGKUNGAN REGIONAL	9
III. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL DAN REGIONAL	10
1. Pengembangan Perangkat dan Langkah-Langkah Kebijakan yang bisa Meredam Gejolak Harga Komoditas.....	10
2. Pengintegrasian Pasar Domestik	10
3. Pengintensifan Diplomasi dan Penetrasi Pasar ke Negara-Negara Asia dan <i>Emerging Market</i> lainnya serta Penguatan Hubungan Ekonomi yang lebih luas	10
IV. LINGKUNGAN DOMESTIK	11
1. Demokratisasi, Keterbukaan dan Kemandirian	11
2. Otonomi Daerah.....	12
3. Reformasi Birokrasi	12
V. KERANGKA MAKROEKONOMI.....	14
1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	15
2. Pembiayaan Pembangunan	19

BAGIAN B PENYELIA KEBANGKITAN EKONOMI NASIONAL (LINTAS SEKTORAL)

I. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN	23
1. Kondisi Dewasa ini.....	23
2. Permasalahan.....	23
3. Tantangan dan Peluang	25
4. Rekomendasi.....	26
II. DIMENSI SPATIAL: PENGEMBANGAN REGIONAL DAN TATA RUANG	30
1. Rasional	30
2. Kerangka Pokok Pembangunan Regional.....	32
3. Landasan Hukum Tata Ruang.....	33
4. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah	34
III. PEMBERDAYAAN DAERAH DAN PENGUSAHA DAERAH	36
1. Kondisi Pengusaha Daerah Saat ini.....	36
2. Permasalahan Yang Dihadapi.....	36
3. Program Aksi	36
4. Road Map 2009-2014	37
5. Dukungan Pemerintah.....	38
6. Pola Penjaminan Kredit UMKM dan Koperasi di Daerah	39
IV. PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI	43
1. Kondisi Terkini Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM).....	43
2. Permasalahan UMKM dan Koperasi	43
3. Road Map 2010-2014	44
V. GOOD GOVERNANCE DAN CORPORATE GOVERNANCE.....	46
1. Kondisi Dewasa ini.....	46

2.	Sasaran yang Ingin Dicapai.....	46
3.	Tindakan yang Diperlukan.....	47
VI.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERORIENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	48
VII.	IKLIM INVESTASI	52
1.	Kondisi Perekonomian Menuju Tahun 2030	52
2.	ANALISIS SWOT	53
3.	Aksi Dalam Investasi	55
VIII.	INFRASTRUKTUR	62
IX.	PERPAJAKAN	63
1.	Permasalahan.....	63
2.	Rekomendasi.....	63
X.	MEMBUMIKAN STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	64
1.	Rasional	64
2.	Evolusi dan Penyempurnaan Strategi	64
3.	Upaya Kuantifikasi Keberlanjutan	66
4.	Instrumen Ekonomi untuk Keberlanjutan	68
5.	Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan.....	69

BAGIAN C PETA JALAN SEKTORAL

I.	PERTANIAN	72
1.	Kendala Peningkatan Produksi Pangan.....	72
2.	Road Map 2009-2015	74
3.	Matriks Usulan Kebijakan	75

II. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.....	78
1. Keadaan Dewasa Ini.....	78
2. Permasalahan.....	79
3. Target	79
4. Rekomendasi.....	80
III. INDUSTRI MANUFAKTUR	81
1. Kendala Pembangunan Industri	81
2. Kendala Internal, Eksternal dan Tantangan Pemasaran.....	81
3. Road Map 2010-2014	83
4. Usulan Program dan Rencana Aksi	85
IV. INDUSTRI EKONOMI KREATIF	88
1. Kontribusi Industri Kreatif di Indonesia	88
2. Peranan Kadin dalam Industri Kreatif	89
3. Masalah HKI dan Peranan Kadin.....	89
4. Iklim Usaha.....	90
5. Peluang Industri Kreatif	90
6. Tantangan Industri Kreatif di Indonesia.....	91
7. Visi dan Misi Ekonomi Kreatif di Indonesia	91
8. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015.....	92
9. Rekomendasi	92
V. UTILITAS : LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	94
VI. PERDAGANGAN.....	96
1. Permasalahan	96
2. Visi dan Misi.....	97
3. Sasaran	97

4. Target	97
5. Strategi dan Aksi.....	97
VII. PARIWISATA.....	99
1. Kondisi Dewasa ini.....	99
2. Permasalahan.....	100
3. Prospek/Target yang akan dicapai.....	100
4. Program aksi	100
5. Dukungan Pemerintah yang di butuhkan.....	101
VIII. KONSTRUKSI, JASA KONSULTASI, PERUMAHAN RAKYAT, PROPERTI KAWASAN INDUSTRI	102
VIII. A KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI	102
1. Permasalahan.....	102
2. Rekomendasi dan Tindakan Aksi	103
VIII. B PERUMAHAN RAKYAT	103
1. Permasalahan.....	104
2. Rekomendasi Kebijakan Dasar	105
3. Kebijakan	105
4. Program Prioritas dan Operasional	106
VIII. C PROPERTI DAN KAWASAN INDUSTRI	107
1. Permasalahan.....	107
2. Dampak Kegiatan Sektor Properti	108
3. Harapan Pemangku Kepentingan	108
4. Tujuan Pengembangan Sektor Properti	109
5. Dukungan yang Dibutuhkan	109
IX. TELEMATIKA	110
1. Kondisi Saat ini	111

2.	Rekomendasi.....	112
3.	Visi dan Misi	114
X.	KEUANGAN	120
A.	PERBANKAN	120
1.	Kondisi Saat ini	120
2.	Maksud dan Tujuan Road Map.....	120
3.	Dasar Pemikiran Pengembangan UMKM	120
4.	Transformasi Sektor Perbankan	120
5.	Peran dan Kepentingan Stakholders.....	121
6.	Road Map Pemberdayaan UMKM	121
7.	Potensi Industri untuk Dibiayai Perbankan di Masa Depan.....	122
8.	Analisis SWOT Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Nasional	122
9.	Analisis SWOT Pembiayaan Korporasi oleh Perbankan Nasional	122
10.	Rekomendasi	123
B.	PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK	124
1.	Kondisi Saat ini	124
2.	Permasalahan.....	125
3.	Prospek/Target yang Ingin Dicapai	126
4.	Program Aksi	127
5.	Dukungan Pemerintah yang Dibutuhkan	129

.....



Pengantar

Menyambut terbentuknya pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono masa bakti 2009 – 2014 mendatang, segenap pemangku kepentingan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia – dengan penuh rasa antusias - telah memprakarsai penyusunan “Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014”. Rumusan ini yang merupakan sumbangan pemikiran segenap kalangan dunia usaha di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi rujukan perumusan kebijakan pembangunan perekonomian Lima Tahun mendatang.

Penyusunan Roadmap ini dilaksanakan dengan menghimpun berbagai masukan dan aspirasi sekitar 90 asosiasi sektor usaha Nasional, para tokoh pengusaha maupun perwakilan organisasi bisnis negara sahabat yang dikerjakan selama kurang lebih lima bulan lamanya. Masukan-masukan ini kemudian diolah dan dikaji oleh para pakar ekonomi Indonesia yang memiliki perhatian serta dedikasi yang tinggi demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang kokoh dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Dengan memperhitungkan berbagai peluang maupun tantangan yang akan dihadapi Indonesia maupun masyarakat dunia dalam jangka panjang, Roadmap Pembangunan Ekonomi 2009 – 2014 berisikan “Mewujudkan negara maritim yang mampu mengintegrasikan perekonomian domestik menuju negara maju yang berkeadilan”. Visi ini yang dijabarkan dalam 3 misi yaitu: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan; perluasan penyerapan tenaga kerja; dan Pengentasan penduduk miskin dan pemerataan pembangunan; yang harus dicapai melalui Lima Sasaran Strategis.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah terlibat berkontribusi dalam roadmap ini, khususnya kepada Tim Penyusun Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014, LP3E Kadin Indonesia, para pakar ekonomi dan tokoh pengusaha Nasional yang telah bekerja keras menyelesaikan roadmap ini.

Atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum

Mohamad S. Hidayat

Tim Penyusun
Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014

Lampiran Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Nomor: Skep/093/DP/VI/2009

1. Faisal Basri
2. T. P. Rachmat
3. Boenjamin Setiawan
4. Anies Baswedan Ph.D
5. Dr. M. Chatib Basri
6. Firmanzah, Ph.D
7. DR. Pande Radja Silalahi
8. Prof. Bustanul Arifin
9. Dr. Mirza Adityaswara
10. DR. Fauzi Ichsan
11. Dr. Purbaya Yudhi Sadewa
12. Dr. Arianto A. Patunru
13. Rofikoh Rokhim, Ph.D
14. David Parsons
15. DR. Erna Zetha
16. DR. Yuri Sato

BAGIAN A
LINGKUNGAN STRATEGIS

BAGIAN A

LINGKUNGAN STRATEGIS

I. LINGKUNGAN GLOBAL

Krisis ekonomi global yang dipicu oleh kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada akhir 2007 jauh lebih parah dari krisis-krisis sebelumnya. Bahkan krisis kali ini telah menyentuh sendi-sendi sistem kapitalisme global. Diyakini bahwa krisis akan mengubah wajah perekonomian dunia serta praktik dan perilaku bisnis.

Selain itu, lembaga-lembaga keuangan internasional maupun negara-negara maju dan negara-negara berkembang juga dituntut untuk melakukan penataan ulang sistem keuangan global dan nasional agar lebih tahan menghadapi gejolak. Muncul komitmen bahwa dunia membutuhkan sistem moneter dan keuangan yang lebih stabil.

1. Pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia

Krisis ekonomi global telah mempercepat pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Dalam dua tahun mendatang sumbangan China dalam PDB dunia berdasarkan nilai tukar berlaku (*current exchange rate*) akan berada pada posisi kedua setelah Amerika Serikat, menggantikan posisi Jepang yang turun ke posisi ketiga (Tabel A.1).

Tabel A.1: Pangsa PDB Dunia, 2007, %

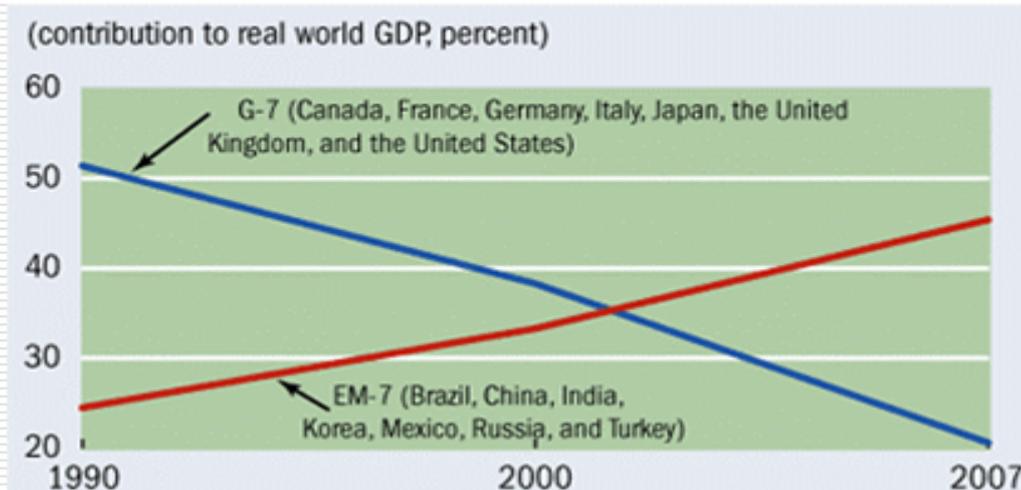
Negara	Nilai tukar berdasarkan PPP*	Nilai tukar berlaku
Amerika Serikat	21.36	25.51
China	10.83	5.99
Jepang	6.61	8.08
India	4.58	2.02
Jerman	4.34	6.12
Inggris	3.30	5.11
Russia	3.18	2.38
Prancis	3.17	4.72
Brazil	2.81	2.42
Itali	2.76	3.88

*PPP = purchasing power parity.
Sumber: IMF, *World Economic Outlook*, April 2008, p. 45.

Pergeseran kekuatan ekonomi dunia semakin mencolok dengan menggunakan nilai PDB berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Selain China yang telah menyalib Jepang, muncul pula India pada urutan keempat menyusul Jerman, Rusia pada ukuran ketujuh, dan Brazil pada urutan kesembilan.

Ditambah dengan Korea, Meksiko dan Turki, menjelmalah kekuatan yang dijuluki *Emerging Market-7* (EM-7). Kekuatan baru ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dunia menggantikan negara-negara G-7 (Peraga A.1).

Peraga A.1: Sumbangan Emerging Market Economies dua kali lipat sejak 1990

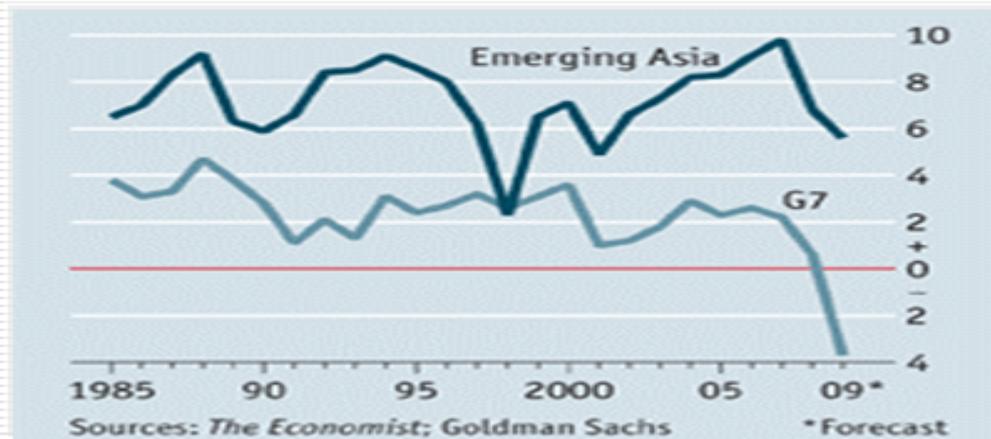


Sumber: "Economic Forecasts: Hard to Rely On?" *Finance and Development*, Vol.45, No. 3, September 2008.

Berdasarkan kawasan, Asia adalah yang paling menonjol. China dan India berada pada lapisan pertama. Sementara itu pada lapisan kedua ialah: Korea, Indonesia, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Ketujuh perekonomian ini—yang dijuluki *Emerging Asia* (EA-7)—tumbuh pesat dan semakin meninggalkan G-7 (Peraga A.2). Emerging Asia menunjukkan proses pemulihan yang cukup mencengangkan. Setelah beberapa perekonomian mengalami kemerosotan tajam sejak paruh kedua 2008, memasuki triwulan kedua 2009 pulih dengan kecepatan tinggi mendahului pemulihan di Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini mengindikasikan bahwa EA-7 semakin melepaskan ketergantungannya kepada G-7. Lebih dari itu, EA-7 telah mampu menggantikan Amerika Serikat dan Eropa sebagai pendongkrak utama pemulihan ekonomi dunia, suatu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bertolak dari gambaran di atas sudah sepatutnya forum G-20 semakin diperkuat dengan kelembagaan yang lebih permanen untuk menghasilkan tatanan perekonomian dunia yang lebih adil dan efektif menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar perekonomian dunia.

Peraga A.2: Peranan negara-negara Emerging Asia paling menonjol



Sumber: *Economist*, edisi 15 Agustus 2009, hal. 60.

Pergeseran kekuatan ekonomi dunia juga tercermin dari peta kekuatan di industri keuangan. Jika sebelum krisis global 20 besar perusahaan keuangan seluruhnya berasal dari negara-negara Barat (plus Jepang), kini bermunculan kekuatan baru. China tiba-tiba menempatkan 5 bank dalam jajaran 20 besar, bahkan memborong posisi tiga besar. Satu bank dari Brazil sudah pula mencuat ke posisi terhormat (Peraga A.3).

Peraga A.3: 20-besar perusahaan keuangan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar

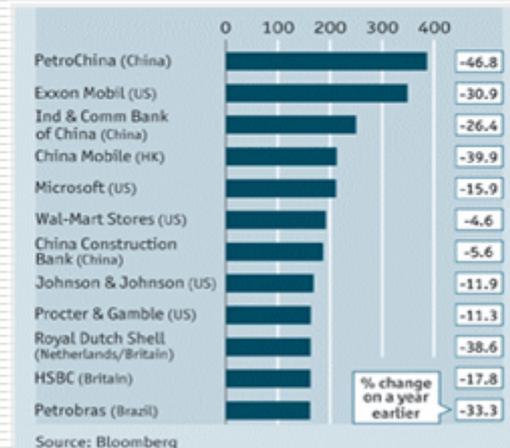
May 31, 1999		March 17, 2009	
Rank	Company	Rank	Company
1	Citigroup	1	Industrial & Commercial Bank of China
2	Bank of America	2	China Construction Bank
3	HSBC Holdings	3	Bank of China
4	Lloyds TSB	4	JPMorgan Chase
5	Bank of Montreal	5	HSBC
6	Banc One	6	Wells Fargo
7	Wells Fargo	7	Mitsubishi UFJ Financial
8	UBS	8	Banco Santander
9	Bank of Tokyo-Mitsubishi	9	Goldman Sachs
10	Chase Manhattan	10	Royal Bank of Canada
11	Morgan Stanley Dean Witter	11	Bank of America
12	Credit Suisse	12	Bank of Communication
13	Barclays Bank	13	BNP Paribas
14	First Union	14	Wozpac Banking
15	Charles Schwab	15	Commonwealth Bank of Australia
16	Prudential	16	Credit Suisse
17	National Westminster Bank	17	China Merchants Bank
18	Banco Santander Central Hispano	18	Banco Itaú
19	Sumitomo Bank	19	Toronto-Dominion Bank
20	Goldman Sachs	20	UBS

Source: "The Fearsome become the Fallen," *Financial Times*, March 23, 2009, p.5.

Kemunculan negara-negara Emerging Market terlihat pula pada jajaran 12 besar korporasi dunia. Bahkan nilai kapitalisasi PetroChina sudah menggeser Exxon Mobil pada posisi teratas. Masih ada tiga perusahaan China (termasuk Hongkong) yang masuk ke jajaran elit ini. Selain itu, lagi-lagi, Brazil sudah mampu menempatkan satu perusahaan (Petrobras) pada posisi 12 besar dunia (Peraga A.4).

Peraga A.4: Perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar

Per 29 Juli 2009, US\$ miliar



Source: Bloomberg
Sumber: Economist, 1 Agustus 2009, hal. 78.

Sejak tahun 2009 China negara pengekspor terbesar, menggeser Jerman yang sudah bertahun-tahun di posisi teratas. Di urutan ke-9 adalah Russia dan pada urutan ke-11 adalah Korea. Sisanya masih diduduki oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Peraga A.5). Sementara itu, negara-negara yang tergolong Emerging Market mendominasi di papan tengah (Peraga A.6). Indonesia pun sudah masuk di kelompok papan tengah ini.

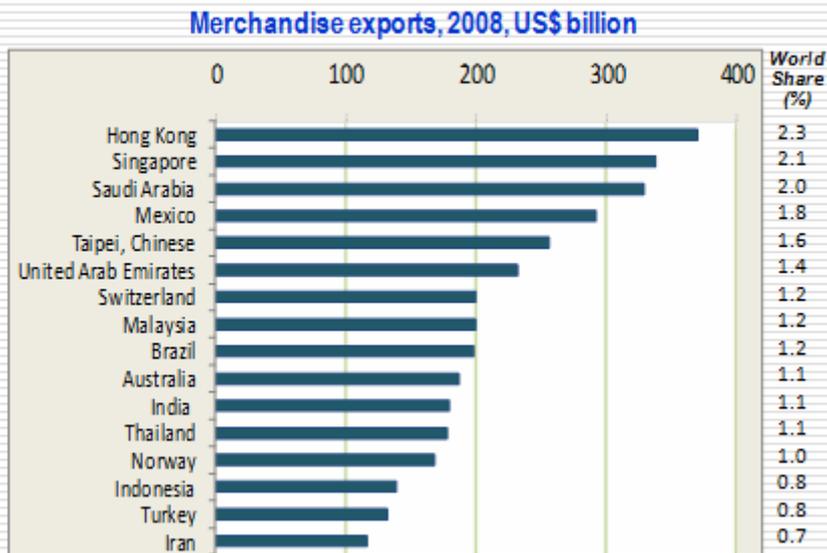
Peraga A.5: 12-Top exporters

Merchandise exports, 2008, US\$ trillion



Source: WTO.

Peraga A.6: Middle-leading exporters



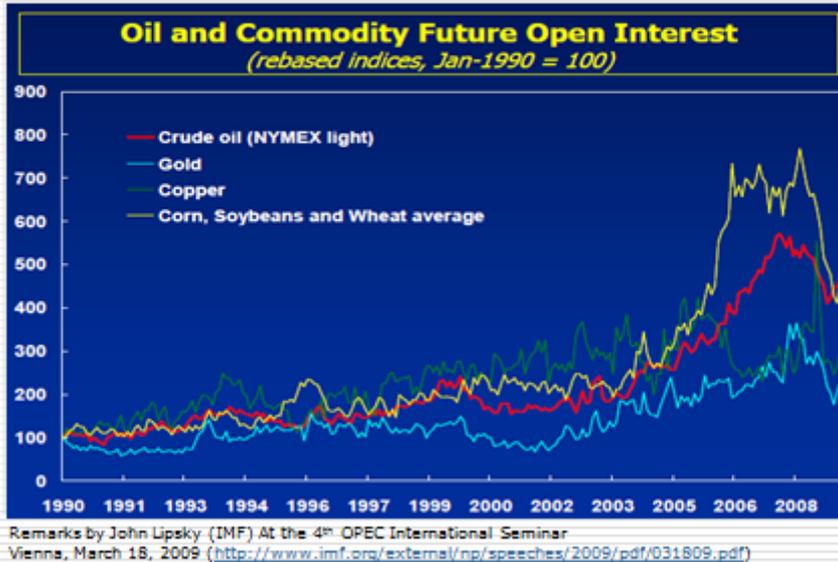
Source : WTO.

2. Krisis Energi, Krisis Pangan, dan Perubahan Iklim

Harga minyak mentah yang sempat mendekati 150 dollar AS perbarrel menyadarkan masyarakat dunia bahwa ketergantungan pada *fossil fuel* sebagai sumber energi harus dikurangi. Namun, alternatif pengembangan bahan bakar nabati ternyata juga menimbulkan masalah baru yang tak kalah pelik. Komoditas pangan yang diolah menjadi energi alternatif membuat harga-harga bahan makanan dan makanan ternak meroket. Harga-harga *food-feed-fuel (f-3)* menjadi terkait satu sama lain. Fenomena ini menimbulkan ancaman krisis pangan bagi ratusan juta penduduk di negara-negara miskin.

Persoalan pangan semakin rumit karena terjadi finansialisasi harga-harga komoditas, termasuk pangan. Harga-harga komoditas tak lagi ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran fisik, namun mengikuti dinamika pasar finansial yang sangat sarat dengan motif spekulatif (Peraga A.7).

Peraga A.7: The “financialization” of commodities has led to greater financial investor interest



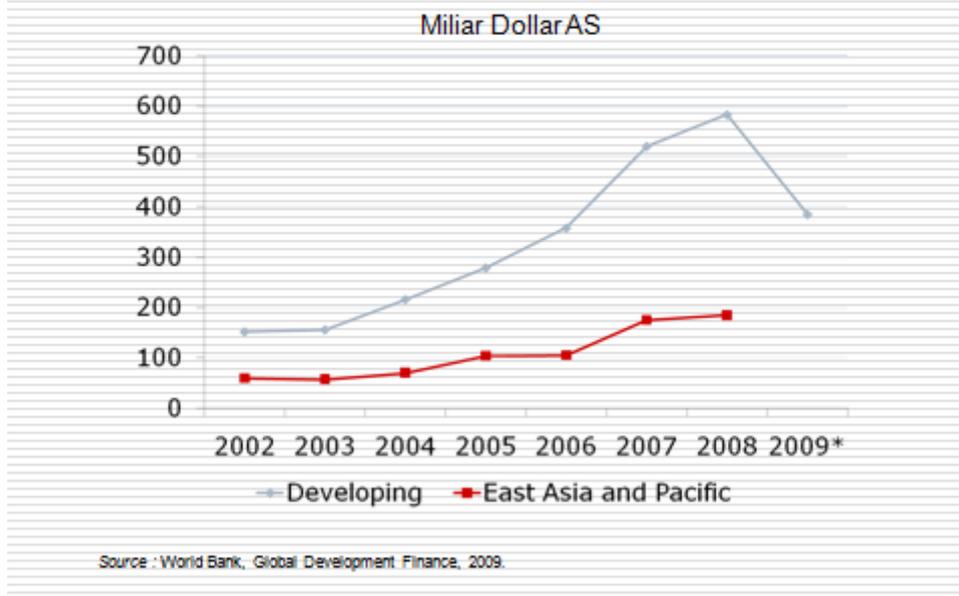
Krisis finansial global dewasa ini terasa lebih berat bagi negara-negara berkembang karena bersamaan dengan lonjakan harga minyak bumi dunia, fluktuasi harga pangan yang luar biasa tinggi, fenomena perubahan iklim yang mengacaukan ramalan produksi, serta variabilitas cuaca yang semakin tidak bersahabat.

Pada tingkat makro global, mungkin saja krisis finansial menjadi salah satu pemicu percepatan pergeseran kekuatan ekonomi global dari negara-negara maju ke arah negara-negara berkembang progresif atau yang lebih dikenal dengan *New Emerging Markets*. Akan tetapi, pada bidang pangan dan pertanian, posisi negara-negara berkembang yang notabene memiliki jumlah penduduk lebih besar daripada negara-negara maju, masih belum dapat melepaskan diri dari permasalahan struktural dalam sistem produksi dan konsumsi, ketahanan pangan, kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan lain-lain. Ditambah lagi, saat ini terdapat kecenderungan di banyak negara untuk semakin mementingkan urusan pangan di dalam negerinya sendiri, bahkan dengan menerapkan kebijakan protektif yang cenderung berlebihan.

3. Penanaman Modal Asing Langsung

Penanaman modal asing langsung (PMAL) ke negara-negara berkembang masih mencatatkan peningkatan tipis pada tahun 2008, dari 520 miliar dollar AS (2007) menjadi 583 miliar dollar AS. Seperti dalam beberapa tahun terakhir, penyerap terbesar PMAL di negara-negara berkembang ialah kelompok negara berpendapatan menengah, terutama Rusia, India, Brazil, dan China. Kecenderungan sebaliknya terjadi di negara-negara maju. Arus masuk PMAL ke negara-negara maju turun tajam dari 1,3 triliun dollar AS pada tahun 2007 menjadi 827 miliar dollar AS pada tahun 2008. Penurunan paling tajam terjadi di Eropa, sedangkan di AS naik sedikit (Peraga A.8).

Peraga A.8: Arus PMAL neto ke negara berkembang



Tak seperti investasi portofolio, PMAL berwawasan jangka panjang sehingga lebih stabil. Walau demikian, krisis yang memuncak pada tahun 2009 menyebabkan PMAL ke negara-negara berkembang diperkirakan anjlok sekitar 30 persen menjadi 385 miliar dollar AS. Kawasan Asia Timur dan Pasifik diperkirakan mengalami hal serupa.

Dalam jangka menengah (2010-2014), PMAL diproyeksikan akan berangsur pulih. Belajar dari krisis global, perusahaan-perusahaan multinasional akan mengkaji ulang strategi investasi mereka. Negara-negara dengan pasar domestik yang besar akan cenderung lebih diminati. Jika dalam lima tahun terakhir Brazil, Rusia, India, dan China (BRIC) menjadi primadona, maka pada masa mendatang, perekonomian domestik yang relatif besar pada lapisan kedua akan menjadi target ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional.

Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam BRIC sudah mulai melakukan investasi di negara-negara berkembang, terutama di sektor ekstraktif. Ditambah dengan kemampuan beberapa negara *emerging markets* lainnya yang sudah lebih dulu hadir di sektor industri manufaktur, maka bisa diharapkan arus masuk PMAL ke negara-negara berkembang akan lebih cepat pulih ketimbang ke negara-negara maju.

Negara-negara berkembang yang lebih sigap berbenah diri memperkuat pasar domestiknya serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta menghadirkan kelengkapan infrastruktur yang memungkinkan kos tetap (*fixed cost*) yang bersaing niscaya akan lebih banyak menyerap PMAL.

II. LINGKUNGAN REGIONAL

Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia yang telah menunjukkan tanda-tanda semakin nyata, volume perdagangan dunia akan kembali meningkat dan di dalam peningkatan itu terlihat kecenderungan yang lebih cepat akan terjadi di kawasan Asia. Indonesia yang berada di kawasan Asia diperkirakan akan memperoleh manfaat positif yang berarti dengan pemulihan ekonomi tersebut.

Dalam proses pemulihan dan dalam tahun-tahun sesudahnya dapat diperkirakan bahwa Indonesia akan lebih menarik sebagai tempat investasi oleh investor asing karena berbagai alasan. Di antara alasan-alasan tersebut adalah: (1) jumlah penduduk yang besar yang menjadi *potential buyer* dari produk yang dihasilkan; (2) tersedianya angkatan kerja yang produktivitasnya masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan; (3) tersedianya sumber daya yang dapat diolah dan merupakan kebutuhan masyarakat kawasan atau dunia; (4) terpeliharanya stabilisasi di bidang politik dan semakin terbukanya ruang bagi bekerjanya mekanisme pasar; dan (5) semakin turunnya biaya yang tak terkait langsung dengan kegiatan produksi dan distribusi (*clean government atau good corporate governance*).

Sebagaimana diutarakan di muka, hampir dapat dipastikan investasi yang masuk ke negara-negara Asia dalam beberapa tahun mendatang akan lebih berorientasi pasar lokal atau pasar regional. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya yang besar, Indonesia akan menjadi lokasi yang lebih menarik. Para investor yang berasal dari negara di luar ASEAN akan berusaha memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Indonesia dengan ketentuan *rule of origin* yang diberlakukan oleh ASEAN dalam kerangka AFTA.

Menyimak kecenderungan yang terjadi, Indonesia perlu memberikan peluang kepada para investor untuk memanfaatkan “kelebihan” yang dimiliki oleh Indonesia. Berkaitan dengan itu maka sikap keterbukaan dari masyarakat perlu dikembangkan agar para investor asing merasakan bahwa risiko berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang berarti.

III. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL DAN REGIONAL.

1. Pengembangan perangkat dan langkah-langkah kebijakan yang bisa meredam gejolak harga komoditas.

Hal ini dirasakan mendesak mengingat sumbangan komoditas primer terhadap penerimaan ekspor kita masih cukup besar.

- 1) Memulai dengan komoditas-komoditas yang mana kita memiliki posisi dominan di pasar internasional, seperti: minyak kelapa sawit. Untuk komoditas-komoditas ini sudah sepatutnya kita menjadi *price maker*.
- 2) Mengembangkan industri-industri pengolah komoditas primer.
- 3) Meningkatkan penggunaan komoditas primer untuk kebutuhan dalam negeri: minyak mentah, gas, batubara, timah, tembaga, rotan, kayu, dan sebagainya.

2. Pengintegrasian Pasar Domestik.

Kemampuan kita untuk memperoleh manfaat dari proses integrasi dengan pasar global dan regional adalah dengan memperkokoh integrasi perekonomian nasional.

- 1) Penghapusan segala kendala perdagangan antarpulau dan antardaerah.
- 2) Pembenahan sistem transportasi laut dan sungai serta sarana dan prasarananya seperti: pelabuhan dan armada pelayaran nasional.
- 3) Percepatan kehadiran *sea & coast guard*.

3. Pengintensifan diplomasi dan penetrasi pasar ke negara-negara Asia dan *emerging market* lainnya serta penguatan hubungan ekonomi yang lebih luas.

- 1) Sebagai satu-satunya negara Asean yang menjadi anggota G-20, Indonesia sangat diharapkan untuk menyuarakan kepentingan negara-negara Asean di forum dunia sekaligus memperkuat posisi tawar Asean di kancah global.
- 2) Berinisiatif untuk melakukan perundingan dan perjanjian bilateral dengan negara-negara yang berpotensi sebagai tujuan ekspor Indonesia agar produk-produk ekspor kita terhindar dari rintangan tarif maupun nontarif.

IV. LINGKUNGAN DOMESTIK

Sebagaimana lingkungan global dan regional, lingkungan domestik pun mengalami perubahan sangat signifikan. Perubahan mendasar telah terjadi sejak krisis multidimensional di pengujung 1980-an. Empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Perubahan yang terjadi ibarat *big bang*, suatu perubahan mendasar yang berlangsung secara simultan, meliputi reformasi politik, reformasi pemerintahan, dan reformasi ekonomi.

Tak banyak negara yang mengalami perubahan mendasar di tiga bidang sekaligus pada waktu bersamaan tanpa menimbulkan gejolak berkepanjangan. Ternyata kita mampu menapakinya secara damai dan lewat proses yang demokratis. Memang, tak semua berjalan mulus dan tuntas. Masih banyak pekerjaan rumah tersisa untuk memperkuat landasan bagi Indonesia Baru yang demokratis dan modern, yang menyejahterakan seluruh rakyat, berkeadilan sosial, dan bermartabat, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Demokratisasi, Keterbukaan, dan Kemandirian

Kebebasan merupakan anugerah yang paling berharga yang diberikan Sang Pencipta kepada umat manusia. Namun, kebebasan baru bermakna dan bermartabat apabila tidak terjadi penghisapan dan eksploitasi sehingga merenggut kebebasan sesama.

Salah satu tantangan terbesar Bangsa Indonesia ialah bagaimana kebebasan bisa mewujudkan segala potensi terbaik yang kita miliki sekaligus sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala karunia yang dilimpahkan kepada Bangsa ini. Kita harus mampu mendayagunakan segala potensi terbaik yang kita miliki bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kebebasan merupakan sarana untuk melahirkan kiprah dan karya terbaik, sebagai sarana untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dunia secara setara berdasarkan nilai-nilai universal yang memang sejak awal kita sepakati.

Kita tidak menganut paham kebebasan untuk kebebasan semata, melainkan kebebasan yang memerdekakan kita dari rasa takut diintimidasi oleh pihak manapun, bebas dari rasa takut akan kelaparan, kekurangan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Kebebasan demikian hanya akan terwujud jika diimbangi dengan seperangkat tatanan sosial dan mengacu pada keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial.

Kita menyadari bahwa untuk mencapai kondisi ideal tak akan terjadi dalam waktu singkat. Kita harus senantiasa menjaga agar proses berlangsung secara damai, demokratis serta dinamis. Untuk itu kita perlu bersabar untuk menapaki proses yang berkelanjutan lewat pembangunan dan penguatan kelembagaan (*institutional development*).

Berbekal keyakinan pada nilai-nilai inti tersebut, kita senantiasa siap untuk mengarungi pergaulan dunia dan berinteraksi dengan seluruh bangsa untuk ikut serta mewujudkan perdamaian abadi di muka bumi ini.

2. Otonomi Daerah

Salah satu dimensi kebebasan yang sudah mulai bergulir adalah otonomi daerah. Terlepas dari masih banyak kelemahan dalam penerapannya, otonomi daerah merupakan keharusan. Tak mungkin bagi negara kepulauan seperti Indonesia menerapkan konsep pembangunan yang bersifat sentralistik.

Ekses dalam penerapan otonomi daerah antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa hubungan keuangan pusat-daerah masih timpang. Tidak satu pun jenis pajak pusat yang dialihkan kepada daerah. Akibatnya, di satu pihak kontrol pusat masih sangat ketat, di lain pihak, daerah kurang memiliki dorongan untuk memajukan iklim usaha dan mengundang investor.

Kemajuan dalam memperbaiki perimbangan keuangan pusat-daerah masih sangat lambat. Pemerintah pusat sejauh ini cenderung untuk menawarkan jenis-jenis pajak atau retribusi yang didaerahkan ketimbang melimpahkan pajak pusat atau mengutik-utik bagi-hasil pajak pusat.

3. Reformasi Birokrasi

Di tengah perubahan mendasar yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, birokrasi kita tampaknya yang masih belum banyak menunjukkan perubahan berarti. Bahkan di sana-sini tampak “kedodoran” mencari format barunya.

Padahal, seluruh kewenangan, kecuali di lima bidang, pada prinsipnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, kenyataannya, portur birokrasi di Pusat justru tidak semakin ramping. Jabatan eselon I kian bertambah, sehingga eselon-eselon di bawahnya pun membengkak.

Sejalan dengan gerak otonomi daerah, lingkup dan karakteristik tugas dan kewenangan Pusat selayaknya berkurang secara signifikan. Pusat lebih fokus pada perumusan kebijakan, sehingga posisi dan jabatan pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan teknis terus berkurang.

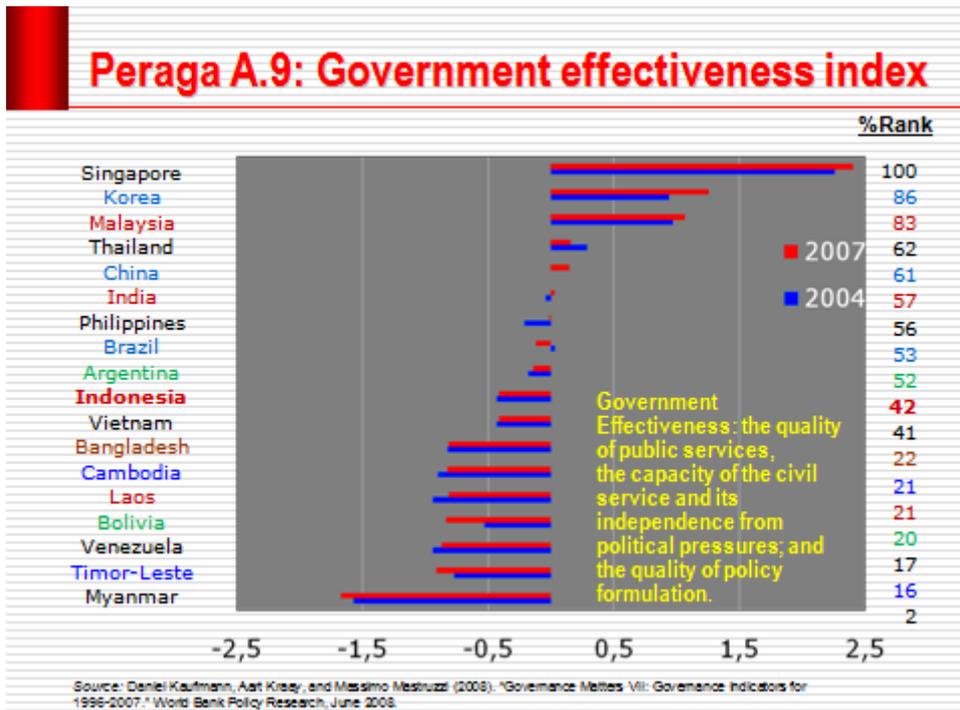
Pembengkakan birokrasi di Pusat pada gilirannya menimbulkan komplikasi serius, tumpang-tindih, dan tuntutan koordinasi yang makin pelik.

Kemunculan berbagai lembaga negara yang bersifat independen sepatutnya juga mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reposisi kementerian dan lembaga negara yang sudah ada sebelumnya.

Tidak terlalu sulit untuk belajar dari pengalaman banyak negara. Sampai sekarang jumlah kementerian di Indonesia tergolong yang paling banyak, dibandingkan dengan negara-negara besar sekalipun, dengan beragam ideologi yang dianutnya.

Tanpa pembenahan mendasar, efektivitas pemerintahan diperkirakan tetap rendah seperti terlihat dari Indeks Keefektifan Pemerintah (*Government Effectiveness Index*). Indeks ini mengukur kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi dan independensinya terhadap tekanan politik, dan kualitas perumusan kebijakan. Pada Peraga A.9 tampak bahwa indeks Indonesia masih bertengger di zona negatif, yang secara harfiah dapat ditafsirkan bahwa pemerintah lebih banyak “menggangu” ketimbang “membantu.” Indeks negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand jauh lebih baik dari kita. Kesemua negara

tersebut memiliki indeks yang berada di zona positif. Indeks Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam, Bangladesh, Cambodia, Laos, Bolivia, Venezuela, Timor-Leste, dan Myanmar.



V. KERANGKA MAKROEKONOMI

Indonesia adalah salah satu dari empat negara di Asia yang tetap menikmati pertumbuhan positif di tengah krisis ekonomi global. Keterkaitan finansial dan keterkaitan perdagangan yang sangat rendah dengan Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya membuat karakteristik perekonomian kita tidak teramat rentan terhadap krisis global. Seluruh sektor perekonomian praktis lebih mengandalkan pada pasar domestik ketimbang pasar luar negeri.

Sektor perbankan masih terus melakukan konsolidasi setelah krisis ekonomi tahun 1998, sehingga menghasilkan indikator-indikator kesehatan perbankan yang tergolong baik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara tetangga. Perekonomian Indonesia juga diuntungkan oleh kemerosotan tajam perekonomian negara-negara berkembang lainnya, sehingga secara relatif posisi daya saing kita terdongkrak cukup tajam (Tabel A.2).

Tabel A.2: The World competitiveness scoreboard

Country	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
USA	1	1	1	1	1	1	1
Singapore	4	2	3	3	2	2	3
Hong Kong	10	6	2	2	3	3	2
Switzerland	9	14	8	8	6	4	4
Australia	7	4	9	6	12	7	7
China	27	22	29	18	15	17	20
Taiwan	17	12	11	17	18	13	23
Malaysia	21	16	26	22	23	19	18
India	42	30	33	27	27	29	30
Korea	32	31	27	32	29	31	27
Thailand	28	26	25	29	33	27	26
Philippines	41	43	40	42	45	40	43
Indonesia	49	49	50	52	54	51	42
Venezuela	51	51	51	53	55	55	57

Source: International Institute for Management Development, *World Competitiveness Yearbook, 2009*.

Beberapa indikator ekonomi lainnya pun cukup menggembirakan, seperti: nisbah utang terhadap PDB yang terus turun sehingga masih menyisakan ruang gerak fiskal untuk melakukan ekspansi, termasuk pengguliran program stimulus.

Bertolak dari sejumlah faktor positif di atas, secara alamiah perekonomian Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh rata-rata 6,3 persen selama kurun waktu 2010-14. Dengan modal politik yang lebih baik dibandingkan pada awal pemerintahan lima tahun lalu serta prospek pemulihan ekonomi dunia yang mulai menunjukkan tanda-tanda cukup menggembirakan, tampaknya terbuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kadin Indonesia menyadari bahwa masih cukup banyak persoalan mendasar yang menghadang. Namun, dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan serta semangat optimisme yang berhembus pasca pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, kita memiliki harapan yang terukur bagi pertumbuhan yang lebih tinggi.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian yang relatif baik pada tahun 2009 dan besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi pasca pemilihan umum, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang. Meskipun anggaran pemerintah masih cukup ketat, namun dengan sektor perbankan yang mulai berangsur pulih dalam menyalurkan kredit dan bangkitnya pasar modal secara amat cepat, diharapkan menjadi pendorong utama bagi perbaikan ekonomi secara optimal. Oleh karena itu berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, diperkirakan perekonomian Indonesia dalam periode tahun 2010–2014 dapat tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2009.

Dengan asumsi tidak kembali memburuknya perekonomian dunia dan relatif stabilnya kondisi politik dalam negeri, pada tahun 2010 perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh di sekitar 5,4 persen hingga 5,9 persen. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus meningkat dalam empat tahun ke depan, seiring dengan membaiknya tingkat investasi dan kredibilitas pemerintah di mata investor asing dan dunia usaha. Disamping itu membaiknya perekonomian dunia diharapkan juga akan meningkatkan kembali kinerja ekspor Indonesia.

Jika pada tahun 2009 saja pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 4,5 persen, maka selayaknya pertumbuhan ekonomi tahun 2010 bisa jauh lebih baik. Pemerintah seyogyanya bisa bekerja lebih keras lagi agar pertumbuhan ekonomi bisa mendekati angka 6 persen pada tahun 2010, karena dengan modal kondisi politik yang semakin membaik dan stabilitas perekonomian yang terjaga bukan tidak mungkin bagi pemerintah untuk memacu pertumbuhan lebih cepat lagi guna mengatasi masalah pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Bertolak dari kinerja ekonomi yang membaik tersebut, maka pada tahun-tahun mendatang, perekonomian diperkirakan juga akan mampu tumbuh lebih tinggi, sehingga dalam periode 2010–2014 rata-rata pertumbuhan ekonomi akan berada dalam kisaran 6,3 persen sampai 6,9 persen.

Peningkatan investasi fisik yang terus berlanjut dan pertumbuhan ekspor kembali mengakselerasi sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor industri manufaktur dan sektor konstruksi diperkirakan akan semakin menonjol dan memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia pada lima tahun ke depan, di samping sektor pertanian yang bisa tumbuh lebih dua kali lipat dari pertumbuhannya penduduk, sektor perdagangan, dan sektor keuangan.

Sejalan dengan pulihnya perekonomian dunia, kenaikan ekspor barang dan jasa pada tahun 2010 diperkirakan akan berada di sekitar 6,4 persen. Dan tahun-tahun selanjutnya diperkirakan akan mencapai tingkatan yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada lima tahun ke depan. Nilai ekspor barang dan jasa diperkirakan akan bisa mencapai kenaikan rata-rata antara 11,3 persen sampai 12 persen dalam periode 2010–2014, yang akan terpenuhi jika diikuti oleh diversifikasi ekspor, baik dari jenis produk maupun negara tujuan.

Namun hal ini dapat tercapai jika terjadi perluasan investasi dan peningkatan kapasitas produksi, terutama pada sektor industri manufaktur. Pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) harus menjadi prioritas pemerintah jika ingin peningkatan ekspor yang ditargetkan dapat dicapai. Tetapi yang lebih penting lagi adalah upaya untuk terus berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Tingkat ketidakpastian usaha yang masih cukup tinggi merupakan penyebab utama dari rendahnya tingkat investasi sampai saat ini, yang tak terlepas dari tidak kunjung kondusifnya iklim usaha di sektor produksi riil. Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak banyak yang cukup efektif menciptakan iklim investasi yang kondusif karena seringkali dibayangi oleh keragu-raguan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Meskipun demikian, Kadin Indonesia tetap memperkirakan pertumbuhan investasi dapat dipacu lebih cepat mulai tahun 2010, sehingga pada periode tahun 2010–2014 rata-rata pertumbuhan investasi diperkirakan akan berada dalam kisaran 7,9 persen sampai 9,4 persen (Tabel A.3). Namun hal ini akan tercapai jika pemerintah berhasil merancang sebuah kebijakan ekonomi yang bisa merangsang minat investasi dan minat memproduksi di setiap daerah.

Sementara itu pada periode yang sama impor barang dan jasa diperkirakan akan meningkat rata-rata antara 12 persen sampai 12,4 persen, sejalan dengan meningkatnya investasi fisik.

Dari sisi produksi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 6,3 persen sampai 6,9 persen pada periode tahun 2010–2014, diperkirakan dapat didukung terutama oleh pertumbuhan di sektor industri manufaktur. Jika pada tahun 2009 pertumbuhan sektor industri diperkirakan masih di sekitar 2,6 persen, dan tahun 2010 akan berkisar antara 3,1 persen hingga 3,9 persen, maka pada tahun-tahun selanjutnya diperkirakan akan meningkat lebih moderat. Sehingga dalam periode tahun 2010–2014 rata-rata pertumbuhan sektor industri manufaktur dapat mencapai antara 4,8 persen hingga 5,4 persen (Tabel A.4 dan Tabel A.5).

Tingkat pertumbuhan setinggi ini tentunya tidak akan sulit dicapai, jika ada keinginan politik (*political will*) dari pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi seperti pada masa sebelum krisis tahun 1997/1998. Namun untuk itu diperlukan Visi-Misi yang jelas dari Departemen Perindustrian untuk mencapai target pertumbuhan sektor industri. Dengan demikian akan lahir strategi-strategi jitu, yang dipersiapkan secara serius untuk mencapai sasaran pertumbuhan tersebut.

Oleh karena itu perlu kebijakan sektor industri yang kembali terfokus pada suatu tujuan yang jelas, misalnya hendak dibawa ke mana perkembangan industri nasional. Seperti diketahui, pada masa Orde Baru dulu, pembangunan ekonomi pernah berorientasi pada substitusi impor dan kemudian berlanjut menjadi *export oriented*. Tapi sejak krisis tahun 1997/98 belum pernah ada lagi tujuan yang jelas dari pembangunan sektor industri, kecuali meningkatkan pertumbuhan produksi dan pertumbuhan ekspor yang belum juga tercapai secara optimal. Kurangnya arahan dan dukungan dari pemerintah menyebabkan pembangunan sektor industri berjalan tanpa target yang jelas. Hal tersebut menyebabkan daya saing industri semakin merosot, sehingga kehilangan kekuatan ketika mengarungi gelombang globalisasi.

Seiring dengan akan pulihnya perekonomian global, sektor perdagangan diperkirakan juga dapat tumbuh secara berarti sejak tahun 2010. Jika pada tahun 2009 pertumbuhan sektor perdagangan diperkirakan sekitar 2,4 persen, maka pada tahun 2010 sektor ini diperkirakan dapat tumbuh antara 4,6 persen sampai 5,7 persen. Angka pertumbuhan ini diperkirakan akan semakin cepat pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dalam periode tahun 2010–2014 rata-rata pertumbuhan sektor perdagangan diperkirakan berkisar antara 6,1 persen sampai 6,9 persen. Selain akan dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian global, pertumbuhan ini diperkirakan juga searah dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur.

Sementara itu pertumbuhan sektor transport dan komunikasi diperkirakan akan terus melaju dalam periode tahun 2010–2014, sehingga sektor ini tetap merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Pada periode tersebut sektor ini akan tumbuh rata-rata di sekitar 15,4 persen hingga 16,6 persen.

Di antara semua sektor di dalam Produk Domestik Bruto, pertambangan merupakan sektor yang tumbuh paling rendah, terutama sejak tahun 2001. Terus melambatnya peningkatan produksi di sektor pertambangan, terutama disebabkan oleh trend penurunan produksi minyak dan gas bumi. Penurunan laju produksi sektor pertambangan ini memberi andil yang cukup besar dalam pelemahan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena peranan sektor pertambangan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 11 persen, yang lebih tinggi dari peranan sektor keuangan dan sektor transport & komunikasi yang masing-masing sebesar 7,4 persen dan 6,3 persen.

Sesuai dengan kondisi yang berlangsung dewasa ini, dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Kadin, sektor pertambangan diperkirakan tumbuh relatif rendah, yaitu rata-rata hanya berkisar antara 0,6 persen hingga 2,2 persen dalam periode tahun 2010-2014.

Berkaitan dengan kondisi sektor pertambangan tersebut, disarankan peranan pemerintah untuk meningkatkan kembali produksi minyak dan gas. Meskipun eksploitasi dan eksplorasi minyak membutuhkan investasi besar, namun kegiatan ini akan menyerap banyak tenaga kerja pada kegiatan-kegiatan di hilir dan yang berkait dengan kegiatan di sektor ini. Jika dukungan dana pemerintah tidak memungkinkan kegiatan tersebut, maka yang diperlukan adalah perbaikan iklim investasi dan pembaharuan sistem insentif di sektor pertambangan. Adanya konsistensi kebijakan dan kepastian penegakan hukum merupakan dua hal penting yang harus segera mendapat perhatian serius, agar kegiatan produksi di sektor pertambangan kembali meningkatkan minat para investor.

Sektor pertanian diproyeksikan dapat tetap tumbuh secara moderat, meskipun diperkirakan tidak lagi setinggi tahun 2008 yang mencapai 4,8 persen. Belum berhasilnya revitalisasi sektor pertanian secara keseluruhan, dan adanya ketidakpastian cuaca, merupakan dua hal pokok yang memengaruhi angka-angka proyeksi di sektor ini. Dalam periode tahun 2010-2014 sektor pertanian diperkirakan hanya dapat tumbuh rata-rata di sekitar 3,4 persen hingga 3,9 persen.

Tabel A.3: Proyeksi pertumbuhan PDB menurut pengeluaran**Versi Dasar dengan pertumbuhan PDB rata-rata 2010-14 = 6,3%**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi masyarakat	5,5	4,8	4,6	4,7	4,8	4,9
Konsumsi pemerintah	13,2	7,6	8,6	8,9	8,8	9,7
Investasi*	4,0	7,1	7,6	8,7	8,3	7,9
Ekspor barang & jasa	-16,2	6,4	7,7	12,2	14,8	15,3
Impor barang & jasa	-21,8	8,0	8,2	13,8	15,1	15,5
Produk Domestik Bruto	4,8	5,4	5,8	6,3	6,9	7,1

Versi Optimistik dengan rata-rata pertumbuhan PDB 2010-14 = 6,9%

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi masyarakat	5,1	5,0	4,7	4,8	4,6	5,0
Konsumsi pemerintah	13,2	10,5	8,6	8,9	9,2	9,7
Investasi*	5,0	7,6	9,0	11,6	11,1	7,9
Ekspor barang & jasa	-16,2	6,4	9,8	12,2	14,2	15,7
Impor barang & jasa	-21,8	8,0	10,2	13,5	14,8	15,5
Produk Domestik Bruto	4,8	5,9	6,5	7,2	7,4	7,4

Tabel A.4: Proyeksi pertumbuhan PDB menurut sektor**Versi Dasar dengan pertumbuhan PDB rata-rata 2010-14 = 6,3%**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	3,3	3,4	3,4	3,3	3,4	3,5
2. Pertambangan	0,4	0,4	0,3	0,4	1,1	0,9
3. Industri manufaktur	2,6	3,1	4,5	5,1	5,3	6,0
4. Utilitas	10,6	10,7	10,6	10,7	10,7	10,7
5. Konstruksi	7,2	7,3	7,0	7,1	7,1	7,1
6. Perdagangan & hospitalitas	2,4	4,6	5,3	6,7	7,0	7,1
7. Transport & komunikasi	16,1	15,2	14,3	14,5	16,7	16,3
8. Keuangan	8,0	7,9	7,4	7,5	7,4	7,5
9. Jasa-jasa	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,3
Produk Domestik Bruto	4,8	5,4	5,8	6,3	6,8	7,1

Tabel A.5: Proyeksi pertumbuhan PDB menurut sektor

Versi Optimistik dengan rata-rata pertumbuhan PDB 2010-14 = 6,9%

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	3,9	3,6	3,8	4,0	4,1	4,2
2. Pertambangan	1,5	1,6	2,3	2,7	2,2	2,0
3. Industri manufaktur	2,6	3,9	4,8	5,5	6,3	6,5
4. Utilitas	11,2	11,2	11,5	11,7	11,7	11,4
5. Konstruksi	6,4	6,9	7,5	7,5	7,3	7,1
6. Perdagangan & hospitalitas	2,3	5,7	6,6	7,3	7,6	7,4
7. Transport & komunikasi	16,5	16,6	15,6	17,7	16,7	16,3
8. Keuangan	6,2	6,9	7,5	7,6	7,5	6,9
9. Jasa-jasa	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,3
Produk Domestik Bruto	4,8	5,9	6,5	7,2	7,4	7,4

2. Pembiayaan Pembangunan

Sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di muka, yang memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi akan berada dalam kisaran 6,3 persen sampai 6,9 persen, maka kebutuhan dana investasi pada periode 2010–2014 akan mencapai Rp 2.855 triliun hingga Rp 2.910 triliun rata-rata setahun (Tabel A.6 dan Tabel A.7). Karena dana yang dapat disediakan oleh pemerintah melalui APBN diperkirakan hanya akan mencapai rata-rata sekitar 13 persen saja, maka sisanya sekitar 87 persen rata-rata harus dihimpun dari swasta domestik (bank, nonbank, dan pasar modal), serta swasta luar negeri dalam bentuk pinjaman dan investasi langsung.

Kebutuhan dana yang cukup besar tersebut jelas perlu ditopang oleh kapasitas pendanaan yang memadai di dalam negeri. Namun sayangnya sumbangan sektor keuangan domestik (perbankan dan pasar modal) sampai saat ini masih sangat rendah, dan relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal yang sama juga terjadi untuk penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). Bahkan nisbah FDI terhadap PDB di Indonesia tergolong yang terendah di dunia.

Sungguhpun demikian, sejauh ini sektor perbankan Indonesia telah tumbuh cukup mantap. Dalam periode 2004–2008 aset dan kredit perbankan masing-masing meningkat sebesar 15,6 persen dan 23,8 persen. Pada akhir tahun 2008 aset perbankan telah meningkat menjadi Rp 2.311 triliun dan kredit perbankan menjadi Rp 1.308 triliun. Sementara itu *non-performing loans* (NPL) turun menjadi 3,2 persen dari 5,8 persen. Tidak adanya *exposure* langsung terhadap kredit perumahan *subprime* membuat kondisi perbankan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain ketika menghadapi krisis global akhir-akhir ini.

Namun, sumber pendanaan perbankan umumnya bersifat jangka pendek, sementara kebutuhan dana jangka panjang diperoleh dari pasar modal. Kapitalisasi pasar saham dan obligasi di Indonesia terhadap PDB sudah mencapai 50 persen di tahun 2004, namun menurun menjadi 34 persen di tahun 2008. Krisis keuangan global berimbas cukup signifikan ke pasar modal Indonesia sehingga

membuat kapitalisasi pasar menurun cukup tajam di akhir tahun 2008. Namun demikian di awal tahun 2009 terlihat kecenderungan yang mulai membaik sebagaimana tercerminkan dari penurunan imbal hasil obligasi pemerintah dari 21 persen pada November 2008 menjadi 12 persen pada April 2009 atau terjadi kenaikan harga obligasi pemerintah secara rata-rata sebesar 40 persen. Indeks Harga Saham juga mengalami peningkatan dari 1.141 pada November 2008 menjadi 2.0267 pada Juni 2009. Hasilnya, kapitalisasi pasar meningkat kembali menjadi hampir 50 persen dari PDB pada Juni 2009.

Di tengah keterbatasan sumber dana domestik, pemanfaatan dana yang ada juga belum optimal dan fungsi intermediasi sektor keuangan ke sektor riil pun masih terkendala. Hal ini tercermin dari cukup besarnya transaksi perbankan dengan instrumen pemerintah/Bank Indonesia, baik dalam bentuk obligasi pemerintah maupun SBI. Separuh dari obligasi pemerintah dipegang oleh perbankan, sementara jumlah dana perbankan yang dialokasikan ke SBI terus mengalami peningkatan secara signifikan hingga mencapai Rp 225 triliun (97 persen dari total SBI) pada bulan Juni 2009, dari Rp 96,5 triliun (55 persen dari total SBI) pada bulan Juli 2008. Kondisi ini pada akhirnya membatasi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. Belakangan ini, yang juga menjadi masalah adalah penyebaran likuiditas perbankan yang timpang.

Oleh karena itu untuk jangka satu-dua tahun ke depan, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- Jika kondisi likuiditas bank-bank kecil tidak membaik, maka perlu ada program penjaminan pinjaman antarbank agar likuiditas lebih merata dan sekaligus bisa menurunkan suku bunga pinjaman. Untuk menghindari *moral hazard* maka bank yang menerima penjaminan diharuskan menaruh sebagian dana kas di pemerintah.
- Mengurangi persaingan dalam pencarian dana antara pemerintah dan swasta untuk meminimalisasikan efek pendesakan (*crowding-out effect*).
- Memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor UKM dan infrastruktur.
- Agar kebutuhan dana pemerintah dari publik tidak terus menggelembung, pemerintah perlu lebih tekun melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak, dengan mengutamakan peningkatan kepatuhan membayar pajak. Hanya dengan peningkatan *tax ratio*, pemerintah bisa mengurangi penetrasinya dalam penghimpunan dana publik.

Sementara itu untuk jangka menengah, perlu dipersiapkan langkah-langkah berikut:

- Menyempurnakan arsitektur perbankan Indonesia agar peranan perbankan sejalan dengan upaya penguatan sektor riil.
- Mendinamiskan peranan lembaga-lembaga keuangan nonbank dan optimalisasi pasar modal yang transparan dan kredibel.
- Optimalisasi dana haji.
- Monetisasi aset-aset negara.

Akibat keterbatasan sumber dana domestik, maka untuk beberapa tahun ke depan kebutuhan pinjaman dan investasi dari luar negeri tidak bisa dihindari. Namun juga harus disadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini investasi asing yang masuk ke Indonesia belum mampu

menggerakkan sektor riil. Hal ini disebabkan antara lain karena dana asing yang masuk ke Indonesia sebagian besar dalam bentuk investasi portofolio, seperti obligasi pemerintah dan saham. Sementara itu investasi asing langsung (*foreign direct investment*) seringkali terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit dan juga akibat pertentangan antara pusat dan daerah.

Tabel A.6: Kebutuhan investasi

Skenario	Indikator	2008	2009F	2010F	2011F	2012F	2013F	2014F
Baseline	Pertumbuhan Ekonomi, %YoY	6.1	4.8	5.4	5.8	6.3	6.9	7.1
	PDB Nominal, Rp Tril	4954	5795	6791	8015	9479	11299	13548
	Kebutuhan Investasi, Rp Tril	1370	1698	1967	2405	2885	3240	3776
	Investasi/PDB, %	27.6	29.3	29.0	30.0	30.4	28.7	27.9
	ICOR	3.7	5.0	4.4	4.2	4.0	3.8	3.8
Adjustment	Pertumbuhan Ekonomi, %YoY	6.1	4.8	5.9	6.5	7.2	7.4	7.4
	PDB Nominal, Rp Tril	4954	5795	6823	8104	9661	11577	13916
	Kebutuhan Investasi, Rp Tril	1370	1698	1976	2432	2941	3320	3879
	Investasi/PDB, %	27.6	29.3	29.0	30.0	30.4	28.7	27.9
	ICOR	3.7	5.0	4.0	3.8	3.6	3.5	3.6

Tabel A.7: Sumber dana investasi

Skenario	Sumber	Unit	2008	2009F	2010F	2011F	2012F	2013F	2014F
Baseline	Swasta	Nilai, Rp T	1179	1500	1700	2091	2517	2815	3286
		Pangsa, %	86.1	88.3	86.4	87.0	87.2	86.9	87.0
	Pemerintah	Nilai, Rp T	191	198	267	314	368	425	490
		Pangsa, %	13.9	11.7	13.6	13.0	12.8	13.1	13.0
	Total	Nilai, Rp T	1370	1698	1967	2405	2885	3240	3776
	Pangsa, %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Peningkatan PDB	Rp T	1005	841	996	1224	1464	1820	2249
Adjustment	Swasta	Nilai, Rp T	1179	1500	1708	2114	2565	2885	3376
		Pangsa, %	86.1	88.3	86.4	87.0	87.2	86.9	87.0
	Pemerintah	Nilai, Rp T	191	198	268	317	375	436	503
		Pangsa, %	13.9	11.7	13.6	13.0	12.8	13.1	13.0
	Total	Nilai, Rp T	1370	1698	1976	2432	2941	3320	3879
	Pangsa, %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Peningkatan PDB	Rp T	1005	841	1028	1280	1557	1916	2339

Catatan: - Investasi Pemerintah adalah Belanja Barang Modal Pemerintah Pusat + Pemerintah Dati I & II

- Peningkatan PDB menggambarkan jumlah utang maksimum yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah dengan menjaga rasio DEBT/GDP tetap konstan.

A.Lingkungan_strategis/ez-fb/11 september 2009

BAGIAN B
PENYELIA KEBANGKITAN EKONOMI NASIONAL
(LINTAS SEKTORAL)

BAGIAN B

PENYELIA KEBANGKITAN EKONOMI NASIONAL (LINTAS SEKTORAL)

I. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN

Masalah SDM dan ketenagakerjaan hendaknya menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah. Karena sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, sampai saat ini masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kebanyakan masyarakat Indonesia masih terus menjadi persoalan yang belum teratasi.

Hal ini antara lain karena strategi pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia selama ini, yang mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis modal, ternyata tidak mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan ini, khususnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja yang memadai, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Ini antara lain disebabkan karena Indonesia adalah negara yang perekonomiannya kelebihan tenaga kerja (*labor surplus economy*), sehingga pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berdampak secara signifikan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

1. Kondisi Dewasa Ini

Jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2009 mencapai 113,74 juta orang, dimana yang bekerja hanya 104,49 juta orang. Ini berarti jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,25 juta orang, atau 8,14 persen dari total angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada tahun sebelumnya (Februari 2008) yang sebesar 8,46 persen, maka angka ini hanya sedikit mengalami penurunan. Dari jumlah yang bekerja tersebut, sebagian besar bekerja di sektor informal (69,58 persen), sedangkan sisanya bekerja di sektor formal.

Struktur tenaga kerja Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Dari jumlah tenaga kerja sebanyak 104,49 juta orang pada Februari 2009, sebanyak 53,05 persen berpendidikan maksimal SD, 18,99 persen berpendidikan SLTP, 21,36 persen berpendidikan SLTA, 2,56 persen berpendidikan Diploma I-III, dan 4,04 persen berpendidikan universitas. Struktur pendidikan tenaga kerja seperti ini menjadikan produktivitas dan rata-rata penghasilan pekerja Indonesia relatif rendah.

Selain itu, rendahnya kualitas SDM ini juga disebabkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih berorientasi pada *supply driven* sehingga terjadi kesenjangan (*gap*) dan ketidakcocokan (*mismatch*) antara penawaran (*supply*) dengan permintaan (*demand*) yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan terjadinya pengangguran.

2. Permasalahan

Secara garis besar permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia menyangkut hal-hal berikut:

2.1. Masalah Ketenagakerjaan

- Tingkat pengangguran terbuka Indonesia masih relatif tinggi. Jika tidak ditangani secara bersungguh-sungguh akan menjadi beban negara dan merupakan sumber konflik. Apalagi pengangguran terbuka di Indonesia akan semakin didominasi oleh kelompok pengangguran usia muda dan berpendidikan tinggi.
- Masih sering terjadi konflik antara pekerja dengan pengusaha akibat ketidaksesuaian keinginan antara pekerja dengan pengusaha. Kurang baiknya hubungan industrial menyebabkan sering muncul permasalahan di sektor ketenagakerjaan, seperti pemogokan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Peluang kesempatan kerja di luar negeri belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya bagi tenaga kerja yang *semi skilled*.
- Masih rendahnya minat masyarakat untuk bekerja mandiri atau menjadi wirausahawan.

2.2. Masalah Kualitas, Kompetensi SDM, dan Sistem Pendidikan

- Masih rendahnya kualitas SDM dan kompetensi tenaga kerja, yang berimplikasi pada lemahnya daya saing tenaga kerja Indonesia. Hal ini berdampak pada termarginalkannya tenaga kerja Indonesia, bahkan untuk merebut kesempatan kerja di dalam negeri.
- Adanya kesenjangan antara mutu lulusan sekolah vokasi dengan kebutuhan dunia usaha/industri akan SDM yang kompeten.
- Belum tersedia mekanisme yang jelas untuk mewujudkan *link and match* antara pendidikan formal dan pelatihan kerja dengan tuntutan persyaratan kerja dari sisi pihak perusahaan.
- Kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas informasi pasar kerja.
- Belum dimaksimalkannya pendayagunaan Balai Latihan Kerja (BLK), sehingga lembaga ini tidak berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan pelatihan.
- Belum efektifnya koordinasi antara lembaga diklat dengan lembaga sertifikasi, dan belum berfungsinya sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja (BNSP) yang sesuai dengan harapan dunia usaha.
- Belum maksimalnya peranan BNSP yang disebabkan karena pengelolaan anggaran masih dibawah kewenangan Depnakertrans. Selain itu juga belum ada koordinasi langsung antara BNSP dengan Daerah untuk mempercepat pembangunan kompetensi profesi.
- Belum terpadunya kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan penyediaan informasi peluang usaha dan permodalan. Serta masih kurangnya materi kewirausahaan pada pendidikan Vokasi (SMK).

2.3. Masalah Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya

Berkaitan dengan masalah perundang-undangan, paling tidak ada lima (5) Undang-Undang yang mengandung persoalan serius. Permasalahan di ketiga undang-undang tersebut dikhawatirkan akan terus menjadi penghalang bagi tercapainya iklim kondusif bagi terciptanya kondisi ketenagakerjaan yang bisa bersifat produktif bagi pembangunan ekonomi nasional. Adapun kelima undang-undang tersebut adalah:

1) UU No.21/2000

Dalam undang-undang ini yang menjadi pokok permasalahan adalah: rasionalisasi jumlah, struktur dan penyelenggaraan organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh masih belum kondusif bagi penciptaan *industrial peace* – ketenangan dan ketentraman kerja.

2) UU No.13/2003

Yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- Proses PHK dirasakan terlalu panjang dan jumlah pesangon terlalu berat
- Sering timbul masalah berkaitan dengan penerapan *outsourcing* dan perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) atau kontrak kerja
- Dirasakan adanya tumpang tindih antara beberapa undang-undang termasuk UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 39/2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

3) UU No.2/2004

Dalam undang-undang ini yang menjadi pokok permasalahan adalah: kewenangan PHI yang hanya terbatas mengadili perselisihan perdata, tidak mencakup kasus pidana. Selain itu belum ada kejelasan tentang status Hakim *ad-hoc* dan Hakim Kasasi *ad-hoc* di PHI dan Mahkamah Agung. Sementara itu penyelesaian perselisihan di PHI dan Mahkamah Kasasi ternyata masih sangat lama

4) UU No. 3 Tahun 1992

Dalam undang-undang ini yang menjadi pokok permasalahan adalah: program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dobel dengan program dana pensiun (UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun).

5) UU No.20/2003

Dalam undang-undang ini yang menjadi pokok permasalahan adalah: pengaturan akreditasi dan sertifikasi menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbeda dengan pengaturan menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Tantangan dan Peluang

Sampai lima tahun kedepan terkait dengan permasalahan SDM, paling tidak terdapat tiga tantangan besar yang perlu dihadapi, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam negeri untuk mendongkrak daya saing dunia usaha nasional;
- 2) Meningkatkan kualitas TKI formal untuk merebut peluang kesempatan kerja di luar negeri; dan
- 3) Mengembangkan wirausaha profesional guna mengurangi pengangguran.

Sementara itu Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara pengekspor produk berbasis sumber daya lokal yang terbarukan (*renewable local resources*) seperti di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukan SDM yang berkualitas.

Demikian pula, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengirim dan menempatkan TKI formal *semi skilled* karena Indonesia memiliki penduduk khususnya kelompok usia kerja produktif yang besar. Untuk itu diperlukan calon TKI formal yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lainnya.

4. Rekomendasi

Dari sudut pandang pengembangan daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional, keberadaan sumber daya manusia yang berkompeten mutlak diperlukan. Rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari tingkat pendidikan dan pelatihan akan mempengaruhi daya saing perekonomian. Diperlukan program terpadu peningkatan kompetensi kerja SDM Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan daya saing perekonomian nasional.

Dalam rangka pengembangan daya saing dan perekonomian nasional Indonesia khususnya untuk masa pembangunan 2009-2014, direkomendasikan Lima Program Utama Peningkatan Daya Saing Nasional berbasiskan SDM yang mengikutsertakan pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan-pelatihan, yaitu :

1) Perluasan Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja disediakan melalui penyediaan lapangan kerja di sektor pemerintahan, dunia usaha dan sektor sosial kemasyarakatan. Kesempatan kerja di dunia usaha bisa berupa tersedianya kesempatan bekerja di sektor usaha formal, usaha informal maupun kerja mandiri sebagai wirausaha. Hakiki bekerja adalah mendapatkan penghasilan. Diperlukan perubahan paradigma pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tentang penyediaan kesempatan kerja yang lebih variatif. Pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri juga perlu ditata kembali dengan re-orientasi ke tenaga kerja yang *semi-skilled*.

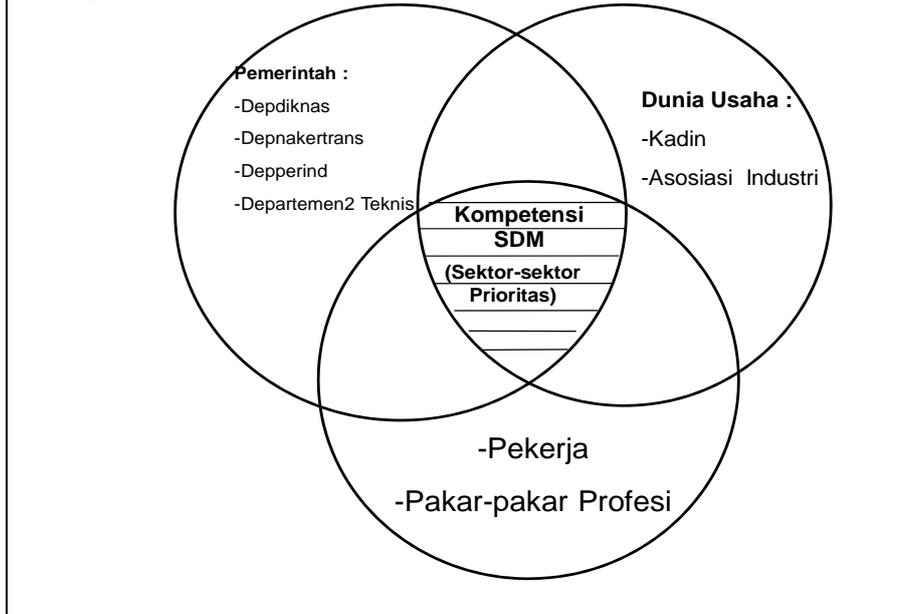
2) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Tidak terjadinya sinkronisasi dan sinergi peningkatan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing sudah mendesak untuk dibenahi. Sinkronisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan-pelatihan, sertifikasi kompetensi, produktivitas, magang dan penempatan tenaga kerja mutlak diperlukan. Diperlukan adanya mekanisme koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja; antara lain melalui pembentukan wadah koordinasi Komite Nasional Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM.

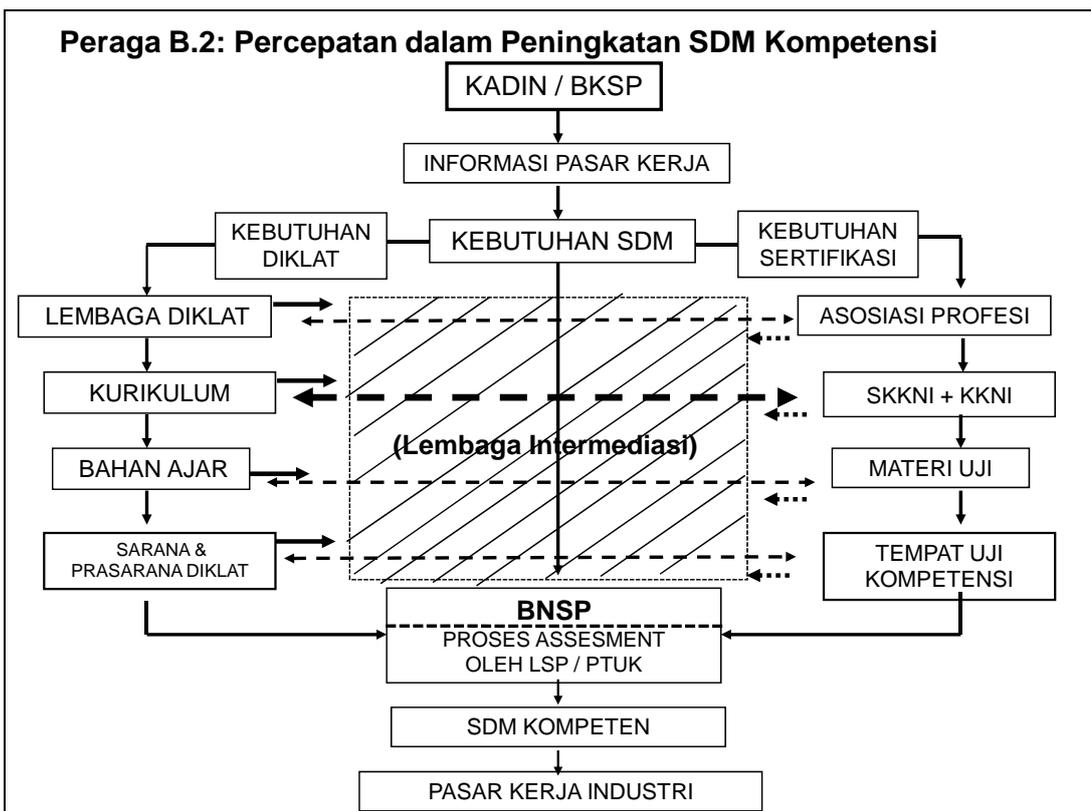
Diusulkan agar BKSP menjadi perpanjangan tangan BNSP di daerah (provinsi dan Kabupaten) untuk mempercepat pembangunan kompetensi.

Dalam hal ini Kadin sebagai wakil dari dunia usaha, secara terstruktur hendaknya berperan dalam pembangunan kompetensi profesi dengan bekerja sama dengan departemen terkait, seperti Depnakertrans untuk penyediaan asesor dan *trainers* dari kalangan industri dan pembuatan kurikulum sekolah kejuruan.

Peraga B.1: Percepatan Sinergitas



Peraga B.2: Percepatan dalam Peningkatan SDM Kompetensi



Usulan untuk menjadi lembaga intermediasi ditingkat nasional untuk mempercepat pembangunan Infrastruktur kompetensi SDM pada semua sektor industri, yang anggotanya terdiri dari:

- Pemerintah: Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian.
- Dunia Usaha: Kamar Dagang dan Industri, Dunia Usaha dan Industri, Asosiasi Industri atau perusahaan, Asosiasi Profesi, Pakar Vokasi atau Pendidikan dan Perguruan Tinggi.
- Pakar-pakar Profesi dan Wakil Tenaga Kerja

3) Pengembangan Wirausaha Baru

Mendorong masyarakat - khususnya generasi muda - untuk menjadi wirausaha akan memberi dua manfaat sekaligus yaitu membuka kesempatan kerja baru dan meningkatkan daya saing perekonomian melalui kehadiran wirausaha-wirausaha baru yang tangguh. Pembentukan wirausaha baru dengan memanfaatkan variasi media komunikasi termasuk pelatihan langsung yang mengikutsertakan pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan-pelatihan perlu diefektifkan dengan prioritas pada pembentukan wirausaha baru di kalangan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Pembentukan Komite Nasional Pengembangan Wirausaha Baru yang mengikutsertakan KADIN sebagai komponen aktif diharapkan akan menciptakan program terpadu berkesinambungan untuk memfasilitasi terbentuknya wirausaha-wirausaha baru.

4) Peningkatan Relevansi Sistem Pendidikan Nasional

Relevansi pendidikan dasar, menengah, tinggi dan non-formal dengan kebutuhan dunia usaha mutlak diperlukan untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dan sekaligus memberi kesempatan tenaga kerja Indonesia berkompeten untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan mengisi jabatan-jabatan strategis di perusahaan dan dunia kerja pada umumnya.

Peningkatan Relevansi sistem pendidikan nasional dengan dunia usaha akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing nasional melalui tersedianya tenaga kerja yang merupakan lulusan sekolah kejuruan (SMK), perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Diperlukan wadah komunikasi dan kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan keselarasan dan sinergi antara penyelenggara pendidikan dan dunia usaha. Prioritas perlu diwujudkan untuk meningkatkan peran serta pendidikan tinggi dalam pembangunan perekonomian melalui Program Sinergi Perguruan tinggi dan dunia usaha.

5) Harmonisasi Perundang-Undangan dan Peraturan Pelaksanaannya

Harmonisasi atas beberapa Undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan perlu dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing nasional. Revisi terhadap UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No.21 tahun 2000 tentang SP/SB, UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan UU No. 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendesak dilakukan agar undang-undang tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dalam rangka terciptanya harmonisasi perundang-undangan di Indonesia dan memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saingnya di kompetisi global.

6. Rekomendasi Program 100 hari

Untuk keperluan penyiapan program 100 hari dimulainya masa bakti Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2009-2014, direkomendasikan lima program Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Program Terpadu Pengembangan Mahasiswa Wirausaha di 100 kampus.
- 2) Pembentukan Komite Nasional Pengembangan Wirausaha Baru yang mengikutsertakan KADIN.
- 3) Percepatan program terpadu yang meliputi pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan (program 3 in 1).
- 4) Penataan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
- 5) Program sinergi perguruan tinggi dan dunia usaha.

II. DIMENSI SPATIAL: PENGEMBANGAN REGIONAL DAN TATA RUANG

1. Rasional

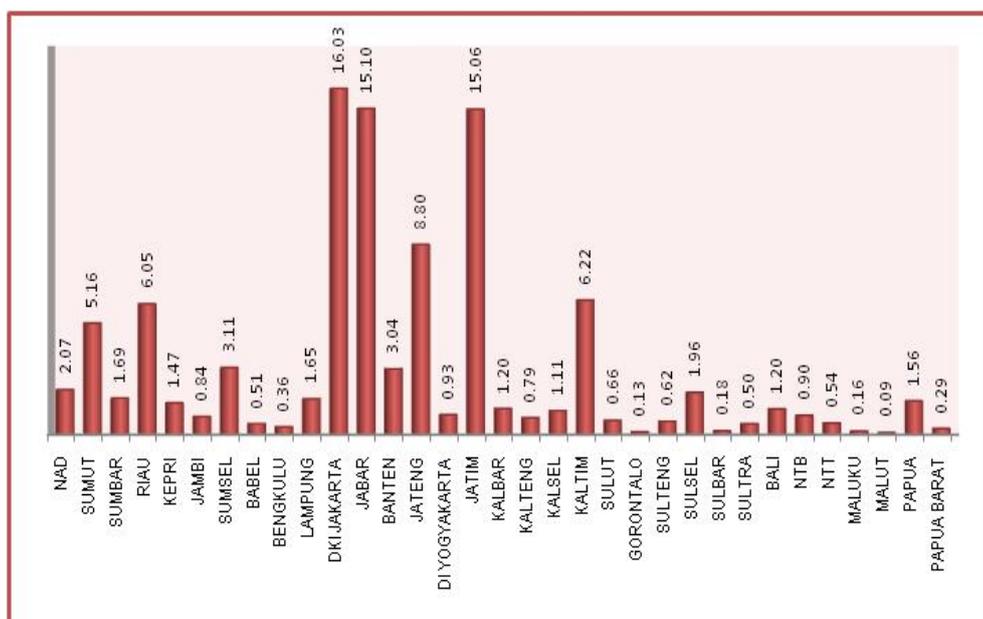
Pembangunan ekonomi Indonesia dengan karakter seperti sekarang ini ternyata masih belum dirasakan manfaatnya secara merata pada setiap daerah dan wilayah, Banyak daerah yang laju pertumbuhan ekonominya dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya rendah, disebut daerah yang kurang berkembang atau tertinggal. Daerah yang tertinggal adalah jika kondisi perekonomian daerah, kondisi sosial masyarakat, ketersediaan pelayanan infrastruktur, aksesibilitas internal dan eksternal, kesenjangan fiskal daerah, dan karakteristik daerah (terisolasi, rawan sosial-ekonomi dan lingkungan), dengan nilai indeks ketertinggalan daerah di bawah rata-rata nasional. Sampai saat ini, ternyata masih banyak daerah kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkan institusi, meningkatkan kegiatan investasi, dan menyediakan pelayanan infrastruktur, serta memiliki letak dan kondisi geografis daerah yang kurang menguntungkan, sehingga daerah tersebut menjadi tertinggal dan masyarakatnya cenderung miskin.

Secara umum, Pulau Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, sektor-sektor jasa modern yang tumbuh secara perkasa belakangan ini sebagian besar berada di kota-kota besar di Jawa. Produk domestik regional bruto (PDRB) DKI Jakarta, misalnya, pada tahun 2007 tumbuh 6,4 persen, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Selama periode 2001-06, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi selalu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Diperkirakan, hal ini terjadi karena Sulawesi merupakan pulau penghasil komoditi perkebunan yang harganya belakangan ini mengalami kenaikan pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulawesi terutama terjadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Tabel 1. Perkembangan Komposisi PDB Regional (%)

	1975	2000	2007
Jawa dan Bali	51,5	60,0	60,2
- Jakarta	8,7	16,7	16,1
- Jawa Barat	14,5	14,4	18,0
Luar Jawa+Bali	48,5	40,0	39,8
- Sumatera	32,2	22,8	23,0
- Kalimantan	7,1	9,5	9,1
- Sulawesi	5,0	4,2	4,1
- Provinsi Lain di Timur	4,3	3,5	3,6
Indonesia	100,0	100,0	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008



Peraga 1. Pangsa PDB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2007

Kontribusi tiga provinsi besar di Jawa dan DKI Jakarta terhadap PDB nasional mencapai hampir 55 persen, suatu angka pangsa (*share*) yang sangat besar dalam konteks keseimbangan spasial pembangunan ekonomi. PDRB DKI Jakarta sendiri menyumbang lebih dari 15 persen, sementara Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing di atas 15 persen, dan Jawa Tengah berkontribusi 8,8 persen terhadap PDB nasional. Dengan kata lain, kontribusi propinsi-propinsi lain di luar Jawa masih sangat kecil, yaitu tidak sampai 1 persen, walaupun daerah-daerah tersebut memiliki kandungan sumber daya yang jauh lebih besar dibanding Jawa. Dua provinsi besar penghasil minyak dan gas bumi, yaitu Kalimantan Timur dan Riau masing-masing telah menyumbang 6,2 persen dan 6 persen terhadap PDB nasional.

Perekonomian Pulau Sumatera mulai bangkit kembali selama dua tahun terakhir ini, setelah sempat tertekan pada tahun 2004-2005. Perekonomian Sumatera sangat didominasi oleh Sumatra Utara, Sumatera Selatan, dan Riau. Peran industri dan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sangat dominan, demikian pula di beberapa propinsi di Sumatera lainnya. Di Jambi, misalnya, peran industri kelapa sawit diperkirakan sekitar 28% dari perekonomian di provinsi tersebut. Di Provinsi Riau dan Bengkulu, peran kelapa sawit dalam perekonomian juga sangat dominan. Kenaikan permintaan terhadap komoditi kelapa sawit dan komoditi hasil perkebunan lainnya, seperti karet, akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Perubahan mendasar di bidang pemerintahan ditandai oleh penerapan otonomi daerah yang sangat luas. Semua kewenangan pada dasarnya ada di tangan daerah (kabupaten/ kota dan propinsi), kecuali untuk bidang-bidang yang karena karakteristiknya yang khas harus berada di bawah kendali pemerintah pusat. Bahkan, lebih jauh lagi, beberapa propinsi telah dilindungi oleh undang-undang tersendiri agar dapat melaksanakan otonomi khusus, sehingga tak lagi tunduk pada undang-undang nasional. Hanya saja, perwujudan otonomi daerah yang hakiki tampaknya masih jauh dari harapan karena beberapa faktor. Misalnya, otonomi daerah tidak diimbangi oleh perubahan mendasar dalam hubungan keuangan pusat-daerah. Hingga kini, tak satu jenis pajak pusat pun yang dialihkan ke daerah. Bahkan, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada kucuran dana pusat, karena basis penerimaan asli daerah masih sangat terbatas.

Sekalipun demikian, dengan segala keterbatasannya, pelaksanaan otonomi daerah telah berhasil mengurangi dominasi Jakarta dan Jawa dalam persebaran kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, penerapan otonomi daerah yang konsisten akan membuka ruang yang lebih leluasa bagi luar Jawa untuk tumbuh lebih cepat. Tanda-tanda ke arah sana sudah mulai tampak. Misalnya, penurunan pangsa Jakarta dalam penghimpunan dana pihak ketiga oleh perbankan. Sebelum krisis pangsa Jakarta mencapai 67,3 persen. Sepuluh tahun kemudian, angkanya turun menjadi 50 persen. Sebaliknya, pangsa dana pihak ketiga di Sumatera dan kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan cukup tajam. Dalam hal penyaluran kredit, pangsa Sumatera dan kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan lebih pesat lagi, yakni lebih dua kali lipat dibandingkan 10 tahun silam. Sebaliknya, pangsa Jakarta merosot tajam dari 68 persen tahun 1997 menjadi hanya 36 persen pada tahun 2007.

Jika pembangunan infrastruktur bisa dipacu lebih cepat di luar Jawa, niscaya kawasan ini akan sangat menjanjikan sebagai sumber pertumbuhan utama di masa mendatang. Sudah barang tentu, yang dibutuhkan adalah pembangunan daerah yang betul-betul meningkatkan kesejahteraan warga daerah. Bukan sekedar “pembangunan di daerah” yang hanya membuat warganya sebagai penonton sebagaimana terus berlangsung hingga sekarang. Hal ini terlihat dari belum terjadinya *feedback effect*. Terbukti, sejauh ini pembangunan di daerah yang cukup marak justru menghasilkan porsi PDRB yang terus meningkat bagi Jawa.

2. Kerangka Pokok Pembangunan Regional

Secara teoretis, pembangunan regional dapat diklasifikasikan berdasarkan kawasan itu sendiri, yaitu: (1) kawasan inti yang tumbuh pesat sebagai akibat aglomerasi ekonomi (*core regions*), (2) kawasan transisi yang tumbuh cukup pesat karena kedekatan dengan pusat aglomerasi ekonomi (*upward transitional areas*), (3) kawasan transisi yang ekonominya menurun atau stagnan (*downward-transitional areas*), (4) kawasan yang belum berkembang tetapi memiliki sumberdaya pertanian atau kegiatan primer (*resource frontier regions*), dan (5) kawasan yang menghadapi kendala khusus karena kondisi lokasi yang terpencil/terisolasi atau potensi sumber daya yang dimilikinya kurang memadai (*special problem regions*). Lihat Friedman, 1966.

Bahkan seri Laporan Pembangunan Bank Dunia (2008) secara tegas membuat klasifikasi bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat antar wilayah akan mulai membaik, jika pendapatan perkapita di suatu negara mencapai USD 3,500. Kedua, tingkat pemerataan kesejahteraan akan lebih mantap, jika pendapatan perkapita di suatu negara mencapai USD 10,000. Terakhir, titik kemapanan pemerataan kesejahteraan masyarakat antar daerah, jika pendapatan perkapita di suatu negara mencapai USD 25,000. Artinya, sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita suatu negara, maka tingkat kesenjangan perkembangan antar daerah semakin kecil, dan integrasi ekonomi antar daerah semakin baik.

Menurut paradigma pembangunan wilayah, proses transformasi sosial-ekonomi dan lingkungan fisik terjadi di dalam ruang dapat dilihat dari dimensi geografi ekonomi, yaitu: (1) dimensi kepadatan ruang (*density*), (2) jarak ruang (*distance*), dan (iii) pembagian fungsi ruang (*division*). Ketiga dimensi ini dapat menciptakan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, namun juga dapat menciptakan integrasi ekonomi antar wilayah secara eksklusif yang dapat dianalisis dari fenomena: (1) aglomerasi, (2) migrasi, dan (3) spesialisasi.

Untuk mengurangi ketidakmerataan antarruang tersebut, maka kerangka pembangunan kawasan perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip keterkaitan (*linkage*), yang berupa: (1) Keterkaitan yang

sinergis antar kota induk dengan kota sekitarnya di kawasan metropolitan, terdapat kecenderungan kota metropolitan bergabung dengan kota di sekitarnya dan menjadi sangat besar, (2) Keterkaitan antara perkotaan dan perdesaan di kawasan agropolitan, dan (3) Pengendalian pengembangan perkotaan dengan menyebarkan pusat-pusat kegiatan nasional dan wilayah.

3. Landasan Hukum Tata Ruang

Indonesia kini telah memiliki landasan hukum tata ruang baru yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, yang memiliki implikasi sangat luas, mulai dari perencanaan ruang di tingkat makro sampai pada tingkat mikro sektoral dan pengembangan komoditas. Misalnya, pada UU 26/2007 tersebut telah secara tegas memuat beberapa hal penting berikut: (1) penetapan kawasan strategis nasional (pasal 20 ayat 1d), (2) kawasan strategis provinsi (pasal 23 ayat 1d), dan (3) kawasan strategis kabupaten (pasal 26 ayat 1d).

Perencanaan tata ruang kawasan perdesaan (pasal 49 dan pasal 50), pemanfaatan ruang kawasan perdesaan (pasal 52), pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan (pasal 53), dan kerja sama dalam penataan ruang kawasan perdesaan (pasal 54); Penataan ruang kawasan perdesaan dilaksanakan dalam rangka: (1) pemberdayaan masyarakat perdesaan, (2) mempertahankan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, (3) menjaga keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan (pasal 48 ayat 1.e);

Disamping itu, pada UU 26/2007 tersebut secara tegas ditetapkan strategi pengembangan kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan (pasal 48 ayat 4); dan penataan ruang kawasan agropolitan (pasal 48 ayat 5 dan pasal 51). Misalnya, untuk mendukung sektor produksi pertanian dan pangan, selain dapat dilakukan melalui kawasan peruntukan nasional dan kawasan strategis nasional, tapi dapat juga dilakukan melalui Kawasan Andalan Darat dan Kawasan Andalan Laut.

Kawasan Andalan yang dimaksudkan adalah perwujudan salah satu dari tujuan penataan ruang wilayah nasional, yaitu keseimbangan dan keserasian pertumbuhan nasional. Untuk itu, maka RTRWN menetapkan Penyebaran Pusat Pertumbuhan Nasional yang merata di seluruh wilayah nusantara sehingga terbentuk kantong ekonomi wilayah, yang disebut dengan Kawasan Andalan yang diuraikan di atas.

Pengertian Kawasan Andalan: bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Tujuan Kawasan Andalan: Mempercepat dan pemeratakan pertumbuhan ekonomi wilayah nasional sesuai komoditi unggulan yang berdaya-saing (kompetitif dan komparatif) nasional dan internasional atau ekspor. Kawasan Andalan sebagai pusat pertumbuhan yang memiliki Sektor Unggulan (*propulsive industry*), yang terdiri atas: 112 Kawasan Andalan Darat (57 di Kawasan Barat Indonesia-KBI dan 55 di Kawasan Timur Indonesia-KTI) dan 40 Kawasan Andalan Laut (15 di KBI dan 25 di KTI).

Masing-masing Pusat Pertumbuhan (kawasan andalan) memiliki Kota Pusat Kawasan, yang berfungsi sebagai pusat koleksi-distribusi dan pusat industri pengolahan. Dan membentuk Sistem Perkotaan Nasional yang Berhierarkis, yang terdiri atas: PKN, PKW, PKL, dan PKSN. Pengembangan sistem perkotaan nasional, kawasan lindung, dan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan sektor pertanian & kelautan, meliputi:

- 1) Pengembangan 38 PKN, 177 PKW, dan 26 PKSN sebagai lokasi pusat industri pengolahan hasil produksi pertanian & perikanan serta jasa pendukungnya;

- 2) Pengembangan infrastruktur transportasi (jaringan jalan nasional, pelabuhan laut, bandara, kereta api) untuk mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan sentra produksi ke lokasi pengolahan maupun pasar;
- 3) Pengembangan wilayah sungai (WS) nasional yang terdiri dari WS lintas negara, WS lintas provinsi, WS strategis nasional sebagai sumber air bagi irigasi; dan (4) pelestarian kawasan-kawasan berfungsi lindung, baik darat maupun laut, untuk menjamin ketersediaan air untuk kawasan-kawasan pertanian serta proses perkembangbiakan biota laut.

4. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi; (2) pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan; (3) Pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah; (4) peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan kereta api, dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi); (5) peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (*sektor riel*) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja); dan (6) peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi diatas antara lain: (1) pengelolaan 'sistem perencanaan' untuk meningkatkan efektifitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pengembangan kegiatan investasi dalam pemanfaatan potensi wilayah; (2) Penciptaan 'paket investasi' kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat' untuk mendukung peningkatan kegiatan produksi komoditas unggulan, dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat; (3) pengembangan pengelolaan 'kerjasama antar daerah' dalam pemanfaatan potensi wilayah, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pemasaran produk unggulan daerah, dan pengembangan kawasan dan infrastruktur; (4) peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada sasaran sektor dan wilayah, serta kelompok masyarakat.

Prioritas dapat diberikan pada beberapa hal krusial berikut: (1) penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah, untuk meningkatkan keseimbangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (2) pelaksanaan strategi pengeluaran keuangan daerah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik, dan sekaligus mendukung perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah, dan (3) meningkatkan penerahan sumber pembiayaan investasi melalui pembentukan semacam dana amanah (*trust fund*) untuk mendukung investasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Khusus pada daerah-daerah tertinggal, strategi pembangunan ekonomi wilayah perlu memiliki empat pilar penting berikut ini. *Pilar pertama*, peningkatan kemampuan masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui kebijakan: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan infrastruktur (perdesaan/ kawasan), dan (4) pengembangan institusi sosial-ekonomi dan pemerintahan; *Pilar kedua*, optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah, dilakukan melalui kebijakan: (1) inventarisasi dan analisis potensi wilayah, dan rencana

pemanfaatannya, (2) peningkatan kegiatan investasi, (3) pemberdayaan UKM dan dunia usaha, dan (4) pengembangan kawasan produksi; *Pilar ketiga*, integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan maju, dilakukan melalui kebijakan: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2) pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. *Pilar keempat*, pengembangan daerah khusus yang memiliki karakteristik 'keterisolasian dan kerentanan sosial-ekonomi dan lingkungan', dilakukan melalui kebijakan : (1) penyediaan akses prasarana dan sarana transportasi ke daerah terisolasi, (2) peningkatan taraf kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk komunitas adat terasing, (3) pengembangan kawasan (kawasan perdesaan di pedalaman dan pesisir, daerah rawan lingkungan, pulau-pulau kecil terpencil, perbatasan, dan kawasan strategis).

B.II.Spatial/12 september 2009

III. PEMBERDAYAAN DAERAH DAN PENGUSAHA DAERAH

1. Kondisi Pengusaha Daerah Saat ini

Kondisi pengusaha daerah, atau tepatnya kondisi pembangunan ekonomi di daerah saat ini, salah satunya dapat didekati dari kinerja perkembangan investasi dalam negeri dan investasi asing yang masuk ke Indonesia, paling tidak selama tujuh tahun terakhir dengan nilai Rp 20,3 triliun dan PMA dengan Rp 14,87 triliun

Namun demikian, sampai pada tahun 2008, investasi dari dalam negeri lebih dominan dibandingkan investasi asing, dengan nisbah rata-rata 77 persen domestik berbanding 23 persen asing.

Ketimpangan dan disparitas investasi masih terlalu jauh, karena Jawa telah mampu merebut Rp 13,6 triliun investasi asing dan Rp 12,231 triliun investasi modal domestik. Sementara itu, di luar Jawa nilai investasi masih Rp 1 triliun untuk investasi asing dan Rp 4,8 triliun untuk investasi domestik. Investasi di wilayah bagian barat tentu sangat jauh dibandingkan nilai investasi di Indonesia Bagian Timur.

Sistem *reward and punishment* belum dapat diterapkan di organisasi Kadin, sehingga dorongan bagi jajaran Kadin Provinsi untuk mematuhi peraturan organisasi belum optimal. Dalam rangka itu sudah dirintis kegiatan *rating* sebagai upaya memetakan potensi dan kelembagaan Kadin Provinsi, sehingga pendelegasian tugas di masa mendatang akan semakin baik lagi.

2. Permasalahan yang dihadapi

Keberadaan Keppres 80/2003 menyebabkan turunnya aktivitas dan performa dari mayoritas Kadin Provinsi dan Asosiasi tertentu. Beberapa Kadin Provinsi dan Asosiasi tetap eksis dalam pelaksanaan sertifikasi karena memiliki jaringan dan lobi yang baik dengan pengguna sertifikat (Kementerian & Gubernur) karena mampu menyakinkan pentingnya sebuah sertifikasi.

Seiring dengan adanya UU mengenai otonomi daerah, maka lobi dalam rangka memperkuat eksistensi Kadin sebagai wakil dunia usaha dilakukan juga melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan menghasilkan 1). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 500/1883/V/Bangda tertanggal 16 Desember 2005 tentang Kerja sama Ekonomi Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Bentuk Konsensi, 2). Departemen Dalam Negeri nomor : 500.05/1542/V/Bangda tanggal 27 Agustus 2008 mengenai permintaan Depdagri kepada Gubernur, Bupati/Walikota supaya menghimbau kepada setiap pengusaha dibidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta untuk memiliki Kartu Tanda Anggota. Di beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Aceh dan DKI Jakarta cukup membantu dalam lobi ke Gubernur setempat, sehingga jumlah anggota Kadin menjadi signifikan.

Upaya pembangunan dan perkuatan kapasitas organisasi sangat penting dalam upaya menjadikan Kadin dan Asosiasi sebagai lembaga yang efektif dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui pembinaan bagi dunia usaha sesuai amanah UU No 1/1987.

3. Program Aksi

Jangka Pendek (satu tahun atau kurang)

- Peningkatan jumlah kerja sama Kadin Daerah di bidang ekonomi dengan Pemerintah Daerah dan dukungan terhadap keanggotaan mencapai 30% dari jumlah Kadin Provinsi yang ada;

- Peningkatan jumlah anggota biasa Kadin (perusahaan) 10% tiap tahunnya yang didukung dengan kemudahan pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan data melalui pendaftaran online;
- Perbaiki jaringan kerja (*networking*) antar pengusaha daerah dalam rangka membentuk mekanisme koordinasi dan komunikasi yang rutin antar wilayah di Kadin untuk sinergi pembangunan daerah

Jangka Menengah (1-5 tahun)

- Peningkatan keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek-proyek investasi di daerah, paling tidak sampai 20 persen dari existing value;
- Peningkatan peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah dalam konteks pembiayaan dan pendampingan usaha, misalnya melalui pembentukan sentra pembinaan UMKM daerah melalui program satu desa satu produk (OVOP)
- Perbaiki distribusi informasi dan komunikasi bisnis lintas sektoral antar wilayah. Terwujudnya mekanisme koordinasi antar wilayah pada tahun 2010 dan pada 2014 setiap provinsi mengikuti program satu desa satu produk (OVOP)
- Mendorong terbitnya keputusan Pemerintah yang lebih mengakui eksistensi Kadin sehingga dapat dioperasionalkan di tingkat daerah khususnya dibidang kerjasama ekonomi & keanggotaan Kadin,
- Mendorong revisi Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, agar memberikan peran lebih besar kepada Kadin.

Jangka Panjang (di atas 5 tahun)

- Mendorong terjadinya reformasi birokrasi di daerah, dalam kerangka pelaksanaan Good Corporate Governance, misalnya dengan sistem E-Government untuk meningkatkan transparansi kebijakan dan mempermudah pelayanan publik;
- Mengambil inisiatif untuk mengusulkan penyederhanaan dan prosedur kredit perbankan, serta memperpendek rantai birokrasi perbankan;
- Mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Perbankan, Dana 40% yang terkumpul dari pihak ketiga di daerah wajib di salurkan ke pengusaha daerah.
- Mengajak pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) untuk memperjelas rencana tata ruang dalam rangka menjamin usaha (investasi) di daerah, menyelesaikan tumpang-tindih kejelasan peruntukan, serta tata-ruang daerah/wilayan dan tata ruang nasional, sebagaimana diamanatkan oleh UU 26/2007 tentang Tata Ruang.

4. Road Map 2009-2014

Peranan Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha Indonesia perlu ditingkatkan melalui:

- Perubahan AD/ART yang disahkan oleh Keppres dan memberikan pengaturan organisasi yang lebih baik
- Pendelegasian sebagian kewenangan perijinan kepada Kadin untuk memudahkan investasi dan ijin usaha
- Pemberian ijin investasi dan ijin usaha harus mendapatkan rekomendasi dari Kadin sesuai tingkatannya
- Kewenangan pemberian referensi rekomendasi usaha kepada Kadin

- Penyediaan dan peningkatan infrastruktur di daerah, misalnya optimalisasi infrastruktur yang ada melalui pendampingan dan asistensi Kadin Indonesia
- Peningkatan kemampuan infrastruktur, khususnya di Kadin Provinsi yang memiliki nilai dibawah ambang batas minimal infrastruktur sebuah Kadin Provinsi.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha khususnya UKM dan Koperasi dan pelaku usaha daerah umumnya perlu diupayakan:

- Kemudahan mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit, antara lain penilaian kelayakan kredit usaha berdasarkan aktivitas rekening perusahaan untuk jangka waktu 1 tahun
- Fasilitasi Kadin dan Perbankan untuk melakukan pembinaan sehingga pengusaha UKM dan Daerah menjadi bankable
- Pemberian alokasi kredit yang diatur dalam peraturan perbankan (merubah aturan perbankan), yang memberi kebijakan kepada Bank untuk mengalokasikan 60% dana yang disimpan di daerah diberikan kredit ke Pengusaha Daerah
- Perubahan aturan dalam Keppres 80/2003 bahwa pada pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 2 milyar dikerjakan oleh Pengusaha Daerah.
- Perusahaan PMA/besar yang mengerjakan proyek investasi di daerah melibatkan Pengusaha Daerah dan memberikan alokasi share kepemilikan sebesar 20%. Jika berupa pekerjaan maka lokal konten adalah 20%.
- Berdasarkan profile investasi, maka PMDN lebih dominan dibandingkan dengan PMA, sehingga perlu perlindungan dan fasilitasi yang lebih baik bagi investasi PMDN
- Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, sehingga memacu Pengusaha Daerah untuk tidak migrasi ke pulau Jawa

5. Dukungan Pemerintah

- Aksebilitas Pemerintah dan dukungan perkuatan organisasi Kadin. Jika pembuatan PP tidak memungkinkan, maka operasionalisasi UU No 1/1987 dilakukan diterbitkan melalui Keppres. AD-ART Kadin.
- Dalam kegiatan forum komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, hendaknya melibatkan Kadin Indonesia sebagai nara sumber yang membahas mengenai hubungan Pemerintah dan Dunia Usaha, peningkatan ekonomi daerah, investasi daerah dan topik lainnya yang relevan.
- Meningkatkan peran/keikutsertaan Kadin dalam kegiatan promosi bisnis, temu pengusaha yang dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah. Kegiatan promosi dilakukan secara bersama-sama Pemerintah dan Kadin.
- Dukungan Pemerintah pada perkuatan eksistensi Kadin sebagai representasi perusahaan dengan mendorong semakin banyak perusahaan menjadi anggota Kadin.
- Pemerintah pro aktif menawarkan peluang investasi kepada pengusaha daerah.
- Pemerintah mendorong dana-dana daerah supaya dipergunakan untuk pembangunan dan tidak ditaruh di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena mengurangi kesempatan bagi pengusaha daerah untuk akses kredit perbankan.

6. Pola Penjaminan Kredit UMKM dan Koperasi di Daerah

6.1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah (Pemda) menempatkan dana pusat dan daerah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Tidak sedikit BPD yang menempatkan dana Pemda tersebut ke dalam instrumen jangka pendek Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana yang tersimpan di SBI tersebut adalah dana pengeluaran rutin Pemda dan dana pembangunan dari APBD yang belum terpakai karena lambatnya proses rencana, persetujuan dan realisasinya. SBI dinilai memberikan pendapatan yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank sehingga bank akan dapat menjaga likuiditas dan memupuk laba.

Namun demikian, pada dasarnya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk percepatan kegiatan ekonomi daerah antara lain melalui skema pemberian kredit UMKM yang dijamin oleh Pemda.

6.2. Persoalan daerah

Masih terdapat kendala kepemimpinan di pemerintah daerah maupun persoalan yang menghambat implementasi anggaran, termasuk di daerah, yang disebabkan, antara lain:

- 1) Perencanaan yang kurang bagus dan lamban dari Pemda/DPRD sehingga membawa kesulitan eksekusi program yang membawa dampak penyerapan anggaran daerah yang rendah.
- 2) BPD dipandang sebagai kebanggaan daerah dan acapkali tidak terlepas dari percaturan politik di daerah.
- 3) Seolah-olah ada petunjuk dari DPRD yang mensyaratkan peningkatan pendapatan asli daerah. Akibatnya, banyak dana yang seharusnya untuk membiayai pembangunan lebih dititipkan di BPD untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dibukukan bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
- 4) Adanya keterbatasan kemampuan SDM perbankan BPD, khususnya petugas kredit BPD, untuk menggali dan mengenal potensi bisnis yang prospektif di daerah berikot risiko dan kendala yang mungkin terjadi.
- 5) Kemampuan memupuk keuntungan merupakan indikator keberhasilan kepemimpinan direksi BPD yang mewakili Pemda.

Jika memang demikian, buat apa perbankan memupuk laba tinggi dan pendapatan asli daerah yang besar tetapi sektor riil tersendat, infrastruktur rusak, pengangguran dan kemiskinan sulit ditekan.

6.3. Solusi Pemberdayaan BPD

APBD akan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi jika sumber dana yang dimiliki mampu dialokasikan dengan efektif dan efisien. Bank Pembangunan Daerah/BPD harus menggunakan dana untuk pembangunan daerah dalam bentuk kredit investasi atau modal kerja. Jika perlu BPD membuat konsorsium dengan bank swasta nasional dan bank asing untuk pembiayaan pembangunan daerah mengingat BPD seharusnya lebih tahu keperluan pembangunan di daerahnya. BPD juga perlu membuat program penerusan kredit kepada BPR. Hal yang diperlukan dilakukan adalah:

- 1) Perlu ada kepemimpinan kuat di Pemda, sehingga perencanaan dan eksekusi anggaran lebih tepat dan cepat.
- 2) Ada baiknya DPRD mulai menganggap peningkatan sektor riil di daerah lebih penting dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah.

- 3) Pemda sebagai pemilik BPD tidak hanya mensyaratkan keuntungan tinggi tetapi lebih kepada penyerapan kredit kepada investasi atau kegiatan riil di wilayah setempat. Lebih baik perekonomian berjalan dan dinikmati masyarakat secara nyata.
- 4) BPD perlu menyiapkan petugas kelayakan kredit yang handal dalam berbagai sektor. Salah satu keunggulan BPD adalah perannya dalam pembangunan ekonomi regional, yang secara ekonomis kadang sulit dilakukan bank swasta lain. Bagaimanapun, selayaknya BPD lebih paham tentang peluang bisnis di daerahnya.
- 5) Untuk mengimbangi persaingan, BPD perlu berbenah dengan menguatkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan fokus pada segmen tertentu sesuai dengan potensi daerah.

6.4. Urgensi skema penjaminan kredit di daerah

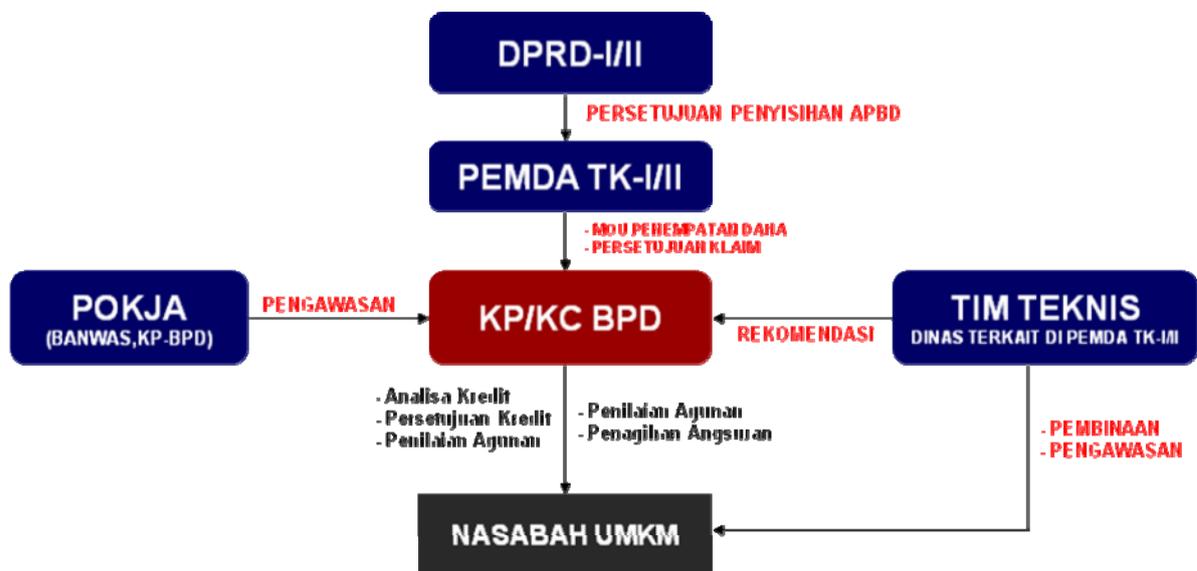
Guna mendorong peran BPD dalam pemberian kredit di daerah maka Pemda bersama-sama dengan BPD dengan endorser Bank Indonesia dapat membentuk skim penjaminan kredit di daerah mengingat peran penjaminan Askrindo yang sangat terbatas.

Skim penjaminan kredit daerah dapat menggunakan dana APBD yang disisihkan dengan tujuan:

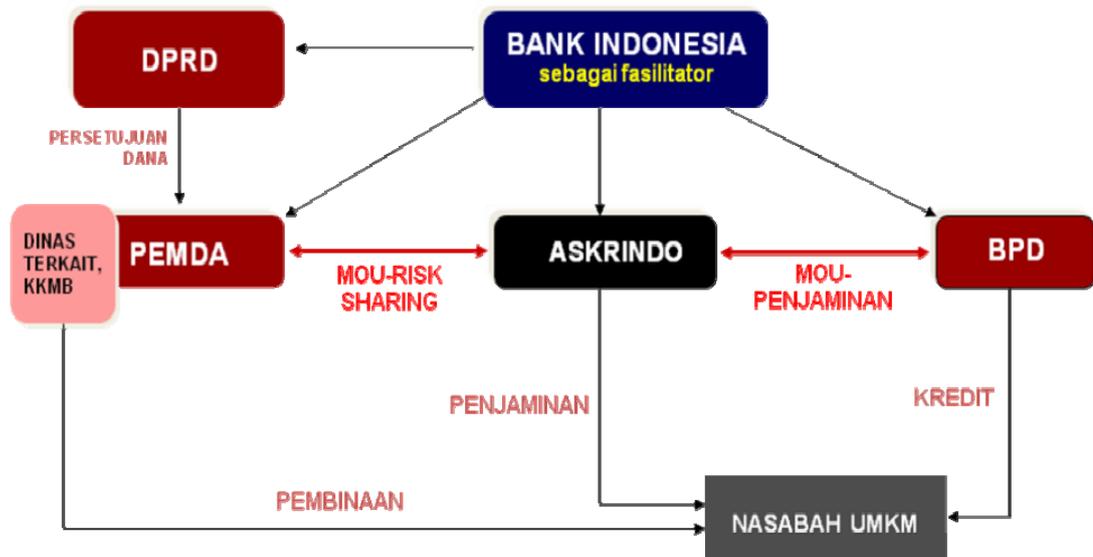
- 1) Mempertahankan kesimbambungan pembiayaan dari sektor perbankan ke sektor riil.
- 2) Memfasilitasi akses kredit UMKM yang dinilai feasible (memiliki prospek usaha yang baik sesuai penilaian bank) kepada kredit perbankan tetapi tidak bankable karena menghadapi masalah agunan yang tidak memenuhi persyaratan. Adapun prinsip-prinsip skim penjaminan kredit di daerah adalah: Pelengkap dari suatu sistem perkreditan, Penjaminan hanya dilakukan apabila usaha dinilai layak, Penjaminan kredit merupakan pelengkap atau pengganti agunan, Penagihan subrograsi tetap merupakan tugas dari kreditur.

Pola skim pembiayaan kredit yang diusulkan:

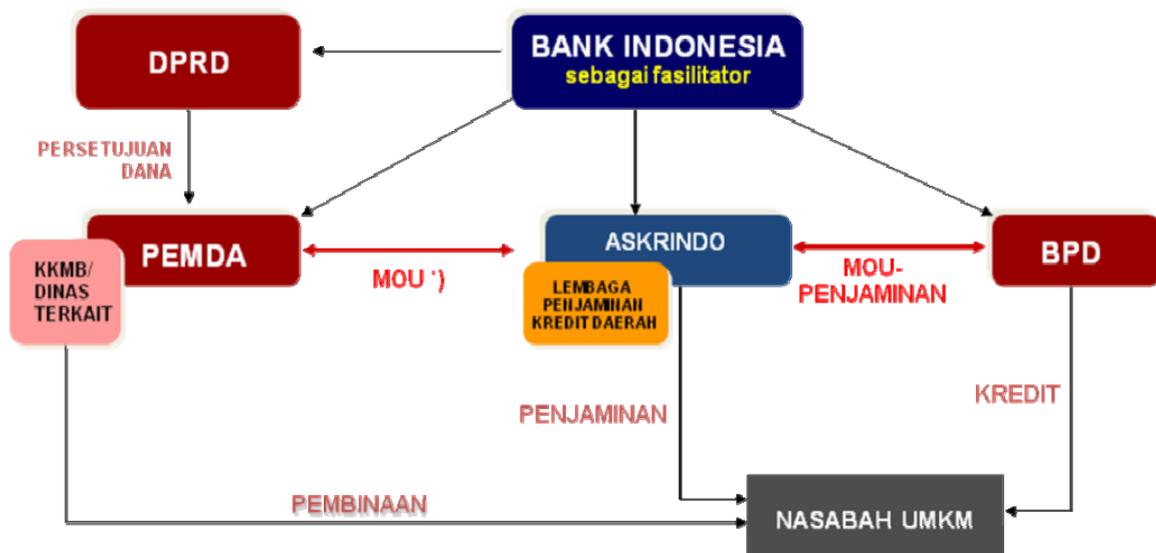
- 1) Penjaminan Pemda atas kredit yang diberikan



2) Skim penjaminan kredit dengan Pemda tidak memiliki Lembaga Penjaminan Kredit Daerah



3) Skim penjaminan kredit dengan Pemda memiliki Lembaga Penjaminan Kredit Daerah



*) 1 BIAYA OPERASIONAL, KANTOR, DAN TENAGA KERJA atau
2 RISK SHARING

Adapun manfaat pemberian skim penjaminan kredit adalah:

Bagi Pemda dan UKM:

- 1) Memberikan kemudahan akses kredit kepada UMKM dengan persyaratan sebagaimana umumnya.
- 2) Meningkatkan produktivitas UMKM, sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas sosial, peningkatan pendapatan dan tabungan pemerintah melalui peningkatan pajak.

Bagi BPD:

- 1) Peluang meningkatkan keuntungan sekaligus menurunkan risiko (bobot risiko kredit yang dijamin oleh BUMN <100%)
- 2) Meningkatkan kapasitas pemberian kredit serta keuntungan yang diperoleh tanpa harus menambahkan modal
- 3) Menjamin bank mendapatkan pelunasan lebih cepat dibandingkan jika harus melikuidasi agunan debitur

6.5. Benturan peraturan

Peraturan yang mendukung dan tidak mendukung pelaksanaan skim penjaminan kredit daerah

Peraturan yang mendukung:

- 1) UU No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 9.(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku dst. berwenang: Menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Atas Nama Pemerintah Daerah.
- 2) Peraturan Presiden No.7/2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 BAB 20 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Butir D No. 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, serta peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM Nasional dan Daerah, disertai dengan pengembangan jaringan Informasinya.

Peraturan yang tidak mendukung:

- 1) Peraturan Pemerintah RI No.107/2000 Tentang Pinjaman Daerah, pasal 10 (1) Daerah Dilarang Melakukan Perjanjian Yang Bersifat Penjaminan Terhadap Pinjaman Pihak Lain Yang Mengakibatkan Beban Atas Keuangan Daerah.
- 2) SK Menkeu No.479/KMK.06/2003 Tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan
- 3) UU No. 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 55 (1) Daerah Tidak Dapat Memberikan Jaminan Atas Pinjaman Pihak Lain

B.III.Pemberdayaan_daerah/14 september 2009

IV. PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI

1. Kondisi terkini usaha mikro dan kecil menengah (UMKM)

Berdasarkan data BPS (2008) tercatat bahwa jumlah pelaku usaha skala kecil dan menengah mencapai 51,257 juta unit, yang mana sebanyak 99,66% merupakan usaha mikro dengan kekayaan bersih per tahun kurang dari Rp 50 juta dan hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta, ditambah 1,01% atau 520,22 ribu unit merupakan usaha skala kecil (kekayaan bersih per tahun Rp 50 juta - Rp 500 juta dan hasil penjualan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar). Adapun yang termasuk usaha skala menengah hanya 0,08% (39,66 ribu unit) dengan kekayaan bersih per tahun Rp 500 juta-Rp 10 miliar dan hasil penjualan Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar. Sedangkan usaha besar hanya terdapat 0,01% (4,37 ribu unit) dengan kekayaan bersih per tahun lebih dari Rp 10 miliar dan hasil penjualan lebih dari Rp 50 miliar.

Sebagai mayoritas dalam hal jumlah pelaku usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak (90,9 juta atau 97,1%) dan kontribusi terhadap PDB sekitar 55,6% (Rp 2.609,4 triliun) dan nilai investasi yang cukup signifikan (Rp 640,4 triliun) serta mampu menciptakan devisa sebesar Rp 183,8 triliun (20,2%), sudah barang tentu UMKM dan Koperasi memegang posisi yang sangat strategis di dalam perekonomian.

Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM dan Koperasi merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia yang menyentuh semua lini. Namun mengapa keberadaan UMKM dan Koperasi tidak dapat ditingkatkan lagi kapasitasnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi?

2. Permasalahan UMKM dan Koperasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM dan Koperasi masih menghadapi sejumlah masalah laten yang hingga kini tidak mudah untuk diurai jalan solusinya, antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia masih terbatas.
2. Keterbatasan penguasaan manajemen, dan pengelolaan usaha yang tradisional.
3. Penggunaan teknologi
4. Pemasaran terbatas
5. Akses informasi rendah
6. Keterbatasan akses permodalan/kredit.
7. Legalitas usaha dan perlindungan usaha yang belum memadai

Dengan demikian, hampir seluruh UMKM dan Koperasi merupakan pelaku yang masih sangat membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah, karena kondisi mereka yang tidak cukup mampu mengakses sumber pembiayaan untuk mulai melakukan usaha bagi sektor mikro dan sumber daya untuk memperbesar kapasitas usaha mereka bagi sektor kecil menengah. Selain itu masih terdapat cukup banyak kendala lain yaitu dari pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, dan perbaikan sistem produksi.

Kebutuhan tersebut juga diperkuat oleh dinamika kelompok UMKM dan Koperasi yang pertumbuhannya didominasi oleh usaha mikro. Berdasarkan data BPS 2008, pelaku usaha mikro bertambah 1.409.616 unit dan usaha kecil 21.637 unit. Adapun usaha menengah hanya bertambah 1.374 unit.

3. Roadmap 2010-2014

Bertolak dari paparan di atas, berikut adalah peta jalan (*roadmap*) UMKM dan Koperasi dibagi dalam tahapan usulan program pengentasan masalah sebagai berikut:

Tahun	Program sektor mikro	Program sektor kecil & menengah
2010	<p>Tahap persiapan, yaitu fokus dan investasi pada persiapan pembentukan institusi kredit mikro melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan <i>database</i> usaha mikro - Registrasi usaha mikro - Pembuatan <i>database</i> penyedia asistensi teknis untuk usaha mikro - Pembentukan dan <i>launching</i> Pusat Pengkajian Pendampingan dan Pengembangan Mikro Indonesia (P4MI) 	<p>Tahap penciptaan lingkungan bersih dan kondusif, yaitu fokus pada lingkungan dan iklim usaha dari hambatan eksternal melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi beban usaha ekonomi biaya tinggi - Meningkatkan jumlah usaha kecil & menengah di sektor formal - Meningkatkan kepastian hukum - Menciptakan iklim yang fair dan kompetitif - Kadin sebagai fasilitator
2011	<p>Tahap pembangunan, yaitu fokus pada penyaluran kredit mikro melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan dan peningkatan komitmen kredit melalui <i>roadshow</i> dan kolaborasi - Penyaluran kredit mikro, diikuti dengan analisis dan <i>monitoring</i> - Pemberdayaan usaha mikro 	<p>Tahap pembentukan struktur yang suportif, yaitu fokus pada hambatan struktural dan membangun sistem pengelolaan informasi yang terarah dan profesional melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi dan kemitraan dengan pemerintah untuk mendorong Undang-Undang yang lebih pro pertumbuhan, kemiskinan dan kompetisi - Kesepakatan <i>service level agreement</i> dengan pemerintah untuk pelayanan usaha kecil & menengah - Memberdayakan PT UKM Indonesia <i>sebagai trading house</i>
2012	<p>Tahap modernisasi, yaitu fokus pada peningkatan kompetisi di antara penerima kredit mikro dan kredibilitas P4MI melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan usaha yang berkesinambungan dari penerima kredit mikro - Promosi kisah usaha sukses - Peningkatan permintaan dari kredit mikro - Peningkatan sistem informasi manajemen di dalam P4MI 	<p>Tahap menuju motor pembangunan nasional, yaitu fokus pada peningkatan daya saing melalui serangkaian program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan industri di setiap daerah - Meningkatkan fokus di sektor pendukung - Meningkatkan partisipasi usaha kecil menengah dalam program pembangunan - Pemanfaatan industri kreatif di setiap sektor - Mempersiapkan pemain lokal yang kuat dalam setiap sektor - Meningkatkan kemitraan perusahaan dengan lokal
2013	<p>Tahap pengembangan, yaitu fokus pada perpindahan dari konsep kredit mikro ke <i>microfinance</i> melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan deposit mikro - Peluncuran deposit mikro bekerja sama dengan koperasi - Pengembangan asuransi mikro dan reksadana mikro 	<p>Tahap menjadi kapten dalam berbagai kegiatan industry, yaitu fokus pada dominasi perusahaan kecil dan menengah di sektor penting melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemitraan dengan pengusaha besar nasional - Meningkatkan kontribusi usaha kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto

<p>2014</p>	<p>Tahap ekspansi, yaitu fokus pada peningkatan volume dan jangkauan dari <i>microfinance</i> melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan kelas pengguna <i>microfinance</i> menjadi pengguna produk-produk perbankan konvensional - Pengulangan siklus kredit mikro (2015-2020) 	<p>Tahap penciptaan merk nasional yaitu fokus pada tumbuhnya merk lokal yang kuat melalui program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pangsa pasar merk lokal yang bisa menjadi merk nasional dan kemudian regional - Memastikan investasi dan infrastruktur untuk penciptaan merk nasional - Menciptakan hambatan natural bagi produk asing di setiap daerah - Membangun budaya dan tradisi bisnis yang kuat di seluruh Indonesia - Meningkatkan citra Indonesia di mata internasional
--------------------	--	--

V. GOOD GOVERNANCE DAN CORPORATE GOVERNANCE

1. Kondisi Dewasa Ini

Salah satu kendala dan dewasa ini telah menjadi penghalang bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia adalah belum terselenggaranya dengan memadai yang dinamakan “Good Corporate Governance” (GCG) di Indonesia. Sampai sekarang Indonesia masih digolongkan yang pelaksanaan GCG nya rendah, dan bila keadaan ini terus berlangsung maka akan semakin sulit bagi Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Seperti diketahui GCG terkait dengan paling sedikit tiga aspek yaitu:

- 1) Peningkatan kinerja perusahaan (performance)
- 2) Kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku (compliance)
- 3) Kesuaian pada norma etika dan masyarakat (conformance).

Rendahnya penerapan GCG di Indonesia berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman masyarakat dan para pelaku usaha atas GCG dan manfaat yang dapat diraih dengan penerapan yang baik dari GCG. Sampai saat ini penerapan GCG oleh para pelaku usaha masih terfokus pada: (a) kinerja perusahaan dalam arti menciptakan keuntungan; (b) kepatuhan yang berkaitan dapat beroperasi tidaknya perusahaan, dan (c) etika hanya dalam kata-kata atau wacana dan belum diimplementasikan. Rendahnya penerapan GCG tercermin dari rendahnya pasar rating CGPI (Corporate Governance Perception Index) di Indonesia. Sampai saat ini jumlah lembaga dan/atau perusahaan yang menjadi anggota CGPI masih relative sedikit dan tidak berkembang secara berarti. Gambaran yang sama juga terjadi pada pasar rating ARA (Annual Report Award).

Perkembangan yang lamban pada penerapan GCG di Indonesia disebabkan oleh berbagai factor dan diantaranya adalah:

- 1) Belum terdapat peraturan perundangan yang jelas baik serta rinci di bidang korporasi maupun keuangan yang mengatur penerapan GCG secara tegas yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- 2) Belum ada lembaga yang secara konsisten mengawasi penerapan GCG dengan batasan yurisdiksi yang jelas untuk tiap industry ataupun bentuk usaha;
- 3) Belum ada proses pemantauan yang transparan terhadap penerapan GCG dan juga mekanisme penegakannya.

2. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Dengan harapan agar usaha pembangunan dapat mencapai sasarannya atau usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka usaha terus-menerus meningkatkan penerapan GCG perlu dilakukan secara sistematis. Usaha yang dimaksudkan perlu dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam kurun waktu tertentu yaitu antara lain:

- 1) terciptanya situasi yang kondusif untuk berinvestasi
 - a. Peningkatan Kepastian Hukum dan transparansi peraturan dan/atau ketentuan
 - b. Peningkatan pelayanan umum dan birokrasi dilihat dari segi waktu dan efisiensi
- 2) terciptanya Lingkungan usaha yang etis dan bertanggung jawab.

Agar sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai beberapa tindakan dalam periode 2009-2015 akan dilakukan, dan tindakan dan usaha yang dimaksudkan meliputi:

- Mendorong reformasi birokrasi melalui penerbitan UU Pelayanan Umum dan Kode Etik Penyelenggara Negara;
- Peningkatan kualitas keberadaan KPK, Tipikor, Ombudsman melalui penguatan struktur dan sarana yang diperlukan;
- Mendorong terbitnya UU tentang Whistle Blowing;

- Mendorong peningkatan indeks persepsi korupsi hingga nilainya mencapai 6 pada tahun 2015;
- Mendorong penyusunan, publikasi dan sosialisasi kode etik pengusaha Indonesia dan mendorong penerapan Pakta Integritas secara konsisten dikalangan para pengusaha; Dalam hal ini mendorong para pengusaha memusatkan perhatian pada "sustainable profit";
- Mendorong terbitnya ketentuan yang mengharuskan laporan penerapan GCG dan assessment pada industry secara bertahap sesuai urgensinya;
- Mendorong penerbitan GCG Sectoral Code.

3. Tindakan Yang Diperlukan

Tanpa pemahaman akan arti penting GCG dapat dipastikan akan sulit meningkatkan penerapan GSG secara baik di Indonesia. Oleh karenanya langkah mendasar yang perlu dan terus-menerus dilakukan dalam lima tahun mendatang adalah sosialisasi akan pentingnya penerapan GCG di setiap lembaga yang ada di Indonesia. Sosialisasi ini akan efektif bila dilakukan secara bersama antara pemerintah dengan pengusaha (KADIN).

Sejalan dengan usaha sosialisasi ini maka tindakan lainnya masih diperlukan yaitu antara lain:

- ✓ Terbitnya produk dari instansi terkait yang mewajibkan penerapan GSG pada sector-sector tertentu dan melaporkannya secara berkala dengan audit pihak ketiga yang kompeten;
- ✓ Mendorong penyusunan, publikasi dan sosialisasi kode etik pengusaha Indonesia dan untuk sector-sector tertentu dengan mempertimbangkan keunikannya;
- ✓ Mendorong penerapan Pakta Integritas secara konsisten di kalangan pelaku usaha melalui berbagai tindakan yang meliputi:
 - Dorongan bagi terbentuknya kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha tanpa suap dan menghindari praktek persaingan tidak sehat
 - Mendorong para pejabat pemangku anggaran untuk menerapkan Pakta Integritas secara konsekwen dan konsisten;
 - Mengupayakan terlasananya program Anugerh Integritas (integrity Award) baik untuk penyelenggara Negara maupun pelaku uasaha.

Penerapan GCG secara baik dalam prosesnya akan memberi sumbangan yang sangat besar bagi penciptaan ketahanan suatu bangsa. Dengan penerapan GCG diharapkan para investor tidak akan ragu-ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat berinvestasi.

Penerapan GCG adalah pekerjaan tanpa akhir karena harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk ini lembaga-lembaga tertentu yang sudah ada perlu mengambil peran yang sesuai dengan fungsinya. Dapat dibayangkan bahwa bila setiap pelaku usaha dan para pengelola Negara bekerja dengan etika dan para pelaku usaha berubah sikap dari pencari keuntungan maksimal dalam jangka pendek menjadi pengusaha yang bertindak berdasarkan 'pencapaian sustainable profit" yang sudah memperhitungkan lingkungan maka usaha mensejahterakan masyarakat dan menciptakan ketahanan bangsa dan Negara akan membuahkan hasil nyata.

VI. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERORIENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian.

Ada enam jenis input yang menjadi faktor pemungkin (*enablers*) untuk memajukan inovasi, yakni: (1) besarnya pengeluaran untuk riset dan pengembangan (R&D) sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB); (2) kualitas infrastruktur riset lokal; (3) tingkat pendidikan pekerja; (4) ketrampilan teknik pekerja; (5) kualitas teknologi informasi dan infrastruktur komunikasi; dan (5) penetrasi broadband (EIU, 2009)..

Peraga 1 hingga 3 menunjukkan betapa lemah posisi kita dalam hal kegiatan riset dan pengembangan serta kemampuan inovasi. Dalam hal kemampuan inovasi, kita berada pada urutan ke-74 dari 82 negara. Posisi ini hanya lebih baik dari negara-negara “lapisan bawah”, yaitu: Iran, Aljazair, Pakistan, Vietnam, Nigeria, Bangladesh, Angola, dan Libya. Kita jauh tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Korea, dan Taiwan, dan Malaysia.

Selain sangat minim, alokasi dana untuk riset dan pengembangan sangat didominasi oleh sektor publik (pemerintah). Padahal, salah satu kunci keberhasilan dari inovasi adalah jika dunia usaha berada para barisan terdepan. Peran pemerintah sepatutnya lebih ditekankan pada penyusunan strategi nasional dan pengembangan mekanisme insentif.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu unsur yang menopang lingkungan inovasi yang kondusif. Faktor lainnya adalah: lingkungan politik, peluang pasar, kebijakan tentang kebebasan berusaha dan persaingan, kebijakan penanaman modal asing dan pengawasan perdagangan serta lalulintas devisa.

Pengembangan usaha berbasis teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas membutuhkan fleksibilitas dalam perekonomian yang memungkinkan munculnya usaha manufaktur baru dan peningkatan probabilitas merger dan akuisisi yang berbasis restrukturisasi yang efisien. Schumpeter mengatakan probabilitas terjadinya *creative destruction* haruslah tinggi dalam perekonomian.

Proses produksi usang yang tidak efisien harus secara endogen dihancurkan oleh sistem perekonomian itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana perekonomian menciptakan teknologi baru yang memungkinkan proses *creative destruction* tidak berakhir dengan penurunan produktivitas sektor manufaktur itu sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan fleksibilitas sisi penawaran dan fleksibilitas sisi permintaan dari teknologi atau inovasi tersebut.

Sisi penawaran teknologi umumnya bercirikan barang publik, misalnya: pendidikan, laboratorium publik, penelitian dan pengembangan (R&D) publik, fasilitas infrastruktur dan kesehatan yang berorientasi peningkatan kapasitas teknologi. Untuk itu peran pemerintah di bidang-bidang tersebut tak dapat diabaikan sehingga alokasi kebijakan fiskal untuk bidang tersebut seharusnya memiliki prioritas utama.

Selain itu, permasalahan pokok yang muncul adalah tidak siapnya sisi permintaan dari teknologi baru tersebut karena kegiatan usaha di bidang baru tersebut memiliki *social return* yang tinggi tetapi dengan *private return* yang rendah. Permasalahan yang sering muncul adalah adanya dua tipe strategi pengembangan teknologi baru yaitu yang bersifat *top down* dan yang bersifat *bottom*

up. Yang bersifat top down umumnya dilakukan oleh perusahaan modal asing (PMA) dan yang bersifat bottom up dilakukan oleh perusahaan lokal misalnya dalam kasus Jepang, Korea dan China.

Untuk itu program pengembangan sisi penawaran teknologi publik maka pemerintah Indonesia harus menempatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai badan strategis yang berorientasi pada strategi pengembangan teknologi yang bersifat bottom up khususnya dalam sektor manufaktur. Strategi top down dari pengembangan teknologi merupakan lahan dari *foreign direct investment* karena itu perekonomian Indonesia juga harus bersifat terbuka dan ramah bagi berkembangnya FDI di tanah air. Dalam sektor-sektor manufaktur yang memiliki komponen FDI cukup besar maka peran BPPT bukannya tidak ada tetapi lebih sebagai pendamping dan bukan sebagai pemain utama. Dalam kasus yang terakhir ini BPPT harus mampu berimprovisasi untuk memiliki hubungan yang baik dengan FDI sektor manufaktur tersebut agar dapat melihat teknologi yang mereka terapkan dalam rangka melakukan aplikasi yang lebih tepat bagi kondisi perekonomian lokal.

Berikut adalah langkah-langkah lainnya yang seyogyanya diperhatikan dalam proses pengembangan teknologi baru disektor manufaktur yaitu:

- 1) Pemerintah harus berani memberikan subsidi ataupun pembebasan pajak bagi biaya pengembangan teknologi baru di sektor manufaktur. Perlu dicatat bahwa pemerintah tidak perlu melakukan seluruh investasi tetapi investasi tetap dilakukan oleh sektor swasta. Kriterianya adalah aktivitas ini harus merupakan aktivitas baru (teknologi baru), memiliki potensi spill over bagi aktivitas perekonomian lainnya dan adanya sektor swasta yang bersedia diawasi dan dilakukan audit kinerjanya. Langkah ini diperlukan karena adanya ketidakpastian akibat penerapan teknologi baru yang memerlukan investasi yang tidak sedikit dan hambatan dari kondisi local. Taiwan dan China misalnya memberikan kemudahan perpajakan bagi sektor-sektor industri manufaktur yang dipromosikan sebagai lokomotif pengembangan teknologi berbasis penciptaan nilai tambah. Begitu keunggulan teknologi terbentuk maka perlindungan bagi keunggulan teknologi tersebut juga harus terus dilakukan. Dalam hal industri chips, Taiwan membolehkan industrinya menanamkan investasinya di China sepanjang teknologi yang digunakan adalah teknologi tua.
- 2) Mengembangkan mekanisme publik bagi pembiayaan yang beresiko tinggi, misalnya pemerintah Singapore membentuk bank pembangunan, dan lembaga pendanaan khusus bagi pengembangan teknologi serta dana khusus bagi pengembangan sektor manufaktur. Hal ini diperlukan karena dapat dipastikan bahwa mekanisme privat tidak akan mampu membiayai program ini seperti bank komersial dan pasar modal. Karena itu pemerintah Indonesia harus mampu mengembangkan bank pembangunan bagi sektor manufaktur, dana ventura yang dibiayai publik, garansi publik bagi pinjaman bank komersial jangka panjang atau instrument lain yang mampu memakai dana pensiun publik bagi aktivitas pembiayaan sektor-sektor manufaktur yang menerapkan teknologi baru.
- 3) Tugas yang jelas bagi *public R&D* dengan strategi pengembangan teknologi yang bersifat bottom up. BPPT harus mampu bekerjasama dengan sektor swasta dalam mengidentifikasi, mengadaptasi dan melakukan alih teknologi dari luar negeri. Taiwan telah melakukan hal ini dalam pengembangan industri teknologi informasinya. Selain itu tugas BPPT lainnya adalah melakukan penyebaran teknologi secara sistematis. Strategi bottom up sebagai strategi utama agar alih teknologi internasional tidak seluruhnya terkendala oleh perjanjian TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) yang merupakan mekanisme untuk meningkatkan *market power* dari *technology developers* yang memungkinkan mereka bertindak monopolistik. Selain strategi top down sudah dilakukan oleh FDI.

- 4) Melakukan subsidi bagi pelatihan teknis yang bersifat umum. Namun hal ini harus dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta agar terjadi koneksi yang tepat sehingga swasta dapat ikut melakukan pembiayaan parsial dalam program pelatihan *vocational*, teknis dan bahasa Inggris ini.
- 5) Mengajak orang Indonesia kembali ke Indonesia. Mengingat kaum ekspatriat Indonesia yang memiliki keahlian teknologi manufaktur masih banyak berada di luar negeri dibandingkan dengan yang memiliki keahlian ekonomi dan bisnis, mereka harus dapat direkrut kembali ke tanah air. Hal ini pernah dilakukan oleh Taiwan dalam upayanya mendukung industri komputer mereka. Insentif perpajakan umumnya dapat dilakukan seperti yang dilakukan oleh Taiwan.
- 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian swasta di luar dan dalam negeri yang terbukti sukses melakukan alih teknologi. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi sektor manufaktur dengan lembaga-lembaga ini. Akan lebih efektif jika pemerintah memberikan fasilitas fiskal bagi mereka untuk melakukan investasi di Indonesia.
- 7) Mengembangkan kawasan ekonomi khusus industri manufaktur berbasis teknologi. Pada kawasan inilah BPPT harus dapat memiliki kerjasama dengan FDI yang memiliki program teknologi berbasis top down. Begitu pula dengan lembaga pendidikan berorientasi teknologi manufaktur harus mampu melakukan kerja sama dengan FDI pada kawasan ini. Untuk itu, koordinasi dan pembiayaan kawasan ini sebaiknya dilakukan oleh pihak swasta agar kebijakan yang diterapkan tidak bias pada kepentingan non bisnis. Peraturan perburuhan pada kawasan ini haruslah dibuat lebih fleksibel dimana outsourcing sebaiknya juga diperbolehkan. Dengan demikian kawasan ekonomi khusus membawa misi sebagai sarana alih teknologi.
- 8) Melakukan survei *capital stock* nasional khususnya sektor manufaktur dan membakukan pengukuran produktivitas dengan metode *Total faktor productivity (TFP)*. Survei stok modal (*capital stock*) nasional perlu dilakukan agar pengukuran keberhasilan pembangunan dari kemajuan teknologi, kontribusi tenaga kerja, energi, material dan permodalan dapat dihitung secara lebih cermat. Dengan demikian setiap sektor dalam industri manufaktur dapat diperbandingkan kemajuan teknologi di antara mereka dan juga dibandingkan dengan sektor manufaktur di negara lain. Acuan ini akan sangat menentukan pada sektor mana saja program kebijakan industri termasuk program pengembangan teknologi perlu mendapatkan prioritas utama.
- 9) Lembaga kepresidenan sebagai lembaga koordinasi dari faktor eksternal atau dibentuk badan seperti BKKBN namun dengan presiden sebagai otoritas tertinggi. Kesemua faktor di atas harus dibawah koordinasi badan ini selain itu badan ini juga bertanggungjawab menciptakan harmonisasi dengan pihak-pihak seperti Kadin, asosiasi petani, perjanjian perdagangan internasional dan asosiasi perburuhan. Tugas lain lembaga ini adalah membuat Undang-undang Promosi Alih Teknologi dengan tujuan untuk mewajibkan universitas dan lembaga penelitian publik memiliki Kantor Alih Teknologi, undang-undang promosi inovasi dengan tujuan memberikan insentif bagi aktivitas penelitian, dan undang-undang promosi pengembangan teknologi dengan tujuan memberikan insentif bagi pengembangan teknologi.
- 10) Lebih meningkatkan alokasi pengeluaran untuk riset dan pengembangan bagi dunia usaha.
- 11) Untuk mendorong pengembangan teknologi yang berorientasi pembangunan melalui langkah-langkah tersebut di atas diperlukan adanya tokoh yang berprestasi tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terkenal baik di dalam maupun di luar negeri, dan dapat memberikan harapan dan cita-cita kepada generasi muda bangsa ini, sebagai pembantu Presiden dalam pemerintahan yang mendatang.

Research and development expenditure

Countries	R&D Spending 2002		R&D as % of GDP	
	US\$ Bill (PPP)	% of World	1992	2002
East Asia	111.7	13.5	0.7	1.2
Hong Kong	1.1	0.1	0.3	0.6
Korea	20.8	2.5	1.9	2.5
Singapore	2.2	0.3	1.2	2.2
Taiwan	12.2	1.5	1.8	2.3
Indonesia	0.3	0.0	0.1	0.1
Malaysia	1.5	0.2	0.4	0.7
Philippines	0.4	0.0	0.2	0.1
Thailand	1.1	0.1	0.2	0.2
China	72.0	8.7	0.8	1.3
Developed	645.8	77.8	2.3	2.3
Japan	106.4	12.8	2.9	3.1
United States	275.1	33.1	2.6	2.6
Developing	184.1	22.1	0.6	0.9
Latin America	21.7	2.6	0.5	0.6
Emerging Europe	30.3	3.7	1.0	1.2
World	829.9	100.0	1.7	1.7

Source: World Bank (2006), based on Unesco (2004, 2006).

R&D indicators

Country	Sector of performance			Sector of funding			R&D spending	
	Business	Govern't	Higher Education	Business	Govern't	Higher Education	US\$ billions	% of GDP
Korea	76.1	12.6	10.1	74	23.9	1.7	20.8	2.5
Singapore	63.8	10.9	25.4	54.3	36.6	2.3	2.2	2.2
Taiwan	62.2	24.8	12.3	63.1	35.2	0	12.2	2.3
Indonesia	14.3	81.1	4.6	14.7	84.5	0.2	0.3	0.1
Malaysia	65.3	20.3	14.4	51.5	32.1	4.9	1.5	0.7
Philippines	58.6	21.7	17	59.7	24.6	7.5	0.4	0.1
Thailand	43.9	22.5	31	41.8	38.6	15.1	1.1	0.2
China	62.4	27.1	10.5	60.1	29	10	72	1.2
Japan	75	9.3	13.7	74.5	17.7	6.3	106.4	3.1
USA	70.1	12.2	13.6	63.7	31	5.3	275.1	2.6

Source: World Bank (2007) based on Unesco (2006).

VII. IKLIM INVESTASI

1. Kondisi Perekonomian Menuju Tahun 2030

Indonesia merupakan tempat yang berpotensi sebagai tempat tujuan utama untuk berinvestasi dalam jangka panjang, karena: (1) memiliki tenaga kerja dan konsumen besar serta sejumlah SME yang besar pula; (2) memiliki berbagai macam kekayaan alam yang melimpah; (3) cuaca dan lokasi geografis memberikan potensi yang tidak ada duanya bagi produksi yang berkelanjutan dan terbarukan; (4) terbukti memiliki catatan kestabilan yang terpercaya dalam hal politik, sosial dan ekonomi.

Namun hanya dengan memiliki kelebihan di atas tidaklah cukup. Indonesia perlu menarik lebih banyak investasi yang berhubungan dengan investasi dasar, seperti dalam bidang manufaktur, sumber daya dan pertanian yang merupakan sumber keunggulan komparatif yang sangat bisa diandalkan. Peraturan harus dibuat berdasarkan insentif yang propasar sehingga dapat memasukkan teknologi dan sistem manajemen baru bersamaan dengan masuknya investasi tersebut.

Investasi yang luar biasa besar untuk infrastruktur fisik modern diperlukan guna mendukung pertumbuhan, khususnya di daerah. Bersamaan dengan investasi dalam infrastruktur fisik, investasi di bidang jasa yang memerlukan infrastruktur fisik juga perlu dilakukan. Hal ini termasuk jasa seperti telekomunikasi, teknologi komunikasi dan informasi, pendidikan, transportasi dan distribusi.

Semua kegiatan di atas memerlukan koordinasi lintas sektoral dalam investasi dan pengaturan kebijakan, dan harus ditempuh dengan cara yang paling efisien. Keterkaitan antar kegiatan akan menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu mengambil manfaat yang sesungguhnya dari adanya integrasi ekonomi dengan pasar regional dan internasional.

2. Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
<p>Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya stabilitas politik dan sosial • Gencarnya kampanye anti korupsi <p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki catatan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif • Dilengkapi dengan jasa pelayanan terpadu satu pintu <i>/one stop integrated services</i> (PTSP) bagi Investasi dan <i>National Single Window</i> (NSW) bagi kegiatan logistik • Pasar domestik yang besar, dengan pendapatan yang meningkat <p>Sumber Daya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energi dan Mineral • Pertanian dan Kehutanan • Berpotensi bagi produk berkelanjutan dan ramah lingkungan (<i>green product</i>) 	<p>Administrasi dan Regulasi/Peraturan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya harmonisasi dari proses Otonomi Daerah • Kurangnya kemampuan administrasi yang baik, khususnya di daerah • Isu-isu dari <i>WB Doing Business Index</i> <p>Koordinasi Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses DNI yang tidak efektif • Kurangnya koheren antara administrasi dan regulasi pemerintahan, baik di daerah dan pusat • Kurangnya <i>National Branding</i> dan <i>International Promotion</i> • PEPI tidak berfungsi secara efektif • Ketidakjelasan kewenangan yang dipegang oleh PTSP <p>Daya saing yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan buruh yang tidak competitive/ tidak memiliki daya saing • Kurangnya infrastruktur fisik diluar yang telah ada • Kurangnya perkembangan <i>soft</i> infrastruktur (pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, kemampuan R&D dan jasa-jasa penting lainnya) • Logistik yang tidak efisien <p>Tren Integrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia pasif dalam menghadapi FTA

Kesempatan	Tantangan
<p><i>Setelah Krisis Global</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kembali ke sumber-sumber pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetisi yang kuat dalam ASEAN FTA • Strategi investasi BRICs dan Vietnam lebih baik • Pertumbuhan domestic yang menguat di India dan China • Sangsi perdagangan dan investasi terkait isu lingkungan • Indonesia tidak dipertimbangkan dalam rantai suplai regional
<p><i>Tren dalam Integrasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • FTA sebagai alat untuk meningkatkan investasi • Perdagangan dan investasi yang lebih intensif telah tumbuh di Asia 	
<p><i>Isu yang Berkembang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak pilihan potensi investasi terkait mitigasi perubahan iklim global • Meningkatnya permintaan global untuk produk ramah lingkungan 	

3. Aksi dalam Investasi

3.1. Meningkatkan iklim Investasi

1) Memperkuat Proses PEPI dan Sekretariat PEPI

Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)¹ telah direvitalisasi oleh Keputusan Presiden Tahun 2006 dan 2008.

Di dalam Keputusan Presiden 2008, Timnas PEPI telah dilengkapi dengan tanggung jawab yang lebih besar terkait usaha meningkatkan pertumbuhan investasi.² Selain itu, Timnas PEPI juga telah diberikan tugas untuk mengawasi dan mereformasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kondisi yang terjadi

- Timnas PEPI tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi persyaratan dan ekspektasi terkait investasi sebagaimana tertulis dalam Keputusan Presiden.
- Sekretariat PEPI hanya memiliki beberapa staf ahli karena Sekretariat tidak memiliki dukungan dana yang mencukupi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Akibatnya, Sekretariat PEPI kurang memiliki kemampuan untuk membangun keahlian dan kemampuan dalam rangka membangun konsultasi yang lebih efektif dengan *stakeholders* di dunia bisnis dan pemerintahan.

Aksi yang Diperlukan

- Menyediakan laporan publik secara rutin terkait program kerja dan kinerja Timnas PEPI atas nama ketua PEPI.
- Menilai kembali keperluan pengangkatan staf dan sumber dana bagi Sekretariat PEPI sehingga Sekretariat PEPI dapat beroperasi secara profesional dan memiliki alokasi dana yang jelas dan berkecukupan dari APBN untuk lima tahun ke depan kegiatan operasionalnya
- Menunjuk staf eselon I dari Kementerian yang terkait untuk duduk dalam Sekretariat PEPI dengan status pegawai tetap sebagai usaha meningkatkan pengembangan kebijakan, koordinasi dan implementasi

¹ Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dipilih sebagai Ketua Harian. Berdasarkan Keputusan Presiden terakhir, jumlah anggota Timnas PEPI menjadi 21: 19 Kementerian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala BKPM. Dalam melaksanakan tugasnya Timnas PEPI dibantu oleh Sekretariat di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Presiden, Timnas PEPI memiliki tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- c. mengkaji, mengevaluasi dan merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah dalam rangka peningkatan investasi;
- d. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi;
- e. melakukan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi, keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

² Butir c di atas merupakan tambahan pada Keputusan Presiden Tahun 2008

- Membangun proses konsultasi yang dinamis dan rutin dengan kalangan dunia usaha melalui Sekretariat PEPI dan Tim Kadin PEPI di seluruh tahapan pembuatan kebijakan, koordinasi dan implementasi.

2) Reformasi Daftar Negatif Investasi

Keputusan Indonesia untuk membentuk Daftar Negatif Investasi ditujukan untuk meningkatkan kepastian dan transparansi di kalangan investor domestik dan asing, serta juga sebagai upaya mengadopsi *best practice* internasional.

Kondisi yang terjadi

- Proses pembentukan dan revisi DNI yang telah dilakukan sejak 2007 berjalan sangat lambat, tidak menentu, dan tidak transparan. Proses tidak terkoordinasi dengan baik karena kementerian teknis terkait tidak ingin melakukan reformasi.
- Pendekatan yang diambil untuk membentuk dan merevisi DNI tidak menggambarkan keterkaitan antar sektor yang sesungguhnya diperlukan bagi terbentuknya bisnis dan rantai suplai yang terintegrasi dan modern.

Aksi yang Diperlukan

- Pembentukan dan perubahan DNI harus dilandasi atas kepentingan nasional, yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan regional, efisiensi dan pengembangan UKM. Kementerian teknis terkait harus menjadikan tujuan ini sebagai pencapaian di kementriannya
- Perlu langkah koordinasi untuk mereformasi sektor dalam DNI sehingga menggambarkan keterkaitan yang diperlukan antar sektor bagi terciptanya bisnis dan rantai suplai yang terintegrasi
- Membangun proses peninjauan dan *update* yang jelas terkait DNI, dengan memegang asas melihat ke depan dan memanfaatkan dengan baik fase perpindahan kepemilikan asing.
- Memperbaiki proses konsultasi dengan investor terkait permasalahan DNI melalui proses PEPI

3) Implementasi Proses PTSP yang Efektif

Pada Tahun 2009, terdapat sebuah Keputusan Presiden yang memberikan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai usaha memfasilitasi investor di Indonesia.

Fasilitas ini memerlukan Kementerian teknis untuk melimpahkan kewenangannya terkait pengeluaran perijinan yang diperlukan untuk kegiatan investasi di Indonesia kepada BKPM. Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden ini, BKPM dapat bekerjasama dengan pemerintah regional untuk mencapai standar pelayanan nasional yang lebih tinggi dan seragam di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Kondisi yang terjadi

- PTSP tidak akan menjadi sebuah mekanisme yang efektif bagi investor jika tidak ada penjelasan mengenai waktu yang diperlukan untuk pengurusan perijinan dalam skema PTSP.
- PTSP seharusnya ditujukan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja Indonesia dalam memfasilitasi keperluan berinvestasi relatif terhadap negara tetangga dan pesaing di kawasan regional.

Aksi yang Diperlukan

- Perlu kejelasan tipe kewenangan yang dilimpahkan dari menteri teknis/departemen kepada BKPM. Untuk melaksanakan tugas ini, BKPM harus memiliki staf yang berkualitas guna menjalankan tugas teknis tersebut
- Memasukkan semua keperluan yang dibutuhkan untuk melakukan investasi di bawah naungan PTSP, termasuk ijin pengeluaran visa bagi staf asing yang terkait dengan kegiatan investasi.
- Melaksanakan penilaian kinerja secara independent dan rutin, yang mencakup variable kecepatan, ketepatan, kemudahan, transparansi dan kepastian hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan PTSP
- Membangun proses konsultasi dan koordinasi yang formal antara BKPM dengan pemerintahan di daerah guna memastikan kegiatan pelayanan di daerah dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu
- Perlu ditunjuk pegawai yang bertanggung jawab terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh publik dan memastikan nama mereka tersedia di internet.

4) Meningkatkan Efisiensi di Sektor Logistik

Pada Tahun 2008, Pemerintah Indonesia mulai membangun *Blueprint* logistik. *Blueprint* ini direncanakan akan difinalisasikan di bulan Oktober 2009. *Blueprint* merupakan produk tim hasil kerjasama pemerintah dan kalangan dunia usaha.

Kondisi yang terjadi

- 1) Sektor logistik merupakan satu dari sekian banyak sektor penting di Indonesia yang perlu direformasi. Permasalahan di sektor logistik merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang memerlukan perbaikan infrastruktur, transportasi, fasilitas dan penanganan di pelabuhan, nasional single window (NSW), dan jasa layanan logistik swasta.

Aksi yang Diperlukan

- Menjalankan *Blueprint* Logistik dan menyediakan agenda yang rinci dan berkomitmen dalam mengimplementasikan langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan yang tertulis dalam *Blueprint*.
- Secara kontinu melakukan konsultasi dengan kalangan dunia usaha untuk memastikan implementasi berjalan secara efektif dan efisien dalam biaya bagi eksportir, importir dan investor potensial.

5) Insentif bagi Sektor Swasta yang Berinvestasi di Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur terus berlanjut menjadi satu dari sekian banyak yang paling dibutuhkan dan menjadi kendala bagi pengembangan dan pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Kondisi yang dihadapi

- 2) Keinginan untuk membangun infrastruktur di Indonesia tidak dapat dipenuhi hanya oleh investasi domestik. Diperlukan campur tangan investasi swasta dalam membangun infrastruktur fisik di masa yang akan datang.
- 3) Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik tapi bergantung juga pada peningkatan jasa layanan dan *soft* infrastruktur seperti

pendidikan, penelitian, telekomunikasi dan transportasi yang dapat tumbuh karena adanya partisipasi swasta.

Aksi yang Diperlukan

- Menentukan area/jenis projek prioritas yang ditargetkan untuk investasi swasta dan kemitraan publik dan swasta (Public Private Partnerships)
- Bekerjasama dengan sektor dunia usaha dalam membangun insentif yang diperlukan bagi investasi di sektor swasta
- Menentukan soft infrastruktur yang dibutuhkan seperti pendidikan, penelitian dan pengembangan, telekomunikasi guna mendukung investasi di infrastruktur fisik
- Meninjau DNI untuk memastikan DNI telah memberikan insentif bagi investasi di infrastruktur dan jasa, terutama di daerah.

6) Finalisasi Reformasi Peraturan mengenai Perburuhan

Investor asing dan domestik telah lama menekankan bahwa peraturan mengenai perburuhan di Indonesia adalah hambatan terbesar dalam melakukan investasi. Secara khusus peraturan ini menghambat pertumbuhan tenaga kerja karena tingginya pesangon yang harus dibayarkan dibandingkan dengan negara lain.

Kondisi yang dihadapi

- 4) Selama lima tahun terakhir ini pemerintah tidak melakukan reformasi terhadap peraturan perburuhan.

Aksi yang diperlukan

- Perlu meminta komitmen pemerintah untuk mereformasi aturan mengenai perburuhan demi pertumbuhan ekonomi dan demi mengamankan lapangan kerja yang berkelanjutan
- Bersama-sama membangun konsultasi antara 3 pihak dalam mereformasi dengan tujuan membangun hubungan jangka panjang dimana buruh sebagai mitra dan bagian dari pertumbuhan ekonomi
- Melakukan investasi publik seperti pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan mengadopsi insentif baru dan lebih relevan bagi investasi swasta di area ini

7) Mengangkat Peringkat Iklim Investasi di Jajaran Internasional

Tantangan Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi tercermin dari rendahnya peringkat yang dimiliki di hampir sebagian besar index internasional yang telah diakui di dunia seperti *The World Bank's Doing Business* (129/181) dan *Transparency International's Corruption Perception Index* (126/180). Namun berdasarkan *World Economic Forum's Global Competitiveness Index* (55/134) dan *Global Peace Index* (68/140), peringkat Indonesia sebenarnya sedikit lebih baik

Kondisi yang terjadi

- Walaupun terdapat beberapa masalah dengan index ini, namun index ini tetap mampu menunjukkan kinerja Indonesia terhadap Negara lain. Dan yang terpenting adalah adanya peningkatan yang bersifat relative bukan peningkatan yang bersifat absolute bila ingin bersaing dalam menarik investasi
- Dengan terus membangun reformasi yang telah ada dan dengan target yang jelas, Indonesia memiliki kemampuan untuk meningkatkan peringkat di index ini dalam kurun waktu 5 tahun

ke depan. Pemerintah telah bekerjasama dengan *World Bank Group* untuk mencapai tujuan ini. Kegiatan ini harus menjadi kegiatan prioritas yang dilakukan secara terus menerus

Aksi yang diperlukan

- Bekerja sama dengan *World Bank Group* dan agensi lainnya, meningkatkan peringkat relatif terhadap Negara lain, terutama untuk index yang berhubungan dengan investasi, sebesar 30% dalam jangka waktu 2 tahun setelah pemerintahan berjalan

8) Pembangunan Otonomi Daerah

Disentralisasi memungkinkan para kepala provinsi dan kabupaten untuk berinovasi dalam mempermudah proses memulai usaha. Salah satu contoh konkrit adalah pemberian ijin usaha (*business licensing*). Lebih dari 30 persen dari 480 administrasi di daerah (kota atau kabupaten) telah menggunakan kebijakan otonomi yang mereka miliki dengan membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one-stop policy center / PTSP*) guna menarik usaha dan investasi baru.

Kondisi yang dihadapi

- Beberapa daerah administrasi tersebut telah mengeluarkan regulasi yang saling tumpang tindih (*overlap*) dengan regulasi pemerintah. Dengan memberlakukan peraturan-peraturan yang *overlapping* seperti ini mengakibatkan biaya untuk memulai usaha menjadi lebih besar.
- Berdasarkan evaluasi KPPOD mengenai *Economic Governance Index survey 2007*, banyak pemerintah daerah yang tidak membantu dunia usaha.
 - Hampir setengah tidak memiliki registrasi untuk perijinan
 - Hampir tidak ada yang punya mekanisme formal untuk menyelesaikan persoalan seputar dunia usaha
 - Peraturan daerah seringkali bersifat distorsi, mengenakan biaya-biaya tambahan dan menghambat perdagangan

Aksi yang diperlukan

- Perlu adanya sikap kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat untuk mengharmonisasikan perundang-undangan, peraturan dan administrasi daerah yang mempengaruhi iklim investasi dengan didukung insentif kebijakan fiskal.
- Membangun proses konsultasi antara BKPM dan pemerintah daerah secara formal, seperti ketentuan # 3 mengenai PTSP, guna membangun standar penentuan kinerja yang konsisten.
- Bekerjasama dengan dunia usaha dalam membangun program pengembangan kapasitas nasional sehingga tercipta tata kelola yang lebih baik di daerah

3.2. Strategi Investasi Baru

1) Membangun Citra Nasional dan Mempromosikan Indonesia

Kondisi yang terjadi

Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki pencitraan nasional dan strategi promosi yang menyertakan kelebihan (*emerging attributes*) Indonesia guna diarahkan ke pasar internasional, tidak seperti Negara tetangga lainnya. Sampai sekarang, usaha Indonesia masih terfokus pada gerakan konsumen secara nasional melalui kampanye Gerakan 100% Cinta Indonesia (ACI).

- Ada banyak atribut yang mengalami perbaikan semenjak lima tahun lalu seperti kondisi ekonomi dan politik yang stabil, keamanan yang semakin baik, dan kinerja pertumbuhan yang

- Pencitraan dan promosi nasional, terutama untuk investasi, akan efektif dan bernilai jika memasukkan unsur kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, dimana masing-masing pihak memberikan pandangannya untuk tujuan yang sama

Aksi yang diperlukan

1. Membangun dan mengimplementasikan pencitraan dan strategi promosi nasional yang bertaraf internasional dan menghubungkan sektor-sektor utama, departemen dan daerah
2. Membangun promosi investasi bertaraf internasional dengan membentuk Badan Promosi Investasi Nasional untuk Perdagangan, Pariwisata dan Investasi dan bertindak sebagai PR Indonesia
 - Keanggotaan sebaiknya menyertakan representasi dari sektor usaha dan pemerintah, yang dipilih langsung oleh Presiden
 - Badan tersebut harus memiliki anggaran yang jelas dan mencukupi untuk kegiatan promosi, dimana kedua belah pihak harus saling berkontribusi

2) Pendekatan yang Strategis untuk Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas

Sampai saat ini, Indonesia sudah sepakat dengan beberapa perjanjian perdagangan bebas (FTA), seperti hubungan bilateral dengan Jepang, *ASEAN Economic Community* 'satu pasar' dan empat perjanjian dagang antara ASEAN dengan mitranya. Tidak lama lagi, Indonesia akan bernegosiasi dengan Australia untuk perjanjian bilateral dan dengan empat negara dari *European Free Trade Agreement* (EFTA).

Kondisi yang terjadi

- FTA memberi potensi bagi Indonesia menjadi pusat investasi
- Di sisi lain FTA dengan ASEAN membawa resiko terjadinya pemindahan investasi dari Indonesia ke negara tetangga jika tidak ada upaya perbaikan iklim investasi nasional
- Diperlukan upaya dari seluruh jajaran kementerian untuk membangun pendekatan yang lebih terkoordinasi dan strategis guna mengambil manfaat dari adanya FTA

Aksi yang diperlukan

- Membangun proses SIAP (*Strategic Investment Action Plan*) seperti yang terdapat dalam *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan Jepang, terhadap FTA yang sudah ada dan yang dalam negosiasi. Tujuan proses ini adalah mengidentifikasi dan mengangkat kelemahan yang menghambat investasi di masing-masing perjanjian bilateral dan regional sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Proses SIAP sebaiknya mengikutsertakan *stakeholders* dari pemerintah dan dunia usaha
- Mengkaji keseluruhan FTA guna menentukan sub sektor prioritas bagi investasi Indonesia dan menangani hambatan-hambatan yang mengancam iklim dan daya saing investasi. Dengan spesialisasi yang semakin meningkat, dunia usaha akan memiliki minat lebih besar terhadap sub sektor prioritas yang ditawarkan. Sub sektor prioritas yang ditawarkan bisa saja berbeda dengan sektor prioritas yang ditawarkan oleh ASEAN
- Menjamin terciptanya koordinasi antara liberalisasi di sektor investasi dan sektor perdagangan yang terdapat dalam FTA guna menyeimbangkan pertumbuhan. Jika liberalisasi perdagangan berjalan lebih cepat dari liberalisasi di sector investasi, maka investor di Indonesia akan berpindah ke Negara tetangga. Isu ini penting dalam menghadapi ASEAN Economic

Community yang akan mengarah menjadi satu pasar (*single market*) pada tahun 2015.

3) Strategi Investasi dalam Bidang Perubahan Iklim Global

Indonesia berada dalam posisi yang diuntungkan dalam isu perubahan iklim global. Keuntungan yang diperoleh Indonesia tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk mengurangi eMisi gas rumah kaca Negara-negara utara, tapi lebih besar dari itu. Potensi sumber daya alam Indonesia penuh dengan produk yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan. Dan pada saat ini terdapat tekanan dan permintaan global yang meningkat agar industri menggunakan produk-produk ramah lingkungan dalam kegiatan produksi mereka³.

Kondisi yang terjadi

- Indonesia perlu melihat potensi yang ada secara lebih luas dan harus memulai membangun kebijakan yang akan menarik investasi dunia usaha dalam isu yang sedang berkembang ini. Keunggulan yang dimiliki Indonesia dapat memberikan manfaat bagi daerah yang memerlukan sumber-sumber pembangunan untuk ekonominya
- Dalam hal ini, strategi investasi Indonesia harus juga menyertakan kebijakan pembangunan kapasitas sumber daya manusia, inovasi, penelitian dan pengembangan sehingga investor swasta dapat melihat Indonesia sebagai tempat dimana teknologi dapat dikembangkan dan diimplementasikan dan memberikan nilai tambah baru dari produk yang dihasilkan. Tanpa dilengkapi kebijakan tersebut, sumber daya alam dan hutan Indonesia hanya akan memberikan potensi investasi saja.

Aksi yang diperlukan

- Menganalisa seluruh peluang investasi yang sedang berkembang untuk produk-produk terbaru dan berkelanjutan (selain pengurangan eMisi gas buang dan pemanfaatan hutan)
- Bekerjasama dengan dunia usaha dalam membangun kerangka peraturan yang dapat menyediakan insentif bagi investasi swasta serta melakukan revisi yang diperlukan pada DNI untuk mengeksplorasi peluang yang baru ini
- Membangun strategi dan rencana aksi yang diperlukan bagi terciptanya lingkungan yang memungkinkan partisipasi lokal secara penuh, seperti petani, UKM dan industri. Untuk ini diperlukan pembangunan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan kebijakan yang mendukung inovasi.

³ Contohnya adalah Toyota yang memakai bahan-bahan alami untuk interior mobil populernya Prius dan Samsung yang menggunakan bahan bio-plastik jagung untuk produk *handphone*-nya.

VIII. INFRASTRUKTUR

Kondisi infrastruktur yang dianggap paling menghambat oleh pelaku bisnis terdapat di jalan, listrik, pelabuhan, air, dan telekomunikasi.

Tidak memadainya infrastuktur disebabkan oleh tiga faktor: kurangnya alokasi anggaran, penggunaan yang tidak optimal atas anggaran yang ada, serta koordinasi yang buruk antara yurisdiksi. Sayangnya, partisipasi swasta juga masih kurang (Kong dan Ramayandi 2008).

Pihak swasta tidak banyak terlibat dalam proyek-proyek infrastuktur karena sektor perbankan domestik juga enggan mengucurkan kredit ke sektor tersebut, implementasi dari kebijakan infrastruktur tidak efektif, serta banyak proyek infrastruktur harus beroperasi di bawah kondisi non-pasar: jasa infrastruktur kebanyakan harus dijual pada harga jauh di bawah biaya pengadaannya (Narjoko dan Jotzo 2007).

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memberi insentif kepada pihak swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur di samping kebijakan lain untuk membantu pendanaan dan untuk memperbaiki manajemen. Misalnya, pada tahun 2006 Menteri Keuangan membentuk Unit Manajemen Risiko untuk mengawasi pelaksanaan mekanisme bagi-risiko proyek-proyek kerjasama pemerintah-swasta. Pemerintah juga memutuskan memberikan dukungan kredit untuk proyek listrik 10,000 megawatt dan untuk proyek tol Trans-Jawa. Untuk memperbaiki proses pembebasan tanah yang seringkali menjadi masalah dalam proyek infrastruktur, pemerintah juga membentuk Unit Investasi.

Pemerintah dan mengalokasikan sekitar Rp 2 triliun tahun 2006, 2007, dan 2008 kepada unit ini untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur. (Dapat dicatat pula di sini, bahwa sebagai respon atas krisis 2008, pemerintah telah melakukan kebijakan stimulasi fiskal. Sebagian dari stimulasi tersebut diarahkan juga untuk perbaikan infrastruktur. Sayangnya sekali realisasi pengeluaran ternyata menjadi sangat lamban).

Pembangunan infrastruktur tentu saja perlu terus dilanjutkan. Dalam jangka pendek dan menengah, selayaknya fokus diberikan kepada listrik dan air. Untuk jalan dan pelabuhan yang menjadi tulang punggung sistem logistik, pembangunan *hard infrastructure* (penambahan ruas dan panjang jalan, dsb) sama pentingnya dengan *soft infrastructure* (misalnya. perbaikan SDM dan pemberantasan pungli di jalan).

IX. PERPAJAKAN

Penerimaan sektor pajak memegang peranan penting terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan nasional, oleh karena itu upaya meningkatkan penerimaan pajak secara “business friendly” merupakan program yang perlu diprioritaskan.

1. Permasalahan

- 1) Kepatuhan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah.
- 2) Walaupun telah diadakan reformasi perpajakan, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar, karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak. Selanjutnya hal ini juga menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3) “Sunset Policy” kurang dimanfaatkan oleh kebanyakan wajib pajak, karena masyarakat wajib pajak masih kurang percaya kepada aparat pajak dan peraturannya terlalu berbelit-belit.

2. Rekomendasi

- 1) Mengeluarkan Undang-undang/Keputusan Presiden tentang “Pengampunan Pajak” yang mudah dimengerti oleh masyarakat, agar masyarakat wajib pajak mau mengungkapkan harta/hutang mereka secara benar, dan selanjutnya memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.
- 2) Menurunkan tarif pajak penghasilan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.
- 3) Fungsi Direktorat Jenderal Pajak dibatasi pada fungsi eksekutif saja, yaitu memungut pajak dan mengawasi kepatuhan wajib pajak.
- 4) Fungsi legislatif, yaitu mengeluarkan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan dan memberikan interpretasi atas peraturan perpajakan dilakukan oleh badan tersendiri dibawah Menteri Keuangan. Dengan demikian peraturan serta interpretasi yang dikeluarkan akan adil dan benar, sebab badan baru ini tidak terbebani kewajiban mengejar target penerimaan seperti yang ada sekarang ini.
- 5) Fungsi yudikatif, yaitu menangani keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dilakukan oleh badan tersendiri dibawah Menteri Keuangan. Dengan demikian penanganan keberatan akan adil dan benar, sebab badan baru ini tidak terbebani kewajiban mengejar target penerimaan seperti yang ada sekarang ini.

X. Membumikan Strategi Pembangunan Berkelanjutan

1. Rasional

Pada era perubahan iklim dan dinamika ekonomi global yang demikian cepat, salah satu opsi wajib sebagai perajut pembangunan ekonomi Indonesia adalah upaya konkrit untuk membumikan strategi pembangunan berkelanjutan. Masyarakat bisnis sebenarnya telah sangat yakin bahwa penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan dan melebihi daya dukung sumberdaya tersebut akan mengakibatkan degradasi sumberdaya dan lingkungan hidup yang tentu mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi itu sendiri.

Diskusi publik yang pernah mengemuka pada tiga dekade sebelumnya, kini seakan memperoleh momentum besar untuk segera mewujudkan, mengoperasionalkan dan membumikannya di dalam praktik bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya, setelah ancaman dampak buruk perubahan iklim telah semakin nyata dan merata pada segenap lapisan masyarakat. Kesadaran kolektif itu kini seharusnya telah merasuk pada segenap pelaku usaha, perumus kebijakan dan pejuang masyarakat madani, bahwa biaya dan risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup tentang dampak perubahan iklim akan jauh lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat ini untuk mengantisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global tersebut.

Strategi pembangunan berkelanjutan pada awal dekade 1970-an memang dianggap sebagai sebuah terobosan baru, tapi kini pada dekade di awal abad milenium, strategi tersebut telah menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan krusial dalam pembangunan ekonomi saat ini. Sesuatu yang sangat mendesak untuk dilaksanakan adalah mentransformasikan debat publik dan gagasan di tingkat konsep menjadi suatu langkah operasional oleh berbagai elemen bangsa atau pelaku, seperti: masyarakat politik (pemerintah, wakil rakyat), masyarakat bisnis (dunia usaha besar, menengah dan kecil), dan masyarakat madani (lembaga masyarakat, dunia akademik dan lain-lain). Falsafah yang dianutnya pun tidak boleh terlalu rumit karena konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri sebenarnya cukup sederhana dan sangat mudah dicerna.

Bermula dari kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi itu ada batasnya dan bahwa perekonomian yang terlalu mengandalkan pada hasil ekstraksi sumberdaya alam, tidak akan bertahan lama. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti apa-apa jika degradasi lingkungan yang ditimbulkannya ikut diperhitungkan dalam penghitungan pendapatan nasional. Lalu para ahli mulai memadukan antara aspek ekologis dan aspek ekonomis dalam perumusan kebijakan nasional. Pada tingkat aplikasi dan pelaksanaan, pemerintah bersama-sama rakyat banyak juga ikut bertanggung jawab, tidak saja terhadap degradasi lingkungan tetapi juga terhadap kebijakan publik yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup itu.

2. Evolusi dan Penyempurnaan Strategi

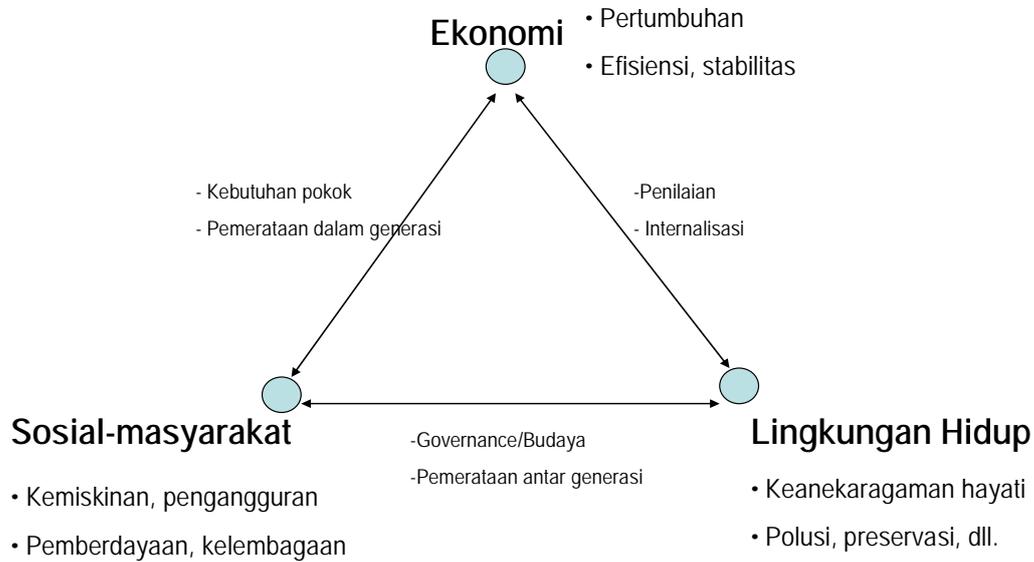
Pada tingkat global, mereka yang peduli terhadap keberlanjutan pembangunan dapat tercapai pada pembentukan koMisi dunia tentang lingkungan hidup dan pembangunan (*World Commission*

on *Environment and Development = WCED*) yang independen dan sangat berpengaruh. Mereka telah berhasil "mengawinkan" antara ekonomi dan ekologi, seperti tertuang dalam dokumen *Our Common Future* dan secara eksplisit menyebutkan strategi pembangunan berkelanjutan. Menurut koMisi itu, pembangunan berkelanjutan adalah "pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri".

Paradigma pembangunan berkelanjutan tidak hanya memperoleh tantangan di tingkat konsep, strategi dan mazhab pemikiran, tapi juga menghadapi kendala serius dalam mobilisasi dan operasionalisasi sumber pendanaan di tingkat lapangan. Kendala mobilisasi dana ini terasa lebih sulit ketika para ahli dan perumus kebijakan menghadapi kesulitan untuk menterjemahkan secara lebih lugas dan jelas tentang paradigma baru pembangunan berkelanjutan yang telah mengakomodasi secara inheren perspektif sosial, untuk melengkapi perspektif atau aspek ekonomi dan lingkungan hidup. Pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Lingkungan Hidup di Johannesburg Afrika Selatan tahun 2002 (atau "Rio +10", untuk menunjukkan penyempurnaan dari KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992), aspek sosial seperti faktor kemiskinan, kelembagaan, inklusivitas, konsultasi, pemberdayaan masyarakat sipil, dan lain-lain telah diyakini mampu menjadi salah satu dimensi penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Penyempurnaan ini telah melengkapi sekian macam dimensi dari aspek ekonomi seperti pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas dan dari aspek lingkungan hidup seperti keanekaragaman hayati, ketangguhan atau kemampuan penyesuaian diri, sumberdaya alam, tingkat polusi, eMisi karbon dan lain-lain. Dalam keterkaitan antara aspek sosial dan aspek ekonomi, perhatian dari paradigma pembangunan berkelanjutan adalah tingkat pemerataan dalam suatu generasi (*intra-generational equity*), kebutuhan dasar dan tingkat penyerapan angkatan kerja dalam perekonomian. Keterkaitan antara aspek sosial dan aspek lingkungan hidup telah lama dikembangkan, yaitu yang mencakup pemerataan antar generasi (*inter-generational equity*), *governance*, transparansi dan akuntabilitas publik, serta dimensi budaya di dalamnya. Sedangkan keterkaitan antara aspek ekonomi dan lingkungan hidup telah mendapat perhatian cukup memadai di tingkat konsep yang menyangkut proses penilaian (*valuation*) dan internasionalisasi dari faktor eksternalitas yang mungkin timbul dalam aktivitas perekonomian (lihat Gambar di bawah).

Pembangunan Berkelanjutan



3. Upaya Kuantifikasi Keberlanjutan

Di tingkat yang lebih operasional, kebijakan pelestarian lingkungan hidup juga menghadapi tantangan, paling tidak dalam melakukan kuantifikasi degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini pun juga berhubungan dengan minimnya data dan informasi pendukung untuk mendepresiasi pertumbuhan ekonomi dengan ekstraksi sumber daya alam, atau keragu-raguan beberapa negara untuk segera merombak sistem penghitungan pendapatan nasionalnya, disamping masalah biaya. World Resources Institute pernah secara kasar melakukan perhitungan NDP Indonesia dengan cara mendepresiasi Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product = GDP*) terhadap penipisan cadangan sumber minyak bumi, sumber daya hutan, dan erosi tanah. Walaupun masih terbilang kasar, dengan metode yang sederhana dan hanya memperhitungkan depresiasi di ketiga sektor ekonomi di atas, lembaga sumberdaya dunia yang makin populer tersebut menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata bukan sekitar 8 persen per tahun seperti sering diberitakan, tetapi hanya sekitar 4 persen per tahun.

Sebenarnya telah cukup banyak upaya estimasi pendapatan bersih sektor pertanian tanaman pangan yang telah didepresiasi karena degradasi lahan dengan menyempurnakan metode yang dikembangkan World Resources Institute dan memperbesar cakupannya disesuaikan dengan data satelit terakhir yang dapat dikumpulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 5 persen pendapatan sektor pertanian telah berkurang hanya karena degradasi lahan saja (Arifin, 2001). Maksudnya, apabila beberapa ukuran tentang depresiasi cadangan dan kualitas sumberdaya alam mencakup lebih banyak lagi jenis sumberdaya alam dan praktik pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, maka produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia pastilah lebih rendah dari ukuran penghitungan konvensional pembangunan ekonomi seperti selama ini. ndapatan konvensional. Ukuran yang sedikit lebih rumit dikenal dengan nama Produktivitas Bruto yang Berkelanjutan (*Gross Sustainable Productivity = GSP*) yang memperhitungkan beberapa indeks

sosial dan tingkat kemakmuran lain, seperti diterapkan di negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat.

Sebenarnya, perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan akhir-akhir ini telah meliputi cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada lingkup sumberdaya alam dan lingkungan hidup saja, tetapi juga pada suatu sistem sosial dan politik sebagaimana diuraikan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perluasan dimensi pembangunan itu sendiri yang jelas tidak hanya mencakup persoalan-persoalan ekonomi semata, tetapi meliputi keterbukaan sistem demokrasi dan politik yang dianut suatu sistem pemerintahan. Beberapa argumen terakhir sering mengambil ibarat dari keruntuhan sistem komunisme di Uni Soviet dan Eropa Timur lainnya tentang ketidakberlanjutan suatu pembangunan. Sikap apatimesme sebagian besar masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat dijadikan sebagai bukti makin minipisnya sumber daya sosial-politik seperti antusiasme, partisipasi masyarakat, legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lain-lain.

Falsafah dasar yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kebijakan ekonomi makro yang *prudent* (hati-hati) sekalipun, jika pola pembangunan masih cenderung ekstraktif terhadap sumberdaya alam, surplus neraca perdagangan hanya akan habis untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup yang terlanjur porak-poranda. Kebijakan transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih baik perlu disertai restrukturisasi industri yang ada menjadi industri yang "ramah lingkungan hidup", ancaman kegagalan ekonomi akan selalu menghantui. Demikian pula, kebijakan peningkatan kualitas hidup seperti pengendalian dampak tekanan penduduk perlu diikuti oleh peningkatan sikap mental yang menghormati asas-asas konservasi lingkungan hidup. Akhirnya, peningkatan keterbukaan kebijakan stabilitas politik perlu diikuti oleh pementapan peran serta masyarakat, sistem kelembagaan serta sumberdaya sosial-politik lainnya, untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih bermakna.

Pada awal abad millennium ini, upaya kuantifikasi keberlanjutan pembangunan ekonomi lebih banyak diarahkan untuk melakukan valuasi ekonomi pada beberapa jenis sumberdaya alam, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung, baik dengan cara pendekatan pasar, maupun non-pasar. Di tingkat akademik, beberapa strategi dan inovasi baru untuk pembangunan berkelanjutan juga telah dikembangkan misalnya yang belakangan dikenal dengan istilah "pasar jasa lingkungan hidup". Di Indonesia dan di beberapa negara berkembang lain di dunia, konsep pasar jasa lingkungan hidup memang masih baru sehingga memerlukan suatu upaya serius untuk mendiseminasi, mengkampanyekan secara sistematis dan berkesinambungan. Berbagai mekanisme kompensasi dari pembeli kepada penjual jasa lingkungan hidup harus terus-menerus dikembangkan, baik dalam bentuk uang *cash*, penghargaan khusus berupa pemberian kepastian usaha kepada para penyedia jasa tersebut, pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik, seperti akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai, atau apa saja yang terbaik sesuai dengan kriteria dan sasaran yang lebih jelas.

Dalam hal ini, perumusan suatu "setting kelembagaan" yang tidak saja mengara kepada mekanisme penyampaian kompensasi atau pendanaan pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga pengembangan manajemen bersama (*co-management*) beberapa *stakeholders* yang terlibat dalam jasa lingkungan hidup. Mekanisme kompensasi tersebut perlu cukup fair dan bermanfaat, atau paling tidak mengikuti prinsip-prinsip "mekanisme pasar" yang lebih beradab, adil, transparan, dan akuntabel, tapi lebih dari itu, yaitu untuk menciptakan suatu tata-kelola yang baik (*good governance*) bagi sistem jasa lingkungan hidup secara umum. Opsi langkah yang dapat

ditempuh ke depan adalah pertama, melanjutkan pembahasan tentang payung hukum dari level undang-undang sampai level peraturan di tingkat lokal untuk merangkum berbagai macam kepentingan yang menginginkan terwujudnya suatu instrumen pasar jasa lingkungan. Kedua, melaksanakan beberapa *actions* di tingkat lapangan untuk memperkuat kapasitas penyedia jasa, penerima jasa dan intermediaries, agar mampu mewujudkan mekanisme kompensasi jasa lingkungan pada beberapa lokasi yang krusial bagi konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan secara umum.

4. Instrumen Ekonomi untuk Keberlanjutan

Instrumen ekonomi untuk membumikan strategi pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui perbaikan kebijakan yang lebih antisipatif dan responsif terhadap strategi pembangunan keberlanjutan. Pada intinya, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk memelopori pengelolaan lingkungan hidup baik melalui pengaturan (regulasi) maupun melalui perumusan instrumen ekonomi dan sistem insentif lainnya. Pengaturan memerlukan peraturan perundang-undangan dan memerlukan insentif ekonomi dalam bentuk pungutan pajak, royalti, subsidi, dan sebagainya. Telah cukup banyak negara-negara yang berhasil merumuskan suatu instrumen fiskal dan kebijakan fiskal telah terbukti efektif dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup hidupnya. Misalnya, tentang harga tiket masuk ke kawasan alam yang dilindungi; pengenaan pajak yang efektif terhadap penebangan hutan; dan pungutan yang tinggi terhadap penggunaan pupuk kimia dan obat pemberantas hama. Pungutan terhadap penggunaan pupuk dan obat-obatan banyak digunakan oleh negara-negara maju, sedangkan beberapa negara sedang berkembang menerapkan pajak atas penebangan hutan, dan pungutan bea masuk ke dalam taman nasional banyak diterapkan hampir di semua negara.

Sistem insentif ekonomi untuk mengelola lingkungan hidup dapat diberikan dalam bentuk insentif fiskal, insentif pendanaan, dan insentif pengembangan pasar jasa lingkungan. Insentif fiskal untuk mengelola lingkungan hidup dapat berupa pengenaan pajak, tetapi dapat pula dalam bentuk pemberian subsidi. Pedoman insentif fiskal di atas akan efektif, jika parameter-parameter tentang *marginal cost* dan *marginal benefit*, serta turunannya dapat dihitung dengan baik. Pajak lingkungan (tepatnya, pajak untuk mengelola lingkungan hidup) dapat dikenakan dalam persentase tertentu, berbentuk retribusi dengan besaran nominal tertentu, ataupun berupa pungutan. Sebaliknya, sistem insentif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dapat pula berupa pengurangan pajak, pembebasan pajak, dan pemberian subsidi. Pembebasan pajak berupa pemotongan jumlah pajak yang harus dibayar, pembayaran secara berkala, atau fasilitas pajak lainnya diberikan karena objek pajak melaksanakan kegiatan ramah lingkungan, antara lain menggunakan energi berteknologi secara efisien, atau pengurangan produk yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Subsidi pajak diberikan antara lain pemotongan pajak (subsidi silang), subsidi pembelian atau pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Singkatnya, kebijakan yang lebih progresif dan kerja lebih keras, agar strategi pembangunan berkelanjutan dapat masuk ke dalam arus utama (*mainstream*) perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka Indonesia perlu membuat suatu reformasi kebijakan fiskal, tidak hanya memperkenalkan jenis pungutan atau pajak baru, tetapi juga mengintensifkan pengenaan pajak dan pungutan yang sudah ada tidak hanya jumlah subyek pajaknya, tetapi juga perbaikan tarif royalty dan pengenalan pajak lingkungan. Ketidak beranian mengenakan pungutan pajak

yang tinggi untuk lingkungan berarti tidak adanya kemampuan Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengaturan, yang sekaligus harus dibayar mahal, karena kualitas sumberdaya dan lingkungan hidup semakin rusak dan beberapa di antaranya sulit untuk dipulihkan kembali. Kondisi ekonomi, politik dan sosial terganggu dan akhirnya kesejahteraan masyarakat umumnya menjadi semakin memburuk.

Selain dengan pendekatan regulasi dan instrumen ekonomi, suatu sistem insentif (dan disinsentif) ekonomi untuk mewujudkan strategi pembangunan berkelanjutan juga dapat ditempuh melalui penyampaian informasi atas dasar kesukarelaan, seperti pemberian Anugerah Adipura dan Kalpataru kepada perorangan dan lembaga. Pada prinsipnya, dunia usaha mendukung upaya membumikan strategi pembangunan berkelanjutan atau pelestarian lingkungan hidup secara umum. Dunia usaha bahkan dapat mengupayakan suatu reformasi peraturan dan sistem insentif misalnya dalam bentuk pembebasan bea masuk untuk mesin-mesin dan peralatan Unit Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang diimpor dari luar negeri. Sebaliknya, dunia usaha yang membebani lingkungan hidup atau terbukti secara obyektif dan terukur mendegradasi melebihi ambang batas yang ditentukan, perlu dikenakan disinsentif berupa cukai atau *punishment* berupa denda secara progresif yang berefek jera.

Proporsi antara insentif dan disinsentif dibuat sedemikian rupa sehingga menstimulasi pelestarian keseimbangan lingkungan (*balanced ecology*) namun tetap tidak *counterproductive* terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu, maka instrumen kebijakan perlu diarahkan pada pengembangan kesadaran, pemahaman, dan komitmen semua pihak (*multistakeholder*) baik dari kalangan pemerintah sendiri, maupun dari luar pemerintah, khususnya sektor swasta. Langkah-langkah ini perlu didukung dengan ditegakkannya *corporate responsibility and accountability* yang diawasi ketat semua aspek masyarakat, baik itu oleh asosiasi-asosiasi perusahaan ataupun masyarakat umum. Pada saat yang bersamaan, ketegasan aparat pemerintah (*willingness to charge*) yang berwenang menjadi keniscayaan sehingga tidak ada lagi anggapan aturan hanya sebatas "macan kertas". Guna membentuk keniscayaan tersebut, maka *good governance* sebagai landasan mutlak, harus tercipta lebih dulu terutama di semua daerah otonom.

5. Pedanaan Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu langkah operasionalisasi strategi pembangunan berkelanjutan adalah merumuskan skema pendanaan bagi pelestarian dan konservasi lingkungan hidup, dengan membangun suatu mekanisme pembiayaan inovatif yang digunakan untuk membiayai pelestarian atau preservasi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, perlindungan cagar alam, membiayai kegiatan-kegiatan yang mendorong penggunaan sumberdaya alam seperti konservasi hutan dan sumberdaya air secara berkelanjutan, dan mendanai organisasi lokal: program pemerintah, aktivitas dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat kegiatan konservasi sumber daya alam. Beberapa opsi yang dapat dikembangkan dalam jangka menengah-panjang adalah:

Pertama, mewujudkan bank lingkungan hidup. Berhubungan setting lembaga perbankan saat ini adalah membantu mengalirkan dana pihak ketiga kepada mereka yang lebih membutuhkannya, maka manajemen perbankan "tradisional" seperti plafon bunga kredit, ketentuan lain memang masih harus dirumuskan secara hati-hati. Praktik bank lingkungan hidup di negara-negara lain yang telah maju masih perlu dipelajari dan ditindaklanjuti secara sekasama, untuk mengambil pelajaran berharga dari berbagai aspek pendirian dan pengelolaan bank lingkungan hidup. Di

sinilah pentingnya sekian macam upaya dalam agenda setting (baca: dukungan politis dan legalitas) yang pasti amat vital untuk merealisasikan format bank lingkungan hidup.

Kedua, modifikasi lembaga keuangan non-bank untuk lingkungan hidup. Pendirian lembaga keuangan lingkungan hidup ini pada awalnya dapat disponsori oleh pemerintah dengan ketentuan badan usaha milik negara (BUMN). Akan tetapi, dalam perkembangannya kelak, lembaga ini dapat diperlakukan sebagaimana perusahaan keuangan atau layaknya lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lainnya di Indonesia. Lembaga keuangan lingkungan hidup ini dapat menjadi alternatif, terutama apabila terdapat program hibah atau kredit murah dari negara donor dan kreditor luar negeri.

Ketiga, dana amanah lingkungan hidup. Dana amanah untuk pengelolaan lingkungan hidup umumnya berskala besar, dikelola secara professional sebagai “aset kepercayaan” untuk mencapai tujuan besar pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan dinamis antara aspek pembangunan, sosial-politik dan lingkungan hidup. Ciri khas dana amanah di mana pun adalah aspek *governance* karena melibatkan suatu badan atau dewan terdiri dari berbagai pihak: pemerintah, swasta, lembaga riset, perguruan tinggi organisasi swadaya dan elemen masyarakat lainnya yang amat peduli untuk mengatur dan mengawasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana amanah untuk pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Keempat, “pasar” jasa lingkungan hidup secara lebih luas sebagaimana diuraikan sebelumnya. Beberapa inisiatif masyarakat di beberapa tempat telah mengarah pada pengembangan “jasa lingkungan hidup tersebut. Pada awalnya, inisiatif itu berupa perumusakan suatu “mekanisme kompensasi” bagi kaum miskin, umumnya petani, yang telah berjasa dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang tinggal di daerah hulu dianggap sebagai “penjual” jasa lingkungan hidup. Sementara itu, masyarakat banyak yang hidup di hilir atau bahkan yang tinggal di belahan bumi lain disebut “pembeli” jasa lingkungan hidup.

BAGIAN C
PETA JALAN SEKTORAL

BAGIAN C

PETA JALAN SEKTORAL

I. PERTANIAN

Karena berbagai sebab, harga pangan mengalami kenaikan yang sangat pesat pada beberapa tahun terakhir ini. Kelangkaan dan kenaikan harga pangan mengancam pemenuhan kebutuhan manusia yang paling dasar. Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO),⁴ 923 juta penduduk dunia mengalami kekurangan pangan pada 2007, meningkat lebih dari 80 juta sejak periode 1990-1992.

Negara produsen pangan dapat memanfaatkan fenomena kenaikan harga bagi peningkatan produksi dan penghasilan petani. Untuk itu, hambatan atau kendala produksi perlu diminimalkan, akses produsen ke pasar perlu dibuka seluas-luasnya. Kenaikan pendapatan yang dinikmati produsen akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara lebih luas terutama di pedesaan.

Sejak lama Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Tersedia tanah vulkanik subur dengan luasan besar, curah hujan cukup dan iklim yang sesuai bagi pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Hingga saat ini, pendapatan sebagian besar penduduk di pedesaan tergantung pada kegiatan pertanian. Memperhatikan kondisi saat ini, produktivitas tanaman pangan masih sangat mungkin ditingkatkan. Hasil produksi per hektar untuk berbagai komoditas tanaman pangan dan perkebunan akan naik apabila penggunaan benih unggul ditingkatkan, penerapan teknik budi daya dimajukan, pemupukan dioptimalkan dan manajemen pengelolaan lebih baik.

1. Kendala Peningkatan Produksi Pangan

Hambatan utama peningkatan produksi pangan adalah kurangnya inovasi dan penyediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, kebijakan makro (kebijakan perdagangan, fiskal dan moneter) pemerintah kurang memberi insentif bagi peningkatan produksi pangan. Pada sisi mikro, kebijakan bersifat sektoral, jangka pendek, kerap tidak konsisten dan tidak fokus.

Dominasi penggunaan teknik budidaya tradisional, penggunaan benih kualitas rendah (karena lebih murah), pemupukan dan pengelolaan tidak tepat, menyebabkan produktivitas rendah. Karena tidak ada insentif perusahaan kurang melakukan kegiatan R&D.

a) Lahan

Ketersediaan lahan untuk pertanian semakin berkurang. Kebutuhan lahan untuk pemukiman, kegiatan industri, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana publik lainnya, semakin bertambah. Kompetisi penggunaan lahan untuk berbagai kebutuhan semakin ketat. Konversi lahan pertanian untuk penggunaan lain sulit dihindari, terutama di wilayah berpenduduk padat seperti di Jawa.

⁴ Food and Agriculture Organization, *The State of Security in the World 2008: High food prices and food security – threats and opportunities*, Rome: 2008.

Pembukaan areal pertanian baru (sawah dan lahan perkebunan) memerlukan biaya besar. Pembiayaan oleh publik (pemerintah) terkendala oleh keterbatasan anggaran. Sumber pendanaan komersial kurang berminat membiayai investasi yang bersifat jangka panjang dan berisiko tinggi. Pembukaan lahan pertanian baru sering kali menghadapi isu lingkungan. Pembebasan lahan sering berbenturan dengan hak ulayat atau adat. Proses perizinan memerlukan waktu lama dan biaya besar.

Terjadi degradasi mutu lahan karena penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Sejak dikenalkan pupuk sintetis yang bersifat praktis dan berefek instan serta berkesan modern, penggunaan pupuk organik/pembenah tanah (kompos kotoran hewan, sisa pertanian maupun mikro organisme tertentu) semakin ditinggalkan. Pemakaian pupuk sintetis menyebabkan kesuburan tanah berkurang, tanah mengalami degradasi mutu secara fisik, kimia, maupun biologi.

Peruntukan lahan tidak konsisten; tidak sinkron antara pusat dengan daerah. Kepala Daerah sering tidak memperhatikan aturan yang ada (Undang Undang No. 24/1992) dan biasanya sektor pertanian tidak menjadi prioritas.

Ketiadaan status kepemilikan lahan mengakibatkan petani tidak dapat menggunakan lahan dalam mencari sumber pendanaan. Pada pertanian padi, skala usaha pada umumnya sangat kecil sehingga kurang ekonomis.

b) Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi banyak yang rusak dan tidak berfungsi, sehingga kehandalan pasokan air irigasi cenderung turun, semakin banyak lahan yang kurang mendapatkan pasokan air. Perluasan jaringan irigasi lambat. Sejak krisis 1998 praktis tidak terjadi perluasan jaringan irigasi. Keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan pembangunan jaringan irigasi belum menjadi prioritas. Beberapa daerah mengalami defisit air, sulit membangun jaringan irigasi. Secara nasional masih terdapat surplus penyediaan air, tetapi di beberapa daerah telah mengalami defisit.

c) Jalan

Prasarana jalan kurang mendukung arus barang / pengangkutan hasil produksi. Beberapa pemerintah daerah mengenakan retribusi atas penggunaan jalan umum untuk angkutan komoditas pangan (CPO).

d) Pelabuhan

Kapasitas pelabuhan ekspor (terutama Dumai dan Belawan) tidak mampu lagi melayani volume ekspor yang terus meningkat. Pendangkalan pelabuhan menghambat aliran keluar-masuk kapal ke pelabuhan dan menyebabkan antrian panjang. Pemasaran CPO dari Indonesia Timur terhambat oleh kurangnya fasilitas pelabuhan yang memadai.

e) Benih

Benih varitas unggul umumnya lebih mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh petani. Karena luasan lahan usaha pada umumnya sangat kecil, petani kurang memiliki insentif untuk menggunakan benih unggul. Kelangkaan sering terjadi terutama pada saat musim tanam. Dukungan pemerintah kepada petani untuk menyediakan benihnya sendiri sangat kurang. R&D

benih tidak intensif dan hanya dilakukan oleh kalangan terbatas untuk kepentingan sendiri. Sementara itu, proses birokrasi panjang untuk mendapatkan sertifikasi benih.

f) Pupuk

Harga pupuk bersubsidi lebih mahal dari yang ditetapkan sehingga tidak terjangkau oleh petani. Sering timbul kelangkaan pupuk, pupuk tersedia jenis dan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Sistem distribusi pupuk bersubsidi tidak berfungsi optimal, sering terjadi kebocoran (pupuk dijual bukan kepada petani yang berhak).

g) Modal kerja dan investasi

Walaupun secara ekonomis bersifat layak, usaha kecil di sektor pertanian sering kesulitan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis sehingga kehilangan kesempatan mendapatkan fasilitas kredit perbankan. **Petani kehilangan akses pembiayaan dari sektor perbankan** karena tidak memiliki bukti legalitas usaha. Kredit program tidak dapat diserap secara optimal oleh petani.

Perbankan cenderung menghindari pembiayaan jangka panjang yang berisiko tinggi. Sektor pertanian biasanya bersifat jangka panjang. Investasi di sektor ini menghadapi risiko tinggi, misalnya kegagalan panen karena perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas. Perbankan komersial umumnya kurang berminat menyalurkan dana ke sektor pertanian.

2. Roadmap 2009 - 2015

a) Target Produksi

- Pembangunan pertanian ditargetkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui percepatan pencapaian swasembada, peningkatan tingkat kecukupan pangan dan daya saing komoditas pangan Indonesia di pasar domestik dan ekspor.
- Meningkatkan surplus produksi pangan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai pemasok pangan dunia (feed the world).
- Meningkatkan peran pertanian dalam menciptakan nilai tambah, penyerapan lapangan kerja dan penerimaan devisa.

b) Kondisi Pemungkin

Target pertumbuhan produksi pertanian akan tercapai jika sasaran perluasan areal panen dan / luas perkebunan dan peningkatan produktivitas pertanian dapat dicapai. Infrastruktur pendukung pemasaran hasil produksi tersedia secara memadai. Berbagai pungutan dan biaya-biaya yang menimbulkan biaya tinggi harus dihapuskan. Secara umum kondisi pemungkin berhubungan lahan, infrastruktur pendukung (jaringan irigasi, jalan dan pelabuhan), pasokan input (benih, pupuk, alsintan), dan pendanaan.

c) Kebutuhan lahan

Pertumbuhan sektor pertanian dicapai dengan perluasan lahan dan peningkatan produktivitas. Untuk tanaman semusim, sampai dengan 2014 target pertumbuhan dapat dicapai dengan meningkatkan indeks pertanaman dan hasil per hektar. Pada sektor perkebunan dan perikanan budidaya diperlukan perluasan lahan perkebunan sebesar 1.4 juta ha.

3. Matriks Usulan Kebijakan

	Kondisi Pemungkin	Usulan	
		Kebijakan	Rencana Aksi
Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia lahan cukup bagi pencetakan lahan sawah baru, perluasan dan pembukaan areal perkebunan baru. Kepastian dan konsistensi peruntukan lahan jangka panjang (peruntukan tidak berubah-ubah, konsisten antar instansi dan antara pusat dan daerah). Tersedia kemudahan proses pemanfaatan lahan untuk keperluan pengembangan kawasan pertanian secara komersial. Kepastian dan jaminan atas kepemilikan tanah. 	<ol style="list-style-type: none"> Menghambat konversi lahan sawah untuk kegiatan non-pertanian. Penyelarasan RTRW-P dengan Tata Ruang Nasional. Mempermudah prosedur pembebasan lahan untuk perkebunan. Perlindungan atas HGU perkebunan yang sudah diberikan. 	<ol style="list-style-type: none"> Moderasi penyelesaian konflik dengan hak adat dan ulayat. Mencabut Permeneg Agraria/ka BPN No. 2/1999 dan No. 2/2002. Penyelesaian masalah tumpang tindih peruntukan lahan, RTRW propinsi. Mengurangi jumlah izin yang harus dipenuhi untuk memperoleh HGU. Sertifikasi lahan/kebun sawit rakyat melalui PRONA dan didanai dari APBN.
Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi jalan (jalan kebun, jalan koleksi dan jalan ke pelabuhan ekspor) menjamin kelancaran pemasaran hasil produksi secara efisien. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian insentif bagi pembangunan jalan kebun dan jalan koleksi oleh swasta. Alokasi dana stimulus bagi pembangunan jalan di sentra produksi pertanian / perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> Insentif fiskal bagi pembangunan jalan oleh swasta. Menghapus larangan penggunaan jalan untuk angkutan komoditas pertanian Menghapus pengenaan retribusi khusus atas penggunaan jalan untuk pengangkutan komoditas pertanian. Alokasi sebagian dana PE untuk perbaikan fasilitas jalan di daerah penghasil.
Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Kelancaran arus barang di pelabuhan ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> Memperpendek antrian CPO ekspor di pelabuhan Dumai dan belawan. Penyediaan pelabuhan ekspor baru sehingga komoditas pertanian dapat diekspor langsung dari Indonesia bagian timur. 	<ol style="list-style-type: none"> Mempercepat perluasan dan peningkatan kapasitas pelabuhan ekspor pertanian (Dumai dan Belawan). Membangun pelabuhan ekspor baru di Indonesia Bagian Timur. Consolidated container dan refrigerated container. Menghindari pemeriksaan ganda oleh bea cukai (di pelabuhan asal dan pelabuhan transit).
Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan irigasi mendukung peningkatan indeks pertanaman dan perluasan areal sawah. 	<ol style="list-style-type: none"> Revitalisasi saluran irigasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan jaringan irigasi, seluruh jaringan irigasi yang ada dapat berfungsi optimal pada 2014. Membangun jaringan irigasi baru untuk mendukung perluasan areal sawah di daerah transmigrasi.

	Kondisi Pemungkin	Usulan	
		Kebijakan	Rencana Aksi
Benih	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan benih unggul berkualitas lebih luas. Benih unggul tersedia pada harga terjangkau. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan dukungan bagi R&D untuk perbaikan bahan tanam dan peningkatan produktivitas tanaman. Pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas baru yang sesuai dengan tuntutan konsumen. Penyediaan insentif bagi penggunaan benih unggul berkualitas. 	<ol style="list-style-type: none"> Insentif pajak bagi kegiatan penelitian di bidang benih oleh swasta. Pembangunan Plasma Nulfah Kelapa Sawit, padi, jagung, kedele, dll. Sertifikasi benih untuk menghindari benih palsu. Subsidi benih bagi petani kecil. Pembebasan PPN atas benih. Waralaba benih berbantuan. Proses sertifikasi benih dipermudah.
Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan pupuk secara tepat dan optimal. Pupuk tersedia pada saat diperlukan dengan jumlah cukup dan harga terjangkau. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pengadaan pupuk yang menjamin petani memperoleh pupuk yang menjadi jatahnya. Insentif bagi penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik. Insentif penggunaan pupuk dari pengolahan limbah pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> Subsidi pupuk bagi petani kecil termasuk petani perkebunan (kelapa sawit, jagung dan kedelei). Perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi. [gimana caranya?] Tindakan tegas atas ekspor pupuk bersubsidi. Subsidi bagi penggunaan pupuk organik.
Alsintan	<ul style="list-style-type: none"> Alat dan mesin pertanian tersedia pada harga yang terjangkau yang memungkinkan . 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan dukungan bagi pengadaan alsintan. 	<ol style="list-style-type: none"> Penghapusan pajak dan bea masuk alsintan (traktor). Skema pendanaan khusus untuk pembelian alsintan (traktor).
Industri pengolahan hasil	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi industri pengolahan hasil untuk menjamin penghasilan wajar bagi petani, mengurangi kehilangan hasil selama pengolahan pasca panen. 	<ol style="list-style-type: none"> Revitalisasi industri pengolahan hasil pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan pendanaan bagi peremajaan mesin dan peralatan pabrik gula pengolah tebu petani. penggilingan padi. Membangun sistem agribisnis beras. Membangun industri pengolahan hasil pertanian yang lebih terintegrasi.
Modal	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian. Peningkatan akses petani terhadap sumber pembiayaan formal (perbankan, micro finance). 	<ol style="list-style-type: none"> Kemudahan proses penyaluran kredit khusus bagi petani. Skema kredit khusus bagi investasi pertanian jangka panjang. Dana dari komoditas untuk komoditas (UU No. 18/2004 tentang Perkebunan) . Subsidi bunga pemerintah model revitalisasi perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> Membentuk bank khusus pertanian. Subsidi bunga yang memungkinkan investasi oleh petani. Bunga kredit yang diberikan kepada petani pekebun sebesar 10%. Selisih bunga menjadi beban pemerintah. Subsidi bunga diberikan sampai tanaman menghasilkan (maksimum 5 tahun untuk kelapa sawit dan kakao, serta 7 tahun untuk karet).

	Kondisi Pemungkin	Usulan	
		Kebijakan	Rencana Aksi
Teknik budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan GAP sesuai ketentuan yang berlaku. 	22. Insentif bagi R&D untuk perbaikan teknik budi daya. 23. Penyebaran hasil inovasi kepada petani. 24. Insentif bagi penerapan teknik budi daya maju.	36. Sertifikasi produk bagi penerapan GAP, berlaku secara internasional. 37. Kredit khusus untuk penerapan teknik budi daya maju.
Insentif	<ul style="list-style-type: none"> Insentif cukup bagi petani dan pengusaha untuk meningkatkan produksi dan melakukan investasi di sektor pertanian. Perlindungan memadai bagi produk pertanian domestik dari persaingan tidak adil dengan komoditas pertanian impor. Kebijakan perdagangan produk pertanian dengan mempertimbangkan level of playing field yang setara antara produk pertanian impor dan lokal. 	25. Menjaga nilai tukar petani. 26. Pajak ekspor dikembalikan kepada petani dalam bentuk subsidi dll. 27. Penyesuaian tingkat tarif impor produk pertanian.	38. Operasi pasar untuk menjaga harga komoditas pertanian tertentu (beras, gula dll) tidak mengalami fluktuasi tajam. 39. Jaminan pasokan dan daya saing feedstock dalam negeri (eg. jagung untuk pakan ternak).
Pemasaran hasil	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan pasar domestik dan ekspor. 	28. Menetapkan pajak ekspor pada tingkat yang tidak mengurangi daya saing produk di pasar ekspor. 29. Pemenuhan kebutuhan domestik melalui DMO.	40. Pajak ekspor tidak dikenakan secara progresif. 41. Sebagian Pajak Ekspor hasil pertanian dikembalikan untuk membangun citra positif produk pertanian Indonesia di luar negeri. 42. Memperkuat supply-chain product pertanian melalui percepatan pembangunan industri hilir. 43. Penggunaan dana PE untuk stabilisasi harga domestik. 44. PE dikembalikan ke Industri untuk kepentingan Riset, Promosi pasar.
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Iklim investasi lebih kondusif 	30. Membangun persepsi yang sama atas kebijakan pemerintah pusat untuk menghindari salah penafsiran atas kebijakan pemerintah pusat.	45. Merevisi kebijakan pemda yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Pusat (eg. di Kalbar: kewajiban pemberian secara gratis 30% kebun kepada plasma) 46. Menghapus semua kebijakan pemda (termasuk penetapan retribusi khusus) yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat.
Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> Stabilitas pasokan pangan di dalam negeri. 		47. Subsidi bunga untuk program stabilisasi harga oleh Bulog.

II. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Keadaan Dewasa Ini

Sumber daya minyak dan gas tahun 2008 menyumbang pendapatan negara sebesar Rp 304 triliun namun dengan produksi minyak yang cenderung turun dan konsumsi dalam negeri (400.000 barel perhari) meningkat sehingga angka pendapatan tersebut cenderung menurun pula. Saat ini potensi gas bumi masih cukup besar (total potensi 695 TCF untuk gas bumi) untuk menggeser dan menggantikan era minyak bumi yang sekarang ini dominan didukung ladang minyak tua (90% dari kontrak sebelum tahun 1990) dan dalam posisi rasio *replacement* negatif, dalam memenuhi kebutuhan nasional akan energi final.

Situasi industri migas baik yang telah maupun sedang berjalan saat ini dapat digambarkan dengan melihatnya melalui dua kondisi yang saling berkaitan, yaitu:

- a) Kondisi global secara umum ditunjukkan oleh faktor-faktor harga yang menurun, meningkatnya biaya operasional, kompetisi yang semakin ketat, dan akses terhadap sumber migas yang semakin terbatas yang mengubah industri migas dari *sufficient business* menjadi *marginal business*.
- b) Kondisi nasional ditunjukkan oleh produksi nasional yang sebagian besar didominasi oleh ladang sumur tua (*mature fields*) sebesar 88% dari total produksi (960.000 barel perhari), lebih jauh 90% dari produksi tersebut berasal dari kontrak yang ditandatangani sebelum tahun 1990. Rasio *replacement oil* mengalami tren yang negatif dan situasi kemandirian industri migas nasional yang belum dirasakan optimalisasinya khususnya oleh para pelaku bisnis migas dalam negeri dan industri yang terkait lainnya.

Sementara itu, mineral sebagai bahan baku industri masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data tahun 2008, 77% produksi konsentrat tembaga diekspor, biji Nikel 79%, biji besi 100% dan bauksit 100%. Batubara 72% dari total produksi 230 juta ton.

Ironisnya, Indonesia mengimpor produk olahan mineral dengan nilai tinggi untuk bahan baku industri logam. Per 2008 tercatat impor besi dan baja sebesar Rp 82 triliun, aluminium 12 triliun dan tembaga 10 triliun. Berdasarkan kondisi tersebut terdapat peluang melakukan terobosan melalui reorientasi kebijakan ekspor bahan mentah untuk memaksimalkan nilai tambah sumberdaya mineral dan tambang dengan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi.

Tingkat investasi di sektor pertambangan sejak tahun 2002 mengalami kecenderungan peningkatan, setelah sebelumnya mengalami penurunan ketika terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Kecenderungan meningkatnya tingkat investasi ini dipengaruhi sebagian besar oleh booming harga-harga mineral dan batubara dipasaran global beberapa tahun terakhir. Tembaga mencapai harga tertinggi US\$ 8960 per ton pada Juni 2008, Nikel mencapai titik tertinggi pada harga US\$ 53.760 per ton pada Maret 2007, Timah US\$ 25.500 per ton pada Mei 2008, Aluminium pada harga US\$ 3360 per ton pada Juni 2008 dan Emas US\$1000 per oz pada Januari 2008.

2. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang dihadapi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rasio *replacement oil* yang negatif sementara ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak yang tetap tinggi.
- 2) Lemahnya kompetensi, pengawasan dan rasa ketidakjelasan system birokrasi di pemerintahan menyebabkan rasa kurang aman bagi investor.
- 3) Kurangnya kewaspadaan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan global maupun nasional dunia migas merupakan salah satu penghambat untuk terelaisasinya kemandirian pengelolaan migas dalam negeri.
- 4) Kebijakan pemerintah yang seringkali tumpang tindih mengancam pemanfaatan peluang yang tersedia.
- 5) Subsidi pemerintah terhadap harga jual BBM didalam negeri membuat harga keekonomian tidak logis dan menjadi beban negara akibat faktor politis yang menjadi dasar pertimbangan penentuan harga.
- 6) Kelayakan rencana proyek-proyek eksplorasi dan proyek pengembangan.
- 7) Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap asumsi-asumsi perhitungan untuk rencana penutupan tambang dan program rehabilitasi lahan bekas penambangan.
- 8) Perubahan *term of condition* dalam perjanjian hutang yang memerlukan untuk dilakukannya restrukturisasi pinjaman.

3. Target

3.1. Industri Migas

- 1) Meningkatkan produksi minyak sebesar hingga sekitar 5 persen pada tahun 2014 atau mempertahankan produksi minyak sebesar 1 juta BOPD dalam lima tahun mendatang yang berarti meningkatkan produksi minyak nasional dengan rata-rata 8 persen sampai 13 persen pertahun. Perhitungan ini dengan mempertimbangkan national declining 8 persen.
- 2) Meningkatkan produksi gas sebesar 5%
- 3) Mengubah rasio replacement oil dari negatif menjadi positif
- 4) Mendorong peningkatan pemanfaatan gas untuk pasar domestik
- 5) Meningkatkan produksi panas bumi sebesar 35% - 50% dari 1117Mwe menjadi 4733 Mwe dan mengembangkan energi alternatif lainnya.
- 6) Meningkatkan kemandirian bangsa di bidang migas secara bertahap.
- 7) Pembenahan dan efisiensi system birokrasi pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan bisnis migas.

3.2. Industri Pertambangan

- 1) Peningkatan iklim investasi yang kondusif disektor pertambangan dengan memberikan kepastian dalam berusaha.
- 2) Terpenuhinya pasokan batubara dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi pembangkit
- 3) Berkembangnya industri hilir di sector pertambangan untuk mendukung peningkatan nilai tambah mineral.

4. Rekomendasi

4.1. Sektor migas

- 1) Optimalisasi eksplorasi dan produksi minyak dan gas, baik yang selama ini telah dan masih beroperasi maupun yang potensial untuk dikembangkan.
- 2) Kebijakan pemerintah dan implementasinya yang menjamin investasi seperti *clarity, consistency, certainty* dan *competitiveness* dari pemerintah terhadap para investor, dan yang mendukung kemandirian bangsa seperti mendirikan BUMN yang spesifik untuk LNG yang terpisah dari Pertamina yang membawahi semua LNG yang beroperasi di Indonesia maupun kebijakan penunjukan perusahaan migas asing yang dapat menjamin *transfer of knowledge* dan *transfer of technology*
- 3) Perbaikan struktur, performa dan koordinasi dalam sistem tata kelola birokrasi.
- 4) Edukasi dalam pemahaman *the nature oil and gas business*

4.2. Sektor tambang

- 1) Peningkatan nilai tambah ekonomi, seperti menyusun program pengolahan dan pemurnian mineral kedalam Kebijakan Industri Nasional
- 2) Peningkatan investasi disektor pertambangan, seperti mempercepat penyelesaian RPP untuk UU Minerba No 4. tahun 2009 dan percepatan/penyederhanaan administrasi dan perijinan usaha.
- 3) Memenuhi pasokan batubara dan produk olahan mineral dalam negeri, seperti mempercepat peraturan pelaksana atau petunjuk teknis untuk implementasi DMO batubara bagi kebutuhan domestik
- 4) Sinkronisasi dengan lingkungan strategis pertambangan, seperti koordinasi dengan Ditjen PU dan BKPRN
- 5) Peningkatan kesejahteraan rakyat disekitar tambang, seperti pelaksanaan *community development* yang tepat dengan membentuk forum komunikasi antar perusahaan, pemda dan masyarakat.
- 6) Pengawasan pengelolaan pertambangan di daerah, seperti mempertegas mekanisme pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan administrasi pertambangan didaerah dan pelibatan wakil Dept. ESDM untuk pengalokasian dan pengelolaan wilayah usaha pertambangan didaerah serta mengkaji kembali perda-perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.

III. INDUSTRI MANUFAKTUR

Sejak 2005 sektor industri manufaktur tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Pada 2008, sektor industri manufaktur tumbuh 2.4 poin lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Skenario optimis proyeksi pertumbuhan sektor industri manufaktur mengindikasikan bahwa sampai 2014, pertumbuhan industri manufaktur masih akan lebih rendah dari pertumbuhan PDB.

1. Kendala Pembangunan Industri

Pertumbuhan sektor industri manufaktur terhambat oleh berbagai persoalan yang sudah lama ada tetapi hingga kini belum juga terselesaikan. Persoalan – persoalan tersebut pada umumnya bersifat generik, berpengaruh terhadap efisiensi dan daya saing seluruh sektor dalam perekonomian. Karena industri manufaktur merupakan traded sector, penurunan daya saing sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Industri manufaktur menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal sehingga tidak dapat tumbuh secara optimal.

2. 1. Kendala internal

- (1) Struktur industri sangat rapuh. Keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir sangat lemah. Demikian pula antara industri kecil, menengah, dan besar.
- (2) Industri dasar belum berkembang. Ketergantungan pada bahan baku impor cukup tinggi karena industri dasar pemasok bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen belum berkembang.
- (3) Industri berteknologi tinggi belum berkembang. Industri yang ada umumnya berteknologi rendah dan menengah. Jumlah industri berteknologi tinggi masih sangat sedikit.
- (4) Kapasitas produksi belum optimal. Beberapa industri mengalami kelebihan kapasitas produksi, beberapa lainnya berkapasitas terlalu kecil. Keadaan ini menyebabkan industri tidak dapat memproduksi pada skala ekonomis.
- (5) Ketergantungan pada pesanan di negara tujuan ekspor. Beberapa industri (industri alas kaki, misalnya) sangat tergantung pada pesanan di negara tujuan ekspor.

2. 2. Kendala eksternal

- (1) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, fisik dan nonfisik kurang memadai

Energi

Pasokan energi (BBM, listrik, dan gas) dimonopoli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kebijakan tidak selalu sejalan dengan kebijakan energi nasional. Kebijakan ekspor energi kurang mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri. Contoh: gas diekspor sementara kebutuhan bahan baku industri petrokimia, keramik, dan lain-lain belum terpenuhi.

Konversi energi tidak disertai insentif dan tidak didukung oleh standar dan pedoman jelas.

Perbedaan persepsi antar satu sektor dengan lainnya. Karena dianggap berbahaya bagi lingkungan, penggunaan batubara sebagai sumber energi memerlukan proses perizinan yang sulit.

Jalan

Kelancaran arus barang dari pusat produksi menuju pelabuhan sering mengalami hambatan.

Pelabuhan

Kapasitas pelabuhan semakin tidak dapat mendukung kelancaran arus barang.

Birokrasi

Kualitas dan penataan birokrasi masih perlu ditingkatkan. Kelambatan arus barang di pelabuhan sebagian disebabkan karena kinerja birokrasi belum optimal.

1) Aturan ketenagakerjaan tidak mendukung perkembangan industri

Kewajiban membayar pesangon mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perkembangan permintaan hasil produksi

Kewajiban membayar upah lebur lebih tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan produktifitas pekerja.

2) Kepastian hukum, Contoh: inkonsistensi kebijakan dan penegakkan hukum di bidang kehutanan dan manajemen pengelolaan hutan menyebabkan industri pulp kesulitan pemanfaatan bahan baku kayu.

3) Suku bunga perbankan tinggi; penyaluran kredit ke sektor industri seret.

Sistem/skema pembiayaan investasi industri manufaktur

Kredit perbankan yang berjangka pendek dan suku bunga yang masih tinggi belum kondusif untuk mendorong investasi industri manufaktur. Perlu membangun sistem pembiayaan. investasi yang berjangka menengah dan panjang, misalnya dengan membentuk bank pembangunan dan lembaga pendanaan lain sebagaimana diusulkan pada tajuk bahasan "Pemberdayaan Daerah dan tojauk bahasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. 3. Tantangan pemasaran

(1) Penguasaan pasar domestik. Penyediaan infrastruktur yang belum memadai menyebabkan wilayah nasional secara ekonomis kurang terintegrasi.

(2) Persaingan tidak dengan barang impor illegal.

(3) Hambatan non tarif dengan memanfaatkan isu lingkungan.

(4) Pasar ekspor terhambat oleh pertumbuhan rendah dinegara maju (karena krisis global), instabilitas harga energi dan pangan, pasar modal global yang masih terkena dampak krisis.

3. ROADMAP 2010-2014

3.1. Misi

Mewujudkan Tiga Misi Utama Industri Nasional yaitu (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen selama 2010-2014; (2) meningkatkan daya saing dan memperdalam struktur industri nasional; dan (3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Ketiga tujuan tersebut dapat dicapai melalui penerapan kebijakan strategis berupa: (1) Restrukturisasi industri nasional (peremajaan mesin dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas); (2) Reorientasi kebijakan ekspor bahan mentah; dan (3) Integrasi pasar domestik untuk memperkuat basis industri nasional.

Fokus pada sepuluh klaster Industri unggulan yaitu :

a. Empat klaster unggulan pendorong pertumbuhan

Industri Makanan dan Minuman
Industri Tekstil dan Produk Tekstil dan Alas Kaki
Industri Elektronika dan Komponen Elektronika
Industri Alat Angkut dan dan Komponen Otomotif

b. Tiga klaster unggulan pendalaman struktur industri

Industri alat telekomunikasi dan informatika (industri ICT).
Industri Logam Dasar dan Mesin
Industri petrokimia

c. Tiga klaster unggulan penerimaan devisa

Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
Industri Pengolahan Hasil Laut & Kemaritiman
Industri Berbasis Tradisi dan Budaya

3.2. Target dan sasaran

Sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh rata-rata 6,12 persen selama 2010-2014.

Daya saing industri di pasar domestik dan ekspor meningkat sehingga neraca perdagangan produk hasil industri meningkat. Ekspor hasil industri meningkat rata-rata 15 persen per tahun selama 2010-2014. Neraca perdagangan produk industri ditargetkan akan meningkat menjadi US\$12.8 miliar pada 2009 dan akan terus meningkat menjadi US\$67.5 miliar pada 2015.

Di pasar dalam negeri, produk lokal diharapkan dapat memasok 88 persen permintaan domestik pada 2015. Untuk elektronika konsumsi, peran produk lokal ditargetkan sebesar 75 persen.

Pendalaman struktur industri sehingga pada 2014, persentase impor bahan baku industri ditargetkan turun dari 51 persen pada 2008 menjadi 35 persen pada 2014.

3.3. Usulan program dan rencana aksi

1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik

- Meningkatkan kapasitas pelabuhan ekspor (eg. Dumai dan Belawan) untuk mengurangi demurrage arus ekspor barang;
- Menurunkan Terminal Handling Charge sehingga lebih competitive;
- Memperbanyak jalur keluar – masuk barang di pelabuhan;
- Menghapus pemeriksaan ganda oleh Bea Cukai (di pelabuhan ekspor dan pelabuhan transit);
- Penyederhanaan proses memperoleh visa dan izin kerja bagi tenaga asing;
- Penyediaan fasilitas *consolidated container* dan *refrigerated container* di gudang pelabuhan dan angkutan dengan Kereta Api;
- Membuka kembali akses transportasi ke pelabuhan dengan kereta api;

2) Meningkatkan ketersediaan energi

- Menghapus tariff mesin pembangkit untuk penggunaan sendiri,
- Insentif pajak bagi penggunaan sumber energi alternatif, selain BBM;

3) Mengamankan pasokan bahan baku bagi industri

- Untuk menjamin pasokan bahan baku kayu bagi industri primer pengolahan kayu hutan diperlukan:
 - a) Tindakan tegas atas penyelundupan bahan baku kayu;
 - b) Perlindungan atas hak pengelolaan HTI yg diberikan;
 - c) Aturan perundangan jelas, tidak menimbulkan multiinterpretasi yang menghambat pelaksanaan operasional industri.
- Menurunkan tarif bahan baku yg tidak diproduksi di dalam negeri.
- Insentif bagi pengembangan vertical business process “material → process → assembly → delivery” di dalam negeri.

4) Pembiayaan investasi dan modal kerja

- Mendorong penyaluran dana perbankan ke sektor riil dengan tingkat bunga lebih competitive.
- Pemberian fasilitas penjaminan ekspor

5) Harmonisasi tarif

6) Pengamanan pasar domestik

- Perlindungan pasar domestik dari penetrasi produk impor ilegal melalui pengawasan lebih ketat atas impor ilegal dan razia produk selundupan ;
- Memanfaatkan skema WTO untuk perlindungan non-tarif atas produk domestik;

7) Mendorong kegiatan R&D oleh pemerintah dan swasta

- Insentif pajak bagi kegiatan penelitian oleh swasta;

8) Ketenagakerjaan

- Penyempurnaan UU No. 13/2001, berkaitan aturan upah lembur dan kewajiban pemberian pesangon;
- Penetapan UMK/UMR sesuai dengan perkembangan industri
- Pengembangan SDM untuk akselerasi usaha dalam skala besar;
- Insentif pajak bagi upaya alih teknologi.

4. Usulan Program Dan Rencana Aksi

	Kondisi Pemungkin	Usulan	
		Kebijakan	Rencana Aksi
Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran arus barang di pelabuhan ekspor; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kinerja aparat pelabuhan dan kepabeanaan untuk mempercepat handling di pelabuhan; 2. Menambah / memperluas sarana fisik pelabuhan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbanyak jalur keluar – masuk barang di pelabuhan; 2. Perluasan kapasitas pelabuhan ekspor; 3. Pembangunan pelabuhan baru di Indonesia Timur; 4. Penyediaan fasilitas pendingin di gudang pelabuhan; 5. Peningkatan akses transportasi ke pelabuhan dengan kereta api
Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan (jalan kebun, jalan koleksi dan jalan ke pelabuhan ekspor) menjamin kelancaran pemasaran hasil produksi secara efisien; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perbaikan jalur transportasi darat 4. Pengadaan alat transportasi untuk kemudahan industri seperti kereta api dan container 	<ol style="list-style-type: none"> 6. perbaikan jalan dari pusat produksi ke pelabuhan ekspor; 7. sistem perizinan satu atap; 8. penyediaan sarana angkutan darat KA dengan fasilitas gerbong berpendingin;
Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif listrik kompetitif • Kepastian pasokan gas • Orientasi pemenuhan energi dalam negeri selain dari penyediaan listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Harga energi harus pada harga keekonomian dengan biaya produksi energi yang efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Kontrak gas LNG sebagai sumber energi disesuaikan dengan cadangan gas bumi yang tersedia 10. Pembelian gas menggunakan mata uang rupiah
Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Undang ketenagakerjaan yang berimbang antara kepentingan industri dan tenaga kerja • Perlindungan dan jaminan buruh • Pengembangan SDM yang terampil 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kebijakan upah minimum, status karyawan, lembur dan pesangon harus <i>friendly business policy</i> 7. Perlindungan dan jaminan buruh oleh pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Penyempurnaan UU No. 13/2001 12. Penetapan UMK/UMR yang tidak dis-insentif terhadap kepentingan industri 13. Pengembangan SDM untuk

	Kondisi Pemungkin	Usulan	
		Kebijakan	Rencana Aksi
			<p>akselerasi usaha dalam skala besar</p> <p>14. Perbaiki hubungan bipartit</p>
Modal	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor industri 	<p>8. Kebijakan suku bunga pinjaman yang memudahkan permodalan industri</p> <p>9. Penyaluran kredit perbankan berorientasi pada pengembangan sektor industri</p>	<p>15. <i>Interest rate</i> yang kompetitif</p> <p>16. Aturan peminjaman yang mudah dan efektif</p> <p>17. Peningkatan akses kredit perbankan</p> <p>18. Terdapat fasilitas penjaminan ekspor</p> <p>19. e. Penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri</p>
Teknologi dan R&D	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan teknologi pengolahan yang mutakhir dan efisien Pengembangan teknologi dan produk yang inovatif 	<p>10. Sinergisitas antara Pusat R & D dengan pelaku industri</p> <p>11. Inovasi teknologi berbasis dalam negeri</p> <p>12. Pembiayaan R&D</p>	<p>20. Subsidi untuk R & D</p> <p>21. Pengadaan mesin yang mutakhir dan tepat guna</p> <p>22. Pengembangan kemampuan alih teknologi</p>
Bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan bahan baku industri berbasis dalam negeri yang kompetitif; 	<p>13. Pengembangan potensi sumber daya alam yang berpotensi sebagai bahan baku</p>	<p>23. Pembiayaan Pengembangan sumber daya alam yang berpotensi sebagai bahan baku</p> <p>24. Peminimalan penyelundupan bahan baku impor</p> <p>25. Peningkatan kandungan lokal bahan baku /komponen yang dibutuhkan</p> <p>26. d. Pengembangan supporting industri;</p>
Pasar domestik	<ul style="list-style-type: none"> Pasar domestik yang kuat 	<p>14. Kebijakan perdagangan berorientasi sektor riil</p> <p>15. Perlindungan pasar domestik dari <i>black market</i></p>	<p>27. Peminimalan peredaran barang impor ilegal yang merusak persaingan produk lokal</p> <p>28. Perdagangan yang pro produk buatan dalam negeri</p> <p>29. Penetapan <i>level of playing field</i> agar IKM bisa tumbuh</p>
Standardisasi Produk	<ul style="list-style-type: none"> Mutu produk yang terstandarisasi dan berdaya saing 	<p>16. <i>law enforcement</i> terhadap pelanggaran SNI yang mengikat</p>	<p>30. Pengawasan terhadap impor ilegal</p>

	Kondisi Pemungkin	Usulan	
		Kebijakan	Rencana Aksi
			31. Penggiatan operasi pasar
Insentif		17. Harmonisasi tarif antara industri hulu dan hilir 18. penetapan harga	32. Penindakan pungutan liar 33. Pajak yang pro industri 34. Penghapusan PPN BM bahan baku 35. Subsidi pajak dan bea masuk
Pemasaran dan promosi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pasar dan promosi melalui kerja sama internasional 	19. Perluasan <i>market networking</i> 20. Pengoptimalan <i>marketing agent</i>	36. Pengoptimalan pemanfaatan CEPT-AFTA 37. Pengoptimalan Aterperindag dan ITCP
Pemasaran hasil	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan pasar domestik dan ekspor; 	21. Menetapkan pajak ekspor pada tingkat yang tidak mengurangi daya saing produk di pasar ekspor; 22. Pemenuhan kebutuhan domestik melalui DMO;	38. Pajak ekspor tidak dikenakan secara progresif; 39. Sebagian Pajak Ekspor hasil pertanian dikembalikan untuk membangun citra positif produk pertanian Indonesia di luar negeri. 40. Memperkuat supply-chain product pertanian melalui percepatan pembangunan industri hilir; 41. Penggunaan dana PE untuk stabilisasi harga domestik; 42. PE dikembalikan ke Industri untuk kepentingan Riset, Promosi pasar;
Modal	<ul style="list-style-type: none"> Iklim investasi lebih kondusif 	23. Penciptaan regulasi investasi yang mendukung pengembangan industri 24. Pembiayaan sektor industri yang potensial	43. Penyediaan fasilitas dan insentif untuk mendorong investasi 44. Pendanaan UKM
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> 	25. Koordinasi nasional yang harmonis 26. Pembuatan kebijakan yang mendukung industrialisasi 27. Perundangan yang mendorong peningkatan nilai tambah industri dalam negeri	45. Sinkronisasi peraturan pusat dan daerah 46. Sinkronisasi kebijakan antar departemen 47. Peraturan dan perundangan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi yang menghambat pelaksanaan operasional industri
Isu lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pencitraan industri yang ramah lingkungan 	28. Perundangan yang mendorong peningkatan nilai tambah industri dalam	48. Kampanye citra positif industri dalam negeri yang

	Kondisi Pemungkin	Usulan	
		Kebijakan	Rencana Aksi
		negeri	berwawasan lingkungan 49. Advokasi terhadap industri yang terkena <i>negatif brand image</i> akibat isu lingkungan 50. c. Pemberian dis-insentif kepada industri yang berdampak negatif pada lingkungan

IV. EKONOMI KREATIF

Industri kreatif merupakan istilah yang belum banyak dikenal di masyarakat, sekalipun praktik bisnisnya sudah dilakukan sejak lama. Industri ini adalah jenis industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah, dan adanya masyarakat atau *community* yang mendukung, Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam menjadikan industri kreatif sebagai unggulan dalam menunjang perekonomian bangsa.

Oleh karena itu industri kreatif perlu dikembangkan, karena memiliki sumbangsih yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbarukan, menumbuhkan daya inovasi dan kreativitas, serta menimbulkan dampak sosial yang positif.

1. Kontribusi Industri Kreatif di Indonesia

Pada tahun 2006, industri kreatif Indonesia telah mampu memberi sumbangan kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 189,4 triliun, atau 5,67 persen dari total PDB. Namun, rata-rata pertumbuhan industri kreatif dalam periode 2002-2006 hanya sebesar 0,74 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,24 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh merosotnya kontribusi subsektor kerajinan dan fesyen pada tahun 2002-2003 dan tahun 2005-2006.

Industri kreatif mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2004, yaitu 8,17 persen. Pencapaian ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03 persen.

Selama kurun waktu 2002-2006, subsektor industri kreatif yang mengalami pertumbuhan rata-rata di atas pertumbuhan PDB adalah: (1) Musik (18,06%); (2) Penerbitan dan Percetakan (12,59%); (3) Periklanan (11,35%); (4) Arsitektur (10,86%); (5) Layanan Komputer dan Piranti Lunak (10,60%); (6) Televisi dan Radio (8,51%); (7) Permainan Interaktif (8,24%); (8) Pasar barang seni (7,65%); dan (9) Seni Pertunjukan (7,65%).

Sementara itu, pada tahun 2006, subsektor industri kreatif yang tetap memiliki pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan PDB adalah subsektor: (1) Arsitektur (11,98%); (2) Pasar barang seni (8,27%); (3) Permainan Interaktif (7,59%); (4) Musik (6,78%); (5) Layanan Komputer dan Piranti Lunak (7,54%).

Jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh sektor industri kreatif ini pada tahun 2006 mencapai 5,4 juta pekerja dengan tingkat partisipasi pekerja adalah sebesar 5,8 persen. Sementara itu nilai ekspor industri kreatif di Indonesia tahun 2006 mencapai Rp 81,4 triliun dan berkontribusi sebesar 9,13 persen terhadap total nilai ekspor nasional.

Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri kreatif di Indonesia juga merupakan sektor industri yang menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

2. Peranan KADIN dalam Industri Kreatif

Sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 tentang KADIN, dimana KADIN adalah wadah bagi para pengusaha, termasuk para pengusaha yang bergerak dalam bisnis Industri Kreatif, maka peranan KADIN adalah:

- Media komunikasi dan informasi antara Pemerintah dan para pelaku bisnis industri kreatif yang menyangkut berbagai kebijakan atau ketentuan, aspirasi dan kepentingan dunia usaha.
- Memberikan pendidikan, bimbingan/konsultasi, dan pelatihan bagi para pelaku bisnis industri kreatif.
- Menjadi fasilitator atau penyelenggara kerja sama antara internal pelaku bisnis industri kreatif dan mitra di luar negeri.
- Membantu dalam melakukan promosi produk dan jasa industri kreatif di dalam dan di luar negeri.
- Pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pengusaha dan pekerja.
- Penyelenggaraan upaya keseimbangan dan pelestarian alam dan mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ini sangat penting sebab para pelaku industri kreatif banyak menggunakan bahan baku sumber daya alam seperti kayu, tanah liat, logam, dan lain-lain.
- Mengembangkan dan membudayakan etika bisnis dan persaingan yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam dunia usaha.
- Memberikan pelayanan administratif kepada para pelaku bisnis industri kreatif.

3. Masalah HKI dan Peranan Kadin

- Industri kreatif mengandung gagasan, ide-ide yang dapat dieksploitasi menjadi potensi ekonomi. Dengan demikian peranan hukum dalam memproteksi dan melindungi ide-ide sangat penting.
- Karena perlindungan atau proteksi atas ide-ide, kreativitas, gagasan, inovasi, dll dijalankan dengan mekanisme HKI, maka sebisa mungkin industri kreatif di Indonesia juga mampu membangun landasan HKI yang bersifat ketimuran yang kuat, karena HKI di dunia timur banyak berupa nilai-nilai kearifan budaya lokal yang bersifat kebersamaan (*togetherness*) dan berbagi (*sharing*).

- Kadin bisa memainkan peranan yang sangat penting dalam masalah HKI ini berupa memberikan pengetahuan, bimbingan dan ketrampilan, memfasilitasi permohonan pengajuan HKI kepada pemerintah, publikasi, dan sebagainya.

4. Iklim Usaha dan Persaingan

Persoalan iklim usaha dan persaingan pada industri kreatif umumnya meliputi:

- a) Regulasi bahan baku. Persoalan ini khususnya mengemuka pada subsektor industri kreatif yang mengandalkan sumber daya alam, seperti penerbitan dan percetakan, fesyen dan kerajinan. Kelangkaan dan mahal nya biaya bahan baku merupakan persoalan sentral.
- b) Regulasi impor dan ekspor. Persoalan yang mengemuka adalah lambatnya administrasi ekspor dan impor, maraknya impor ilegal, proteksi terhadap produk impor (substitusi impor) kemudahan ekspor dan larangan ekspor bahan baku.
- c) Prosedur administrasi. Selain administrasi ekspor dan impor di atas, persoalan yang mengemuka adalah lama dan mahal nya biaya administrasi perijinan, pengurusan HKI dan pendirian usaha.
- d) Penyelundupan ditengarai menjadi salah satu penyebab kelangkaan-kelangkaan bahan baku.
- e) Pembajakan dan HKI. Sebagai industri yang kental dengan hak cipta, desain, paten dan merk, persoalan pembajakan dan HKI merupakan salah satu persoalan sentral dalam industri kreatif.
- f) Pungutan-pungutan liar dirasakan mengurangi efisiensi, dan mengurangi akurasi estimasi perhitungan keuangan. Ekonomi biaya tinggi ditengarai terjadi karena pungutan-pungutan ini.
- g) Persaingan yang sehat. Persoalan ini merupakan persoalan yang kompleks untuk dibuktikan kebenarannya. Persoalan ini mengemuka terutama di industri televisi dan radio, periklanan dan industri film, video dan fotografi
- h) Pajak. Insentif pajak (**tax holiday**) dirasakan oleh beberapa pelaku usaha di industri kreatif sebagai suatu yang penting, terutama untuk subsektor-subsektor dengan total keuntungan yang belum terlalu besar atau untuk para pendobrak-pendobrak di luar pasar *mainstream* yang belum tentu memperoleh keuntungan karena resiko kegagalan agar produk/jasa yang ditawarkan akan dapat diterima oleh pasar (*high risk*).
- i) Tenaga kerja. Persoalan ini mengemuka terutama pada subsektor yang sifatnya padat karya (*labour intensive*), seperti fesyen, percetakan besar, televisi, dan beberapa perusahaan kerajinan. Aturan tenaga kerja Indonesia memang bertujuan melindungi tenaga kerja dengan lebih baik. *Labour market flexibility* yang merupakan preferensi pengusaha menjadi terkekang. Pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja sudah berusaha duduk bersama menyempurnakan aturan tenaga kerja, namun konsensus tak kunjung dicapai hingga kini.
- j) Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, misalnya kanal (frekuensi). Teknologi transmisi penyiaran yang menggunakan teknologi analog memiliki keterbatasan kanal (frekuensi). Di pihak lain, iklim penyiaran yang semakin kondusif merangsang tumbuhnya perusahaan-perusahaan penyiaran. Di beberapa daerah, pertumbuhan jumlah perusahaan penyiaran sudah melampaui kapasitas kanal. Akhirnya terjadi perebutan kanal. Regulasi yang sesuai harus dilakukan, sebelum implementasi peralihan ke teknologi digital, yang meniadakan keterbatasan kanal, dilakukan.

5. Peluang Industri Kreatif

Peluang industri kreatif baik di dalam negeri maupun di luar negeri sangatlah besar. Pangsa pasar yang menjanjikan untuk industri kreatif ini masih terbuka sangat lebar, dan akan memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini antara lain didukung oleh:

- Perubahan perilaku pasar dan konsumen
- Tumbuhnya era produksi non massal
- Porsi konsumsi produk dan jasa industri kreatif yang relatif besar di negara G-7
- Porsi pasar dalam negeri yang besar
- Keragaman sosio-kultural Indonesia

6. Tantangan Industri Kreatif di Indonesia

- Kesiapan SDM kreatif di Indonesia
- Lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan insan kreatif Indonesia
- Keragaman sosio-kultural Indonesia
- Kesiapan perangkat negara untuk mendukung industri berbasis *intellectual property*
- Menghadapi perdagangan bebas
- Lembaga keuangan bagi industri kreatif

7. Visi dan Misi Ekonomi Kreatif Indonesia

Pemerintah telah mencanangkan Visi dan Misi Ekonomi Kreatif hingga tahun 2025 sebagai berikut:

Visi:

“Bangsa Indonesia yang berkualitas hidup dan bercitra kreatif di mata dunia”

Misi:

“Memberdayakan Sumber Daya Insani Indonesia Sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional”

untuk:

- 1) Peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia,
- 2) Peningkatan ekspor nasional dari produk/jasa berbasis kreativitas anak bangsa yang mengusung muatan lokal dengan semangat kontemporer;
- 3) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak terbukanya lapangan kerja baru di industri kreatif;
- 4) Peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di industri kreatif,
- 5) Pengutamaan pada pemanfaatan pada sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi & generasi yang akan datang;
- 6) Penciptaan nilai ekonomis dari inovasi kreatif, termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya nusantara;
- 7) Penumbuhkembangan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Indonesia yang potensial;
- 8) Penguatan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya pencitraan negara (*national branding*) Indonesia di mata dunia Internasional.

8. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015

Berdasarkan analisis serta penentuan arah dan sasaran pengembangan industri kreatif, maka peta jalan industri kreatif sampai dengan periode penguatan pilar dan landasan (2009-2015) adalah sebagai berikut:



9. Rekomendasi

- 1) Pemerintah hendaknya membuat suatu kebijakan, atau semacam kewajiban moral untuk lebih memprioritaskan penggunaan perangkat lunak produk dalam negeri.
- 2) Pemerintah hendaknya membuat suatu kebijakan yang meminta agar televisi menayangkan produk animasi lokal dalam durasi waktu tertentu.
- 3) Pemerintah hendaknya mendukung dalam segi penyediaan sumber daya, pembiayaan finansial, pemasaran, dan perlindungan hukum yang menyangkut kekayaan intelektual.
- 4) Perlu dilakukan kerja sama antara KADIN dengan Departemen Hukum dan HAM dalam hal pengurusan HAK. Misalnya ada suatu unit kerja atau lembaga di bawah KADIN yang menangani pengurusan HAK ini secara *on-line*. Sehingga anggota KADIN dapat memonitor sendiri (*tracking*) proses pengurusan HAKI.
- 5) Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan dan akses pasar, baik di dalam dan di luar negeri, misalnya dalam hal promosi, pameran, penyelenggaraan berbagai kejuaraan (*award*).

- 6) Pemerintah hendaknya bukan saja menyediakan berbagai program bantuan atau pendanaan (kredit) kepada para pelaku industri kreatif, tapi yang lebih penting lagi kemudahan dalam mengakses dan memperolehnya.
- 7) Bantuan *Community Service Recovery* (CSR) dari perusahaan-perusahaan hendaknya bisa disalurkan lewat KADIN melalui suatu lembaga khusus profesional di bawah KADIN. Lembaga ini memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu bisnis. Disamping itu lembaga ini juga bukan saja bisa sebagai penilai kelayakan kredit, tetapi juga sebagai pendamping. Misalnya dana yang berasal dari PNM atau Bahana.
- 8) Perlu dipertimbangkan skema kredit sejenis KUR khusus untuk industri kreatif dengan bunga yang rendah.
- 9) Pemerintah hendaknya memberikan keringanan kepada bisnis UKM dalam memasuki pasar (*low entry barrier*), antara lain dalam hal pengurusan perijinan, biaya, persyaratan, dsb.
- 10) Kemungkinan membentuk suatu lembaga semacam *Venture Capital* yang khusus untuk industri kreatif. Lembaga ini bisa bekerja sama dengan KADIN dalam hal penyaluran, seleksi dan evaluasi calon penerima dana.

C.IV.Ekonomi_kreatif/14 september 2009

V. UTILITAS: LISTRIK ,GAS DAN AIR BERSIH

Ketersediaan listrik, gas dan air bersih akan semakin menentukan perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Kekurangan dan/atau ketidakterediaan tenaga listrik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan kegiatan produksi di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia terganggu. Ketidakbebasan Indonesia menggunakan gas yang dimilikinya (terutama karena terikat kontrak) telah menjadikan Indonesia harus menggunakan sumber energi yang harganya lebih mahal yaitu minyak. Sementara itu, ketidakcukupan air bersih bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya telah berakibat semakin sulitnya usaha perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan banyaknya dana yang harus dikeluarkan untuk keperluan pengobatan.

Pada tahun 2009 , diperkirakan total konsumsi energi menurut sumbernya adalah: minyak bumi 42,79 persen, gas alam 12,48 persen, batu bara 16,42 persen dan sumber terbarukan 28,39 persen. Dengan menyadari betapa pentingnya pengelolaan sumber daya energi bagi keberlangsungan usaha pembangunan di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang bersifat umum. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Sasaran Kebijakan Energi Nasional yang dimaksudkan adalah mencapai elastisitas energi lebih kecil dan 1 (satu) pada tahun 2025. Untuk itu akan diusahakan terwujudnya *primary energy mix* yang optimal pada tahun 2025, dengan peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional adalah:

- minyak bumi menjadi kurang dan 20 persen.
- gas bumi menjadi lebih dan 30 persen.
- batubara menjadi lebih dan 33 persen.
- bahan bakar nabati (*biofuel*) menjadi lebih dan 5 persen.
- panas bumi menjadi lebih dan 5 persen.
- energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dan 5 persen; serta batu bara yang dicairkan (*liquefied coal*) menjadi lebih dan 2 persen.

Sampai saat ini *electrification ratio* Indonesia masih berada di sekitar 57 persen; sedangkan jumlah rumah tangga yang telah dapat menikmati air bersih pada taun 2007 baru sekitar 8,45 juta pelanggan. Agar dapat meningkatkan produksi listrik yang seiring dengan peningkatan *electrification ratio* dan sejalan dengan usaha diversifikasi sumber energi, dibutuhkan peningkatan produksi gas bumi yang lebih tinggi dan lebih cepat dari pertumbuhan produksi listrik. Dalam lima tahun ke depan (2010-2014) diharapkan *electrification ratio* dapat berada di

sekitar 60 persen sampai 65 persen, dan jumlah masyarakat yang dapat menikmati air bersih meningkat secara berarti dan bila memungkinkan mencapai 20 juta pelanggan.

Peningkatan produksi listrik, gas dan air bersih akan dapat diwujudkan melalui investasi di masing-masing kegiatan. Kenyataan menunjukkan dana investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur ini biasanya relatif sangat besar dan investasinya bersifat *slow yielding*. Dengan demikian masalah yang harus dipecahkan pada tingkat awal adalah masalah ketersediaan dana dan tingkat pengembalian dana yang diinvestasikan (*return on investment*).

Masalah ketersediaan dana menjadi semakin mengemuka karena dewasa ini di Indonesia muncul dan berkembang keinginan yang semakin membatasi peran modal asing pada perekonomian Indonesia. Di sisi lain, masalah pengembalian investasi semakin menarik perhatian terutama karena konsumen listrik tertentu di Indonesia masih mendapat subsidi yang jumlah keseluruhannya sangat besar. Yang tidak kalah menarik adalah harga yang dibebankan kepada konsumen rumah tangga adalah lebih rendah dari harga yang dibebankan pada industri dan bisnis. Kebijakan harga yang diterapkan ini dalam prosesnya telah menggerogoti daya saing industri domestik dan menyebabkan usaha efisiensi pada penggunaan energi (listrik).

Salah satu sumber input yang relatif lebih murah untuk memproduksi listrik adalah gas bumi/alam. Sayangnya, dewasa ini diversifikasi penggunaan gas bumi menggantikan minyak bumi (yang relatif mahal) tidak dapat berjalan dengan lancar terutama karena tidak tersedianya gas alam yang dibutuhkan. Sebagian hasil produksi gas alam Indonesia tidak dapat dimanfaatkan di dalam negeri karena harus diekspor sesuai kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam lima tahun yang akan datang total konsumsi gas alam diharapkan meningkat paling sedikit 40 persen, dan dalam periode yang sama konsumsi gas alam untuk keperluan listrik akan meningkat lebih tinggi yaitu sekitar 42 persen sampai 45 persen. Dengan kenaikan tersebut diharapkan pertumbuhan produksi listrik lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

Seperti dikemukakan sebelumnya jumlah pelanggan air bersih di Indonesia masih relatif sangat rendah. Sejalan dengan usaha perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia, pemenuhan kebutuhan penduduk atas air bersih perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Sangat diharapkan setiap lima tahun jumlah pelanggan air bersih dapat ditingkatkan dua kali lipat.

Untuk mencapai sasaran di atas, langkah dan atau tindakan konkrit yang dibutuhkan antara lain adalah:

- Membuka kesempatan bagi para investor untuk mengambil bagian dalam memproduksi listrik, gas bumi dan air bersih di Indonesia;
- Membeli listrik dan air bersih dari para produsen dengan harga yang layak (*Return on investment*).
- Menerapkan kebijakan harga yang membuka peluang bagi pelaku usaha nasional meningkatkan daya saingnya dan yang semakin membuka peluang bagi penerapan hemat energy oleh masyarakat Indonesia.
- Menciptakan system bagi hasil eksploitasi sumber daya alam (gas alam) yang lebih menguntungkan Indonesia.
- Mempermudah para investor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (gas bumi) di wilayah Indonesia.

- Mempermudah para investor untuk membangun instalasi yang berkaitan dengan produksi listrik, gas dan air bersih
- Memberi rasa aman bagi para investor yang akan menanamkan modalnya pada kegiatan pembangunan infrastruktur.
- Memberi jaminan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada komitmen dan Undang-undang atau produk hukum yang berlaku.

Lima tahun ke depan merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan dan memendam potensi perubahan yang sulit diduga. Ini berarti setiap kesempatan baik dan menguntungkan secara nasional harus digunakan secara cepat.

VI. PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDB setelah sektor industri manufaktur. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pun posisinya terbesar kedua setelah sektor pertanian.

Mengingat posisinya yang sangat strategis, Road Map Perdagangan KADIN Indonesia ditujukan dan diarahkan untuk:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal agar berada diatas laju inflasi melalui optimalisasi surplus perdagangan yaitu dengan :
 - Mendorong ekspor produk yang bernilai tambah tinggi (barang jadi atau setengah jadi).
 - Menahan/membatasi ekspor produk mentah/bahan baku (bahan baku diutamakan untuk diolah didalam negeri hingga bernilai tambah maksimal).
 - Membatasi/mengatur impor produk barang jadi.
 - Mengatur dan mempermudah impor bahan baku dan barang modal.
2. Menekan laju inflasi agar berada dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi.
 - Efisiensi dan penataan sistim distribusi, keagenan dan logistik.
 - Menjaga stabilitas harga melalui informasi/pemetaan permintaan-penawaran yang akurat khususnya dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
3. Penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan peluang usaha dengan mendorong sistim waralaba dan lisensi.

1. Permasalahan

Belakangan ini perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan kinerja yang melemah. Khusus tahun 2009 penurunan yang terjadi seiring dengan kecenderungan dunia akibat krisis global. Kemerosotan paling tajam dialami oleh hasil industri manufaktur, yang juga merupakan kecenderungan global. Indonesia agak tertolong dengan ekspor komoditas primer yang harganya mulai kembali naik setelah mengalami penurunan hingga tingkat terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan yang dialami antara lain:

- 1) Infrastruktur transportasi buruk, distribusi terhambat, biaya logistik mahal, inflasi tinggi dan daya saing produk nasional turun.

- 2) Management & strategi perdagangan luar negeri kurang tepat:
 - Fungsi ITPC tidak maksimal, tingkat penetrasi pasar rendah.
 - Strategi promosi melalui pameran cenderung pemborosan, tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
 - Pembentukan FTA cenderung merugikan
 - Kebijakan perdagangan tersebar diberbagai kementerian
 - Kemampuan diplomasi dagang belum kuat
- 3) Ketidak-sesuaian antara permintaan dan penawaran produk utama (bahan pokok) menyebabkan instabilitas harga.
- 4) Maraknya praktik impor dan peredaran barang impor ilegal.
- 5) Kendala pembiayaan perdagangan (trade financing) berkontribusi terhadap rendahnya pertumbuhan ekspor nasional.

2. Visi dan Misi

2.1. Visi

Perdagangan sebagai sektor yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi nasional.

2.2. Misi

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal agar berada diatas laju inflasi melalui optimalisasi surplus perdagangan.
- 2) Menekan laju inflasi agar berada dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sistim distribusi dan logistik barang.
- 3) Menyerap tenaga kerja melalui penciptaan peluang usaha.

3. Sasaran

- 1) Mendorong ekspor produk yang bernilai tambah tinggi (barang jadi atau setengah jadi).
- 2) Mengatur/membatasi ekspor produk mentah/bahan baku (bahan baku diutamakan untuk diolah di dalam negeri hingga bernilai tambah maksimal).
- 3) Mengatur/membatasi ekspor komoditi sumber daya energi.
- 4) Membatasi dan mengatur impor produk barang jadi.
- 5) Mengatur impor bahan baku dan mempermudah impor barang modal.
- 6) Mengatur ketersediaan stok bahan pokok untuk stabilitasi harga.
- 7) Mengembangkan dan Mendorong sistem waralaba dan lisensi ke ASEAN.

4. Target

- 1) Pertumbuhan surplus perdagangan rata-rata 11,63%.
- 2) Laju inflasi rata-rata dibawah 6,18%.
- 3) Penciptaan lapangan kerja menyerap 300 ribu pertahun di retail dan sistem waralaba/lisensi.

5. Strategi dan Aksi

- 1) Pembenahan Infrastruktur transportasi dan efisiensi distribusi-logistik.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015-2020	2021-2030
Perbaikan kinerja dan mental aparat pelabuhan (Bea Cukai, Pelindo dsb)							
Pembenahan Aturan & Prosedur Transportasi Angkutan Barang Darat							
Pembenahan Aturan & Prosedur Pelabuhan, Mengurangi otoritas pengelola pelabuhan							
Pelabuhan Dikelola Swasta							
Perbaikan Infrastruktur Jalan							
Penyediaan Sistem Angkutan Rel Kereta API kerjasama dengan swasta							
Peningkatan Kapasitas Pelabuhan, Peralatan, Sarana & Pra Sarana,							
Pembangunan Pelabuhan Internasional							

2) Pembentukan Manajemen dan strategi perdagangan luar negeri.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015-2020	2021-2030
Review Perjanjian Dagang							
ITPC sebagai agen promosi dan pemasaran							
Sinkronisasi kegiatan promosi/pameran antara pemerintah dan dunia usaha							
Peningkatan kemampuan diplomasi perdagangan internasional							
Perbaikan Infrastruktur Jalan							
Technical barrier dan standarisasi produk dalam negeri							
Analisa Pembentukan FTA							
Pembentukan FTA baru							
Sinkronisasi Tarif Bea Masuk dgn kebutuhan industri							

3) Akurasi data permintaan dan penawaran serta penerapan sistem *buffer stock* yang efisien.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015-2020	2021-2030
Sistem informasi bahan pokok yang akurat							
Sistem pergudangan bahan pokok di Indonesia timur							

4) Mencegah masuknya produk impor secara ilegal dan membatasi ruang gerak produk impor ilegal dipasar domestik.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015-2020	2021-2030
Peningkatan kinerja aparat yang bertanggung jawab							
Membatasi ruang gerak peredaran barang impor ilegal melalui UU Perdagangan							
Revitalisasi pasar tradisional dan ITC sebagai tempat pemasaran produk lokal.							

5) Penyediaan pembiayaan perdagangan (*trade financing*).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015-2020	2021-2030
Optimalisasi penggunaan LPEI							
Kerjasama Internasional u/ trade financing							

6) Penciptaan peluang usaha dan lapangan melalui sistem waralaba dan lisensi.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015-2020	2021-2030
Promosi pengembangan kewirausahaan melalui waralaba							
Pembentukan Gerai Waralaba							
Pembentukan Badan Usaha Bersama & lisensi					14		
Pemasaran perusahaan pemberi waralaba nasional ke pasar ASEAN							

VII. PARIWISATA

1. Kondisi Dewasa Ini

Pariwisata adalah sebuah industri yang tidak akan pernah habis oleh waktu, justru nilai tambah dan entitas bisnis akan lebih terbuka dengan bertambahnya waktu eksplorasi.

Kinerja sektor pariwisata Indonesia sampai saat ini masih cukup menggembirakan. Jumlah turis asing yang berkunjung melalui sebelas gerbang utama Indonesia di tahun 2008 mencapai 5,2 juta orang, atau naik sebesar 19,8 persen dari tahun 2007. Pertumbuhan jumlah turis ini meningkat pesat dibandingkan pertumbuhan di tahun 2006, yaitu minus 2,19 persen.

Sektor pariwisata memang dapat menjadi andalan ekonomi Indonesia, karena merupakan salah satu sektor yang mampu mendulang devisa cukup besar. Devisa yang masuk ke pundi-pundi negara dari sektor pariwisata di tahun 2008 silam mencapai 7,3 miliar dollar AS, naik dari 5,3 miliar dollar AS di tahun sebelumnya (tumbuh 37,9 persen). Prestasi ini yang menempatkan pariwisata sebagai pendulang devisa terbesar setelah ekspor migas. Kenaikan ini juga terkait dengan naiknya nilai pengeluaran rata-rata wisatawan asing di Indonesia dari 91,3 dollar AS perhari (2002) menjadi 107,7 dollar AS perhari (2008).

Memang, pendapatan devisa dari sektor pariwisata agak menurun dari 4,8 miliar dollar AS pada tahun 2004, menjadi 4,45 miliar dollar AS pada tahun 2006. Walaupun demikian, bukan berarti sektor Pariwisata menjadi kurang penting, karena kontribusi sektor Pariwisata terhadap total ekspor kita justru mengalami kenaikan dalam periode tersebut. Pada tahun 2004 sektor Pariwisata memberikan kontribusi sebesar 10,43 persen terhadap total Ekspor. Angka ini meningkat menjadi 11,64 persen pada tahun 2006.

Namun, sektor Pariwisata kita tampaknya masih kurang dikembangkan. Hal ini, antara lain terlihat dari rendahnya daya saing Pariwisata kita. Menurut *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009*, daya saing pariwisata Indonesia berada pada ranking 81, sedikit menurun dari tahun 2008. Indeks daya saing pariwisata ini disusun berdasarkan kelompok indikator kerangka hukum, kondisi lingkungan bisnis dan infrastruktur, sumber daya manusia, budaya, dan sumber daya alam. Daya saing pariwisata Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang masing-masing berada di urutan ke-10 dan ke-32.

Pada tahun 2005 secara keseluruhan sumbangan sektor Pariwisata, baik pariwisata mancanegara maupun pariwisata domestik, telah memberikan terhadap PDB adalah sebesar 5,27% (hasil perhitungan Neraca Satelit Pariwisata Nasional 2006). Untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7% kontribusi Pariwisata kontribusinya harus ditingkatkan 2 sampai 3 kali lipat pada 10 tahun mendatang.

2. Permasalahan

- Sektor Pariwisata masih dianggap bukan andalan dalam perekonomian nasional.
- Dukungan terhadap pengembangan pariwisata nasional belum optimal
- Minimnya persentase APBN untuk bidang pariwisata membatasi keleluasaan dalam merancang program pembangunan dan pengembangan pariwisata secara merata.
- Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pariwisata sehingga pengelolaan ODTW optimal.
- Keterbatasan akses dari negara-negara sumber pasar (*generating area*) ke Indonesia.
- Infrastruktur dan destinasi belum optimal.
- Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang sering tumpang tindih karena pemahaman yg berbeda mengenai kepariwisataan.
- Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap pengurangan kualitas dan kuantitas obyek wisata.
- Menurunnya citra Indonesia di mata internasional akibat wabah penyakit menular dan stabilitas keamanan karena isu-isu bom dan teroris yang berakibat banyak negara-negara yang mengeluarkan *travel warning*.
- Format kementerian yang menggabungkan budaya dan pariwisata menimbulkan *conflict of interest* yang cukup signifikan, sehingga sebaiknya pariwisata menjadi departemen tersendiri di bawah Menko Perekonomian.
- Belum memiliki Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang diamanatkan dalam UU Pariwisata No. 10/2009 sehingga penanganan pariwisata baru di tingkat kebijakan, belum fokus di tingkat pelaksanaan.

3. Prospek/Target Yang Akan Dicapai

- *Tourist arrival* diperkirakan akan tumbuh dengan laju sebesar 4,1 persen per tahun sampai dengan tahun 2020. Menurut UNWTO, pada tahun 2020 akan terdapat 1,6 miliar turis internasional. Bila pertumbuhan ini dapat berlangsung dengan konstan, maka pada tahun 2030 nanti jumlah turis antar negara akan mencapai lebih dari 2 miliar.
- Kontribusi industri Pariwisata akan ditingkatkan dari 5 persen terhadap PDB pada tahun 2010 menjadi 15 persen pada tahun 2015, dan menjadi 15 persen terhadap PDB pada tahun 2030.
- Mendatangkan wisatawan asing sebanyak 14 juta orang pada tahun 2015 dan menstimulus pergerakan wisatawan nusantara menjadi 275 juta pergerakan.
- Memperpanjang waktu tinggal wisatawan asing dari 9 hari (2005) menjadi 10 hari (2015), dengan pengeluaran wisatawan sebanyak 100 dollar AS/hari (2005) menjadi 120 dollar AS/hari (2015).
- Menyediakan lapangan kerja langsung 15 juta orang maupun tidak langsung 50 juta orang pada tahun 2015.
- *Multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan pariwisata yang meningkat.

4. Program Aksi

4.1. Jangka Pendek

- Memfokuskan pada perkembangan promosi pariwisata Indonesia pada tahun 2011 dengan anggaran promosi (dikelola oleh BPPI) sebesar USD10 per wisatawan asing.
- Mendorong peran swasta dalam pengelolaan destinasi (*economic sustain*).
- Mendorong pertumbuhan wirausaha lokal di bidang pariwisata, sehingga berdampak langsung bagi perekonomian lokal.
- Optimalisasi strategi pariwisata dengan model kluster dan destinasi unggulan berdasarkan tingkat keunikan dan perkembangan masing-masing destinasi.
- Pemberian penghargaan kepada profesional pariwisata yang berprestasi.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata yang menghasilkan SDM yang bertaraf internasional.

4.2. Jangka Menengah

- Pencapaian infrastruktur lengkap untuk destinasi unggulan.
- Mengembangkan destinasi berdasarkan pada tingkat experiences pengunjung.
- Mendorong one village one product untuk seluruh destinasi (*product sustain*).
- Implementasi program green tourism pada destinasi dan daya dukungnya (*eco-sustain*).
- Menambah kapasitas (dan kualitas) angkutan udara, laut dan darat.
- Implementasi standar uji kompetensi melalui sertifikasi profesi.

5. Dukungan Pemerintah yang dibutuhkan

Kebijakan Industri	Memberikan insentif kepada produk lokal yang dipakai untuk kegiatan pariwisata
Kebijakan Perdagangan	Memberikan kemudahan perdagangan barang-barang keperluan pariwisata
Kebijakan Moneter & fiskal	<ul style="list-style-type: none"> - Penghapusan Visa on Arrival - Pengembalian VAT - Stimulus fiskal untuk investasi pengembangan pariwisata - Pengurangan pajak barang mewah untuk bahan makanan dan minuman - Penghapusan pajak pabean untuk barang-barang pameran (eksibisi)
Penyediaan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur sesuai dengan potensi pariwisata
Kebijakan Tenaga Kerja	Pengembangan sumber daya manusia dalam negeri untuk dapat menjadi tenaga kerja yang berdaya saing internasional

C.VI.Pariwisata/12 september 2009

VIII.KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PERUMAHAN RAKYAT, PROPERTI, KAWASAN INDUSTRI

VIII. A. KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

Sektor konstruksi dalam negeri dapat dikatakan tak lekang dengan waktu dan selalu tumbuh. Pembangunan komersial maupun infrastruktur terus digalakkan pemerintah. Kendati demikian, industri konstruksi dalam negeri tetap harus bersaing dengan pelaku konstruksi asing. Namun masih terdapat celah bagi industri konstruksi dalam negeri untuk terus berkembang, termasuk ke pasar luar negeri.

Pembangunan infrastruktur di beberapa negara Afrika dan Timur Tengah (Arab) adalah merupakan tujuan pengembangan industri konstruksi di Indonesia. Data dari Departemen Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa pangsa pasar konstruksi di Timur Tengah pada lima tahun mendatang bisa mencapai 1 triliun dollar AS..

Kontraktor Indonesia memiliki potensi untuk masuk ke pembangunan bandara, pelabuhan, perumahan dan infrastruktur.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika sektor konstruksi dalam negeri perlu meningkatkan penguasaan pasar domestik oleh pelaku usaha konstruksi nasional dan meningkatkan daya saingnya.

1. Permasalahan

Ada potensi perluasan industri infrastruktur ke mancanegara namun terkendala masalah, yaitu kurangnya modal, jaminan berusaha serta peraturan pajak yang belum diterima.

- 1) Kurangnya modal pada kontraktor di Indonesia. Kontraktor Indonesia masih belum mendapatkan bantuan modal dari pemerintah.
- 2) Tidak diperbolehkannya kontraktor lokal yang mendapat pekerjaan di luar negeri melakukan pembiayaan di luar negeri karena dianggap pelarian modal. Ketentuan mengenai batasan dana yang akan menjadi *equity* investasi terhambat peraturan Bank Indonesia karena menyangkut aliran modal ke luar negeri
- 3) Adanya masalah perpajakan sehingga akan ada pajak berganda bagi industri kontraktor yang melakukan ekspansi ke luar negeri.
- 4) Sebagian besar proyek konstruksi di negara tujuan meminta jaminan perbankan Indonesia sementara hal ini tidak diperbolehkan sehingga hal ini menimbulkan biaya provisi yang mahal.
- 5) Teknologi konstruksi nasional masih memerlukan pengembangan.
- 6) Adanya kegagalan dan kecelakaan dalam kegiatan konstruksi.

2. Rekomendasi dan Tindakan Aksi

- 1) Pemerintah segera membuat skim bantuan modal kepada kontraktor. Pemerintah Korea Selatan, Pakistan dan India membantu kontraktor lokal dengan dengan skim pinjaman.
- 2) Realisasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan potensi bisnis konstruksi sehingga memberi keamanan dan sektor konstruksi Indonesia dapat bersaing di negara tujuan ekspansi. Misalnya, melakukan *offset* atas biaya impor dengan kegiatan konstruksi seperti yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Libya.
- 3) Perlu diupayakan perjanjian *double tax free* dengan negara tujuan ekspansi bisnis konstruksi.
- 4) Pemerintah dan Bank Indoensia perlu duduk bersama mencari jalan keluar kendala pendanaan yang menghambat ekspansi jasa konstruksi nasional. Salah satu cara adalah menyediakan jaminan perbankan untuk negara-negara yang tersedia perwakilan bank-bank lokal di negara tujuan ekspansi.
- 5) Meningkatkan fasilitasi implementasi teknologi terkini dan tepat dengan membangun aliansi strategis antar dan intra lembaga untuk implementasi terkini dan tepat melalui kerja sama riset dan pengembangan antara industri, pemerintah, perguruan tinggi, yang meliputi: pemutakhiran teknologi konstruksi berkelanjutan, penggunaan teknologi informasi untuk mendukung manajemen rantai pasokan serta meningkatkan komitmen para pihak dalam kerja sama untuk mengembangkan teknologi nasional.
- 6) Mendorong kualitas konstruksi menjadi lebih tinggi yang ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas konstruksi yang dilaksanakan kontraktor dalam negeri, umur bangunan sesuai umur rencana, berkurangnya kegagalan dan kecelakaan dalam kegiatan konstruksi, kepatuhan memenuhi standar dan regulasi serta kepuasan pemangkukepentingan akan hasil pekerjaan yang bermutu.

C.VIII.a.Konstruksi/14 september 2009

VIII. B. PERUMAHAN RAKYAT

Pembangunan perumahan rakyat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Kebutuhan perumahan yang setiap tahun bertambah sekitar 800.000 unit membuat sektor perumahan rakyat menjadi sektor yang perlu untuk mendapatkan perhatian seksama.

Pembangunan perumahan tidak saja penting dilihat dari aspek mendesaknya pemenuhan kebutuhan perumahan, namun juga akan dapat membengkitkan perekonomian nasional karena memiliki *multiplier effect* yang besar, yang mana sektor ini dapat menggerakkan 104 industri terkait dan keberhasilan pembangunan akan dapat menggerakkan sektor-sektor turunannya.

Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan ini merancang Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) untuk pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Program Pembangunan 1.000 Menara Rumah Susun Sederhana (Rusunami & Rusunawa). Untuk meningkatkan daya beli mayarakat agar mampu membeli RSH dan Rusunami, pemerintah telah menyediakan KPR bersubsidi dan Bantuan Pinjaman Uang Muka melalui Bapertarum (PNS), YKPP (TNI/Polri) dan PT Jamsostek (swasta).

Pasokan pembangunan perumahan rakyat dilakukan oleh para pengembang anggota REI dan Apersi. Jumlah pengembang aktif dalam periode 2005-2009 diperkirakan sebanyak 1500–2000

perusahaan dengan kapasitas pembangunan sekitar 150.000-200.000 unit per tahun. Mayoritas pengembang (80 persen) adalah pengembang kecil-menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembentukan kembali Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2004 merupakan faktor positif yang memengaruhi perkembangan pembangunan perumahan rakyat dalam lima tahun terakhir ini. Faktor-faktor yang memengaruhi (KSF) pembangunan perumahan rakyat antara lain mencakup aspek-aspek: penyediaan lahan, keberadaan KPR, ketersediaan subsidi, ketersediaan infrastruktur, dukungan Pemda, daya beli masyarakat, tata ruang, harga bahan bangunan, permodalan pengembang, kredit perbankan, peraturan-peraturan daerah, perpajakan, sinkronisasi kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, ketersediaan anggaran sektor, birokrasi pemerintah dan lembaga-lembaga lain terkait.

1. Permasalahan

Permasalahan pokok dalam pembangunan perumahan rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pasokan: kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan yang mana kebutuhan mencapai 800.000 unit pertahun ditambah tumpukan *backlog* yang mencapai lebih dari 8.600.000 unit sementara kemampuan pasokan rata-rata hanya 100.000 unit per tahun.
- 2) Pengadaan lahan: pengadaan lahan skala besar belum bisa terealisasi karena belum ada kebijakan pemerintah, belum ada kelembagaan yang menangani dan belum tersedianya anggaran khusus, sementara keberhasilan pembangunan perumahan rakyat sangat tergantung dengan keberhasilan pengadaan lahan skala besar.
- 3) Marjin RSH & Rusunami masih kurang menarik animo pengembang, karena kurang atraktif dibandingkan marjin properti mewah, sedangkan proses bisnisnya menghadapi kesulitan yang hampir sama.
- 4) Kurangnya dukungan pemda; adanya rusunami yang disegel dan didenda oleh pemda menunjukkan kurangnya perhatian dan koordinasi antar kebijakan Pemerintah. Terbitnya Pergub DKI Jakarta No. 27/2009 sebagai revisi atas Pergub No.136/2007 terlalu lama (10 bulan), sementara pengembang sudah mulai kegiatan konstruksinya dan pemasaran sehingga konsumen sudah membayar uang muka dan akad kredit indent. Oleh karena itu penghentian pembangunan karena penyeselangan dapat berdampak negatif pada konsumen karena waktu penyelesaian yang tidak tepat, kehilangan kepercayaan, mengundurkan diri dan peralatan serta bahan bangunan dan juga tenaga kerja terpaksa tidak dapat difungsikan.
- 5) Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terus terkikis; peningkatan biaya hidup masyarakat berpenghasilan rendah mengikis daya beli golongan tersebut tersebut.
- 6) Kurangnya dukungan infrastruktur vital, yaitu listrik dan air bersih menjadi permasalahan pembangunan. Laporan dari REI dan Apersi mencatat bahwa ada lebih dari 100.000 rumah RSH yang terbangun namun belum tersambung listrik.
- 7) Layanan publik biaya tinggi, yang mencakup biaya-biaya pengurusan ijin pembangunan, pengurusan sertifikat, pengurusan kredit, pengurusan bantuan uang muka yang dirasakan masih berbelit, waktu yang kurang menentu dan biayanya yang tinggi.
- 8) Keterbatasan modal pengembang RSH, khususnya untuk pengadahan lahan yang membutuhkan modal yang cukup besar sementara sekitar 80 persen pengembang RSH merupakan kategori pengusaha UKM
- 9) Beban pajak dan retibusi yang berlebihan, yang terdiri dari BPHTB (5%), APPKD, PBB, kompensasi makam, retribusi IMB, PPN jasa konstruksi (10%), PPh 1% dan beban-beban lainnya.

- 10) Rawan terhadap ketersediaan KPR, yang mana MBR sebagai konsumen perumahan rakyat hanya bisa membeli rumah bila KPR tersedia (pembeli RSH via KPR mencapai 95%).
- 11) Rawan terhadap ketersediaan subsidi. Subsidi dibutuhkan mengingat suku bunga yang tinggi dan fluktuatif membuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terhadap KPR terganggu.

2. Rekomendasi Kebijakan Dasar

Kebijakan dasar yang direkomendasikan terdiri atas:

- 1) Meningkatkan peran operasional Kemnag Perumahan Rakyat dalam menangani perumahan rakyat.
- 2) Perlunya peranan komprehensif pemerintah dalam tatanan kebijakan terpadu, pembentukan struktur operasional, dan inisiator pembangunan
- 3) Pemberdayaan lahan milik pemerintah BUMN/D
- 4) Pembiayaan melalui obligasi perumahan
- 5) Program Pemerintah – Swasta (*Public Private Partnership/PPP*)
- 6) Penerapan model subsidi silang dalam pengembangan kawasan besar yang disiapkan pemerintah
- 7) Anggaran konsolidasi sektor perumahan 5% APBN
- 8) Pemda diwajibkan berperan aktif dalam melakukan pembangunan perumahan rakyat di wilayahnya.

4. Kebijakan

Berdasarkan rekomendasi tersebut, kebijakan yang akan diambil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemberian subsidi KPR dan lain-lain dilanjutkan terutama KPR bersubsidi baik skim konvensional maupun skim syariah.
- 2) Pembebasan PPN
- 3) Bank BTN dipertahankan dan dijadikan bank yang fokus pada perumahan rakyat
- 4) Pemberdayaan Asset Negara & BUMN/D bagi komplek perumahan bersubsidi kepada masyarakat berpendapatan rendah, seperti Housing Development Board di Singapura yang menyediakan perumahan rakyat dan Urban Regional Authority di Hong Kong yang mencari lokasi, pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar.
- 5) Pembiayaan melalui “Obligasi Perumahan” untuk pengadaan lahan
- 6) Pembiayaan APBN untuk infrastruktur kawasan
- 7) Peningkatan peran sektor swasta melalui kebijakan *Public Private Partnership* dalam setiap kawasan pengembangan yang disiapkan pemerintah. sehingga dapat menghasilkan 1 juta rumah per tahun
- 8) Kebijakan khusus pertanahan, perijinan, infrastruktur, listrik dan perpajakan untuk mendukung perumahan rakyat.

5. Program Prioritas dan Operasional

Program Prioritas yang akan dikembangkan dalam usaha meningkatkan dan mendukung sektor perumahan rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tahun pertama;

terdiri dari beberapa program yaitu:

- Penetapan kebijakan dan struktur
- Pembentukan & perkuatan kelembagaan
- Revisi peraturan-peraturan yang menghambat
- Peraturan-peraturan pelaksanaan: mencakup lahan, infrastruktur, PPP
- Menyusun UU Perumahan Rakyat

2) Tahun kedua;

terdiri dari beberapa program yaitu:

- Peningkatan konsolidasi anggaran sektor 5% APBN
- Pelaksanaan pengembangan kawasan

3) Tahun ketiga;

terdiri dari beberapa program, yaitu :

- Akselerasi pembebasan lahan
- Akselerasi pembangunan infrastruktur

4) Tahun keempat dan tahun kelima;

terdiri dari satu program yaitu Akselerasi Pembangunan. Program Operasional yang akan dikembangkan dalam usaha meningkatkan dan mendukung sektor perumahan rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Studi Pembangunan Wilayah di 10 kota besar
- Pengadaan lahan skala besar oleh pemerintah (*Land Bank*) dalam kawasan yang disiapkan
- Pembangunan infrastruktur dalam hal ini pembiayaan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan perumahan sejak pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan rumah.
- Dukungan infrastruktur listrik: adanya mata anggaran subsidi listrik untuk perumahan rakyat
- Standarisasi layanan publik (perijinan, sertifikat dan pengurusan terkait lainnya).
- Pemberian keringan pajak-pajak khusus perumahan rakyat
- Pelaksanaan k's PPP disetiap kawasan pengembangan
- Program yang telah ada tetap dilanjutkan.

C.VIII.b.Perumahan_rakyat/14 september 2009

VIII.C. PROPERTI DAN KAWASAN INDUSTRI

Sektor properti merupakan sektor yang bisa berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan konsumsi produk-produk bahan bangunan produksi nasional dalam jumlah sangat besar serta menciptakan pemenuhan (*supply*) atas kebutuhan masyarakat (*demand*) akan tempat tinggal, tempat usaha, tempat perdagangan barang dan jasa dan sarana hospitality

Secara keseluruhan perkembangan sektor properti sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan makro yang meliputi perkembangan ekonomi, *trend environment*, kebijakan pemerintah, sosial politik dan preferensi masyarakat. Kecenderungan ke depan untuk berperan serta mengurangi dampak pemanasan global melalui cara-cara yang akrab lingkungan menjadi tren ke depan yang tidak bisa dihindari lagi di sektor properti.

Dari sudut pengembangan fisik, sektor properti terbagi atas dua kategori, yaitu:

- 1) *Landed Houses* untuk berbagai segmentasi berdasarkan tingkat harga dan keterjangkauan (RSH, rumah menengah, atas)
- 2) Apartemen/rumah susun untuk berbagai segmentasi berdasarkan tingkat harga dan keterjangkauan (Rusnawa, Rusunami, apartemen menengah atas)

Pengembangan paradigma perumahan mengacu pada UU 4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP 38/2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan dimana tanggung jawab ada di tangan Pemerintah Daerah. Sehingga Program lebih berasal dari *bottom up* dan peran inisiatif serta tanggung jawab perumahan ada pada Pemerintah Daerah.

Kebutuhan rumah di Indonesia masih besar, dengan *back log* tahun 2007 sebesar 7,6 juta unit, kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk 1,5 persen per tahun pada 2008 sebesar 811.700 unit dan kebutuhan akibat rumah rusak dan renovasi sekitar 3 persen dari seluruh rumah. Gambaran kebutuhan rumah di Indonesia akibat *back log* yang dibagi 22 tahun sampai 2030 (345.454 unit) kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk (811.700 unit) dan pertumbuhan renovasi (1.121.400 unit). Dengan demikian total kebutuhan rumah adalah sebesar 2.278.554 unit. Dengan asumsi kebutuhan di perkotaan 52 persen secara nasional kebutuhan rumah perkotaan sebesar 1.184.848 unit. Sementara produksi rumah Nasional selama 2003 – 2007 setiap tahunnya hanya mencapai 168.792 unit.

1. Permasalahan

Permasalahan umum pada bidang perumahan adalah pada struktur permintaan yang relatif lebih sangat rendah daya belinya, 75 persen sangat tergantung pada KPR. Struktur biaya masih tinggi termasuk tingkat suku bunga kredit konstruksi, *entry barrier* sangat rapuh dan masih banyak yang kurang profesional. Ditambah lagi belum ada sistem informasi pasar, kelemahan infrastruktur pasar, peraturan yang tumpang tindih dan lain-lain.

Segmentasi sektor perumahan rendah mengingat daya beli terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian dukungan telah diberikan seperti subsidi KPR, bantuan uang muka, subsidi PPN. Permasalahan yang terjadi pada sinkronisasi keluarnya keputusan harga dan perpajakannya,

program subsidi bunga yang berlaku tahunan padahal dibutuhkan pola multiyears. Permasalahan lain yaitu kelangkaan listrik dan prosedur perijinan dan sertifikat yang belum mendukung.

Pada perumahan sektor menengah masalah bertumpu pada ketersediaan dana KPR dan tingkat bunga yang memadai yang sulit turun meskipun tingkat BI Rate sudah rendah bahkan terendah dalam 10 tahun.

Masalah lain datangnya dari tata ruang, banjir, transportasi dan sinkronisasi masih dialami pada sektor perumahan pada umumnya. Keterbatasan penawaran pola pembiayaan berbasis sumber dana jangka panjang yang mendukung pembiayaan pemilikan rumah yang berjangka panjang serta paradigma yang menyatakan bahwa perumahan merupakan tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha harus diangkat menjadi pola dasar pembangunan perumahan di Indonesia khususnya masyarakat pekerja menengah kebawah.

2. Dampak kegiatan Sektor Properti

Dampak multiplier dari sebelum kegiatan sektor properti dibangun terdiri atas dua yaitu:

- 1) Tenaga kerja pencari proyek
- 2) Jasa-jasa terkait pembangunan properti seperti konsultan, pengukuran, pembiayaan, notaris, akunting, dan lain-lain.

Dampak multiplier dari selama kegiatan properti dibangun terbagi atas tiga, yaitu:

- 1) Penyerapan tenaga kerja dalam jumlah sangat besar, baik itu untuk membangun rumah maupun properti komersial seperti buruh, mandor, ahli spesialis, dan lain-lain.
- 2) Konsumsi produk-produk bahan bangunan produksi dalam negeri dalam jumlah sangat besar dan mengakibatkan berkembangnya industri bahan bangunan tersebut secara simultan.
- 3) Jasa-jasa terkait kegiatan pembangunan seperti UMKM (makanan, sembako, catering) dan pembiayaan (perputaran dana sendiri, kredit konstruksi, kredit investasi, KPR, dll), konsultan pembangunan, dan lain-lain.

Dampak multiplier setelah properti terbangun/tahap operasi terbagi atas dua, yaitu:

- 1) Jasa jasa penunjang kehidupan seperti restoran, perbankan, *business services*, *laundry*, bengkel, klinik, pendidikan dan lain-lain yang menimbulkan dampak tenaga kerja yang berjumlah besar.
- 2) Pengembangan properti yang menunjang kebutuhan selanjutnya seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, supermarket, fasilitas olahraga dan lain-lain yang menimbulkan dampak tenaga kerja yang berjumlah besar.

4. Harapan Pemangku Kepentingan

Harapan pemangku kepentingan terhadap sektor properti adalah sebagai berikut:

- 1) Sektor properti menjadi salah satu leading sektor dalam pembangunan mengingat potensinya yang sangat besar dalam penyediaan lapangan kerja dan serapan produk bahan bangunan lokal selain memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat pula.
- 2) Pemerintah memberi dukungan yang kuat untuk mengatasi berbagai kendala, hambatan dan permasalahan di sektor properti.
- 3) Masih terdapat *image* buruk yang melekat di sektor property--seperti daya beli rendah sehingga butuh subsidi, dan pengembang masih dianggap sebagai tuan tanah atau spekulan--

dapat dihilangkan dengan peningkatan profesionalisme dan pelaksanaan etika kerja yang nyata serta dukungan pemerintah serta masyarakat yang memadai.

5. Tujuan Pengembangan Sektor Properti

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sektor properti adalah:

- 1) Menyediakan kesempatan kerja dan konsumsi produk bahan bangunan produksi industri bahan bangunan dalam negeri dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas pendukung kehidupan dan kegiatan perekonomian sehari-hari. (Hunian, tempat tinggal, tempat usaha, perdagangan, *hospitality*)
- 2) Ikut memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian. Penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri bahan bangunan loka.
- 3) Menyediakan lingkungan binaan yang memenuhi syarat dan standard sehingga pengguna dapat menjalankan aktivitasnya dengan efisien, efektif dan akrab lingkungan.
- 4) Mengembangkan dan menciptakan kontrak sosial yang baru mengenai perumahan segmen masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya yang selanjutnya dibantu para pemberi kerja yang akan mengupayakan rumah bagi pekerjanya sendiri melalui iuran sebagai anggota Jamsostek.

6. Dukungan yang Dibutuhkan

- 1) Dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif serta tidak kontraproduktif untuk meningkatkan peran sektor properti dan kawasan industri yang berdasarkan kekuatan pasar
- 2) Dukungan paradigma baru perumahan rakyat (untuk semua segmen masyarakat) yang mengacu pada peran program, inisiatif dan tanggungjawab pemerintah daerah.
- 3) Menciptakan *image* positif dalam rangka sektor properti menjalankan usahanya melalui peningkatan profesionalisme secara berkesinambungan.
- 4) Mengupayakan pola perencanaan program perumahan tidak dalam bentuk target tahunan. Dengan demikian diperlukan program multi years dalam pola perencanaan program.
- 5) Mengupayakan kebijakan yang konsisten di semua level pemerintah dan dari daerah hingga pusat.
- 6) Meengupayakan kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah baik dalam penggunaan secara fisik maupun untuk urusan penjaminan.
- 7) Segera diperbolehkan kepemilikan asing dan strata title di Indonesia dengan batas hak waktu kepemilikan 70-90 tahun dengan segala turunnya termasuk masalah imigrasi guna memberikan daya tarik masuknya pembeli dan investasi asing.
- 8) Pembentukan lembaga seperti Central Provident Fund (CPF) Singapore dengan cara mewajibkan pegawai dulu menjalankan kontribusi tabungan selanjutnya mewajibkan pemberi kerja sebagai perluasan dari Taperum PNS melalui wadah Jamsostek atau wadah khusus.
- 9) Meningkatkan peran Secondary Mortgage Fund (SMF) dalam mengupayakan sumber pembiayaan jangka panjang.
- 10) Pembentukan bank khusus di bidang perumahan dan properti
- 11) Membuat pendanaan alternatif seperti Real Estate Investment Trust yang disesuaikan dengan standar internasional.
- 12) Menciptakan subsidi untuk perumahan kelas menengah dan rendah.

- 13) Kebijakan pengenaan tariff pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan dasar bahwa pengembang melakukan persediaan rumah bukan untuk digunakan sebagai asset atau rumah mewah. Persediaan tanah digunakan pengembang untuk menyediakan kebutuhan rumah bagi masyarakat selain upaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
- 14) Penerapan PPN 0 persen sampai bangunan dnegan luas 100 m2.
- 15) Penerbitan peraturan pajak bagi perumahan bersubsidi yang hendak keluar bersamaan dengan keluarnya keputusan mengenai harga rumah bersubsidi.
- 16) Pembuatan regulasi yang memungkinkan swasta melakukan pembangkitan dan penyaluran listrik seperti halnya pengaturan konsesi yang diberlakukan di investasi jalan tol.
- 17) Pembiayaan jaringan dan gardu agar dikembalikan kepada PLN yang selama ini oleh pengembang.
- 18) Diperlukan adanya insentif bagi pengembangan yang menerapkan pembangunan hijau untuk mengurangi global warming.

C.VIII.c.properti-ki/14 september 2009

IX. TELEMATIKA

Pendidikan, pengetahuan, informasi dan komunikasi adalah tulang punggung kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Lebih jauh, *Information and Communication Technologies* (dalam bahasa Indonesia TIK = Teknologi Informatika dan Komunikasi) memiliki dampak luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan. Kemajuan luar biasa dari berbagai teknologi tersebut membuka kesempatan baru yang seluas-luasnya untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. TIK dapat pula mengurangi berbagai hambatan tradisional, utamanya yang berkaitan dengan waktu dan jarak.

Perkembangan TIK telah mengubah pola hidup, yang mana TIK tidak hanya dipandang sebagai faktor pemungkin namun juga sebagai faktor penggerak dan penarik gerbong perekonomian yang dapat memberikan efek berantai.

Mengingat begitu mendasarnya kebutuhan akan TIK maka semua pemangku kepentingan sepatutnya bekerja sama untuk:

- memperbaiki akses terhadap infrastruktur informasi dan komunikasi;
- membangun kapasitas;
- meningkatkan kepercayaan diri dan keamanan dalam penggunaan TIK;
- menciptakan lingkungan yang mendukung dalam setiap tingkatan;
- mengembangkan dan memperlebar aplikasi TIK;
- merawat dan menghormati kemajemukan budaya;
- menemukan peran media;
- menjawab berbagai dimensi etika dari Masyarakat Informasi; serta
- mendukung kerja sama internasional maupun regional.

Pertumbuhan TIK belum diiringi dengan pertumbuhan industri TIK dalam negeri, sebagaimana terlihat dari angka impor yang naik dari tahun ke tahun namun sebaliknya dengan angka ekspor.

Ketidaxselarasan aturan turut menjadi faktor penghambat bagi percepatan angka pertumbuhan. Didi sisi lain, penerapan beberapa peraturan memberikan keleluasaan barang impor untuk menguasai pasar.

Industri TIK selama ini belum mendapatkan insentif, baik dari perbankan maupun pemerintah, tercermin dari seluruh penghasilan yang diperoleh industri ini belum kembali bagi kepentingan pengembangan industri itu sendiri.

PBB melalui UNCTAD mengukur indeks pengembangan TIK berdasarkan 4 dimensi, yakni: keterhubungan (*connectivity*), akses, kebijakan, dan penggunaan. Pemerintah juga menggunakan hal di atas untuk mengukur perkembangan TIK. Namun yang masih luput dari perhatian adalah perencanaan. Indonesia tidak memiliki *blue print/roadmap* industri yang dapat memberikan gambaran dan potensi industri serta perlindungan bagi pelaku industri TIK.

Bentuk organisasi pemerintahan dan rencana pengembangan TIK nasional belum menunjukkan kesiapan dalam mengantisipasi perkembangan TIK global.

Kadin Indonesia berpandangan bahwa di keempat subsektor industri TIK (Telekomunikasi, Informatika, Media, dan Industri Penunjang/industri dalam negeri) di Indonesia telah menjadi obyek bagi pasar/industri global. Namun terdapat sektor lain yakni Konten dan Aplikasi yang masih dapat diusung guna meningkatkan produksi TIK yang berbasis kemampuan dalam negeri

1. Kondisi Saat Ini

Pertumbuhan TIK di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam pertumbuhan infrastruktur, layanan pendukung, dan jasa/aplikasi.

Pertumbuhan yang terjadi belum merata sehingga masih terdapat kesenjangan antara pusat dan daerah. Sebagai contoh, jumlah telepon tetap kabel di Indonesia pada 2007 hanya mencapai 8,6 juta pelanggan dan tersebar hanya di daerah-daerah utama saja.

Industri Telekomunikasi tumbuh dengan ketersediaan layanan yang semakin beragam diikuti dengan ketersediaan akses yang semakin murah dan kompetitif, namun di sisi lain dengan semakin kecilnya keuntungan perusahaan akan mengancam pertumbuhan jaringan di masa mendatang. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya margin EBITDA operator besar telekomunikasi yang semula atas 70 persen menjadi sekitar 50 persen pada tahun 2008.

Industri Informatika memiliki potensi yang besar dengan masih rendahnya angka ketersediaan PC/Notebook dan pengguna internet. Berdasarkan hasil laporan dari APJII, pada tahun 2008 diperkirakan angka kepemilikan PC adalah sekitar 5 juta sementara angka pengguna internet hanya sekitar 30 juta.

Industri Media terus berkembang namun dihadapkan pada kondisi *unregulated industry* dan tingkat pembajakan yang besar. CASBA (Cable and Aatelite Broadcaster Associaton) pada tahun 2008 mengindikasikan kerugian akibat pembajakan sebesar 28 juta dollar AS (hampir 90 persen).

Industri Konten dan Aplikasi akan terus tumbuh sejalan dengan perkembangan industri Telekomunikasi dan Informatika, dan Media. Pada tahun 2007 ASPILUKI mencatat hanya ada 110 anggota yang aktif mengembangkan *software* aplikasi. Di tahun 2008, jumlahnya meningkat menjadi 210 anggota. Pada akhir tahun 2010 diperkirakan akan mencapai Rp 500 miliar.

Ketersediaan infrastruktur dan pelanggan yang beragam akan meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertukaran arus informasi untuk menjawab kebutuhan.

Industri Pendukung/dalam negeri akan menghadapi tantangan yang semakin besar di tengah tumbuhnya industri terutama dengan derasnya arus globalisasi dapat membatasi bahkan membuat produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif.

2. Rekomendasi

2.1 Fokus Utama

- 1) Menyusun dan mengesahkan Road Map bidang TIK dan selanjutnya berdasarkan Road Map tersebut menyusun Undang-undang Konvergensi untuk bidang TIK karena industri TIK secara keseluruhan adalah sebuah industri yang strategis dan vital bagi ketahanan dan keamanan nasional.
- 2) Mempersiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian *ICT fund*. ICT Fund dapat diciptakan dari alokasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini ditarik oleh Pemerintah kepada para pelaku industri, sebagai contoh operator dikenakan biaya USO sebesar 1,25% dan biaya BHP Jastel sebesar 0,5%. Bila sebagian dari komponen tersebut (tahun 2008 menghasilkan Rp 7 Trilyun) dapat dialokasikan ke industri kembali maka dapat tercipta pelaku usaha yang baru.
- 3) Menetapkan pembentukan dan pengembangan industri muatan atau konten dalam negeri yang rata-rata para pemainnya adalah pada pengusaha di tingkat awal dan ada pada skala menengah dan kecil, KADIN memperkirakan pendapatan industri ini akan dapat tumbuh jadi sebesar Rp 1,7 Trilyun pada tahun 2015, dengan penambahan setidaknya 100 pemain pertahun (tanpa adanya insentif yang berarti dari Pemerintah). Dunia usaha TIK mengharapkan adanya dukungan, inisiatif dan pemberian insentif dalam bentuk inkubasi, kebijakan, peraturan, maupun permodalan dari Pemerintah sehingga Indonesia akan memiliki unggulan di bidang hak milik intelektual yang mampu bersaing di tingkat internasional. KADIN mendorong agar pelaku usaha konten Indonesia dapat menjadi pemain ranking 5 besar dunia pada akhir tahun 2020.

2.2 Umum

- 1) Mendorong terjadinya penyelarasan peraturan baik lintas sektoral guna menuju konvergensi maupun aturan pusat dan daerah.
- 2) Mendorong ketersediaan, pemerataan jaringan dan akses diseluruh wilayah dengan mengedepankan konsep penggunaan sarana secara bersama untuk efisiensi dan menekan investasi.
- 3) Menciptakan dan mendorong tumbuhnya industri Konten melalui skema pembiayaan yang tepat dan mendorong tumbuhnya kreativitas dengan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 4) Mendorong penciptaan dan proses penyerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tepat guna mendukung pertumbuhan industri dalam negeri melalui tahapan pengembangan yang terarah dan berkesinambungan. Proyek TKDN dapat dimulai melalui implementasi kandungan lokal di proyek Pemerintah setidaknya 60% dan 30% pada proyek-proyek swasta setidaknya pada akhir 2010.

- 5) Pemerintah diharapkan juga terus mendorong jalinan antarlembaga (*institutional link*) guna pengembangan dan penggunaan produk TIK nasional di lembaga pemerintahan, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat agar dapat tercipta *knowledge based society*.
- 6) Dukungan pemerintah bagi tumbuh kembangnya industri dapat dilakukan melalui penciptaan iklim yang kompetitif dan membantu mendorong *infrastructure collaboration* yang akan menekan cost dan meningkatkan efisiensi secara nasional.
- 7) Keinginan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri hendaknya juga terkoordinasikan dengan departemen perindustrian, sehingga dapat dipetakan dengan jelas kemampuan (*ability*) dan ketersediaan (*availability*) agar diserap pasar dengan benar.
- 8) Terkait dengan road map/blue print konvergensi baik jaringan maupun layanan, Pemerintah perlu memaparkan rencana Pemerintah dalam penerapan konvergensi, termasuk mengenai jadwal pemenuhannya serta seyogyanya selalu dari waktu ke waktu melibatkan industri agar perkembangan teknologi dan perkembangan dunia bisnis dapat terkamodasi secara proporsional.
- 9) Dalam rancangan road map nanti- termasuk didalamnya rancangan keberpihakan pada industri Dalam Negeri, perlu dipertegas fungsi koordinasi dan penanggungjawab dari sisi pemerintah (Departemen Kominfo-Perindustrian-Perdagangan) agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran ide dan penyaluran aspirasi dari dunia bisnis
- 10) Dalam Road Map mungkin tahap yang paling strategis adalah membangun dan mempertahankan industri kreatif diantaranya adalah perangkat lunak aplikasi. karena nilai tambahnya cukup besar dan modalnya 'lebih kecil' dibandingkan dengan *benefit* hasil dari kreatifitas tersebut.
- 11) Terkait dengan Industri dalam negeri, penerapan kebijakan TKDN memang telah membantu mengangkat produsen dalam negeri dalam hal peningkatan nilai jual, tapi KADIN melihat diperlukannya hal yang lebih besar lagi yakni keseragaman langkah untuk mendorong tingkat kepercayaan semua sektor yang dapat dimulai dengan bukti dan promosi bahwa pemerintah telah menggunakan produk dalam negeri.
- 12) Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan industri TIK dalam negeri yang terkait dengan program masyarakat cerdas dapat diwujudkan dengan:
 - Hasil PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang jumlahnya 7 trilyun pada tahun 2008 diantaranya melalui pungutan BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) sebagian besar dapat digunakan untuk kredit jaminan industri TIK melalui bank-bank Pemerintah dengan bunga pinjaman lunak.
 - Pelaksanaan USO (Universal Service Obligation) meliputi bukan hanya sebatas pengadaan telepon dan akses internet melainkan mencakup infrastruktur jaringan dan industri pendukung TIK.
 - Dipertimbangkan pemberian stimulus perpajakan bagi industri lokal pada masa produksi awal suatu inovasi TIK.
 - Menghimbau kepada Departemen-departemen terkait untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang saling mendukung. Dalam hal ini industri Teknologi Informatika akan memberikan masukan terhadap regulasi-regulasi yang dianggap membingungkan.

- 13) Perlu adanya sistem pemanfaatan sumber terbatas dalam industri TIK, sehingga pemanfaatannya dapat lebih efektif dan efisien, termasuk mengenai formula perhitungan BHP yang perlu disederhanakan serta diharapkan menjadi *incentive basis*.
- 14) Dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa TI maka diharapkan Pemerintah mendukung terjadinya proses mekanisme pasar (meminimalisasi regulasi) dan menjaga pasar melalui *safeguard regulation*.

3. Visi dan Misi

4.1. Visi

Menumbuhkan industri berbasis TIK dan menciptakan iklim usaha TIK yang kondusif serta menjadikan TIK sebagai faktor pemungkin utama terciptanya masyarakat berbasis pengetahuan Indonesia.

4.2. Misi

- 1) Mendorong terbukanya kesempatan berusaha di bidang TIK dan keberpihakan terhadap industri Telematika dalam negeri.
- 2) Mensinergikan basis teknologi TIK guna mendukung pengembangan industri dalam negeri yang konvergen dan berkesinambungan.
- 3) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif dalam rangka mencapai target target WSIS (World Summit on the Information Society) tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. Untuk menghubungkan berbagai desa dengan TIK dan membangun poin akses komunitas
 - b. Untuk menghubungkan universitas, kolese, sekolah menengah dan sekolah dasar dengan TIK
 - c. Untuk menghubungkan berbagai pusat pengetahuan dan penelitian dengan TIK
 - d. Untuk menghubungkan perpustakaan umum, pusat kebudayaan, museum, kantor pos dan arsip dengan TIK
 - e. Untuk menghubungkan pusat kesehatan dan rumah sakit dengan TIK
 - f. Untuk menghubungkan pemerintahan pusat dan daerah serta membangun *website* (laman) serta alamat surat elektronik
 - g. Untuk mengadaptasi kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah dalam rangka menghadapi berbagai perkembangan Masyarakat Informasi dengan memperhitungkan keadaan nasional negara masing-masing
 - h. Untuk menjamin populasi dunia memiliki akses terhadap pelayanan teleVisi dan radio
 - i. Untuk menunjang pengembangan muatan/konten dan membangun persyaratan teknis dalam rangka memfasilitasi keberadaan dan penggunaan semua bahasa dunia di Internet untuk memastikan agar separuh penduduk bumi memiliki akses terhadap TIK dalam jangkauan

Sasaran Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

		Pendek	Menengah	Panjang
No.	Sasaran	2010-2014	2015-2019	2020-2030
Industri Telekomunikasi				
1.	Regulasi terkait dengan pembebanan harga BHP spektrum frekuensi yang kondusif bagi pertumbuhan industry	X		
2.	Regulasi terkait dengan pengelolaan menara telekomunikasi yang lebih kondusif agar tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan yang tidak perlu serta tidak menghambat kebutuhan perluasan maupun penambahan kapasitas jaringan telekomunikasi	X		
3.	Regulasi terkait dengan standar minimal penggunaan TKDN yang lebih realistis dan tidak menghambat pertumbuhan bisnis telekomunikasi	X		
4.	Regulasi terkait dengan penetapan proporsi PNBPN yang dikembalikan ke sektor telekomunikasi diperbesar, misalnya untuk pembiayaan infrastruktur <i>backbone</i> nasional	X		
5.	Kebijakan terkait dengan pembatasan jumlah penyelenggara telekomunikasi, khususnya yang membutuhkan sumberdaya yang terbatas (spektrum, nomor) dan modal yang besar agar tidak timbul kompetisi yang tidak sehat	X		
6.	Pemerintah sudah menerbitkan standar kualitas layanan, namun masih perlu menetapkan tata cara perhitungan standar kualitas tersebut untuk menghindari perselisihan dalam perhitungan	X		
7.	Penggantian FTP 2000 dengan rencana penomoran yang lebih komprehensif dan mampu mengantisipasi kebutuhan penomoran di masa mendatang, termasuk pengaturan implementasi <i>number portability</i>	X		
8.	Sinkronisasi regulasi-regulasi terkait dengan telekomunikasi, penyiaran, media dan sektor-sektor terkait lainnya, terutama permasalahan perizinan dan pemanfaatan spektrum frekuensi		X	

9.	Regulasi yang dapat mengakomodasi <i>unified licensing</i> sehingga perbedaan pendapat dalam penyelenggaraan maupun distorsi dalam persaingan di pasar dapat dikurangi		X	
10.	Penggunaan kontribusi PNBPN dari sektor telekomunikasi untuk pembangunan <i>backbone</i> nasional terutama di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau dan secara bisnis tidak layak		X	
11.	Peningkatan kompetensi SDM yang menangani regulasi (<i>regulator</i>) di bidang TIK, baik dari sisi teknologi, bisnis, persaingan usaha maupun hukum agar penyusunan kebijakan, regulasi dan implementasinya di masa mendatang dapat lebih optimal untuk kepentingan nasional		X	
12.	Peningkatan kompetensi SDM nasional di bidang TIK sehingga Indonesia dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat		X	
13.	Kebijakan yang mendorong peranan lokal dalam pengembangan industri ke depan terkait dengan industri terkait TIK (manufaktur, perangkat lunak aplikasi, konten, dll.)		X	
14.	Cetak biru spektrum frekuensi yang dapat menampung perkembangan teknologi di masa mendatang sehingga dapat lebih menjamin kepastian investasi untuk mengurangi resiko-resiko perubahan regulasi		X	
15.	Kebijakan USO dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur terpadu, tidak hanya infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga listrik dan jalan		X	
Industri Informatika				
1.	Perumusan TKDN dengan memperhitungkan keberadaan teknologi dan komponen yang sudah ada	X		
2	Penciptaan stimulus agar tercapai <i>economy of scale</i> di bidang penggunaan computer dan internet	X		
3	Pemberlakuan kawasan khusus bagi para <i>innovator</i> dan investor TIK untuk mengembangkan teknologi di lingkungannya.	X		

	Dalam kawasan ini dibentuk kebijakan dan criteria khusus			
--	--	--	--	--

4	Kebijakan nasional tentang implementasi dan pemanfaatan Internet Protocol	X		
5	Pendirian Badan Pengkajian TIK oleh para pemangku kepentingan	X		
6	Kesatuan lisensi untuk jasa dan jaringan yang bermuara dari hulu/teknologi yang sama	X		
7	Penelitian di bidang TIK sebagai indicator pembangunan sehingga memiliki potret dan data sebagai basis dari setiap kebijakan dan langkah yang akan diimplementasikan di semua industri	X		
8	Penentuan cetak biru TIK yang penyusunannya dengan melibatkan semua para pemangku kepentingan	X		
9	Mempersiapkan prasarana informatika untuk menumbuhkan layanan e-Health dan e-Education bagi masyarakat Indonesia.		X	
10	Menjadikan Indonesia yang memiliki sumber daya manusia di bidang TIK serta pasar TIK yang luas dan pemerintahan yang stabil sebagai World Manufacturer (Pabrik Terbesar Dunia)			X
	Industri Media			
1.	Uji coba TV Digital	X		
2.	Regulasi terkait dengan jaringan stasiun TV Analog	X		
3.	Penghentian TV Analog dan pengoperasian TV Dijital di beberapa kota besar	X		
4.	Penghentian TV Analog dan pengoperasian TV Dijital secara nasional		X	X
	Industri Konten dan Aplikasi			
1.	Mensosialisasikan industri konten dan aplikasi Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, kontes, kompetisi, dan pembuatan direktori industri konten dan aplikasi	X		
2.	Mendukung terjadinya inovasi lokal dan menjadikan industri konten dan aplikasi menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui pendirian pusat-pusat inkubasi dan meminta kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif industri		X	

3.	Menjadikan industri konten dan aplikasi lokal sebagai sumber devisa dan mengembangkan pasar internasional		X	X
----	---	--	---	---

4.	Menumbuhkan konten-konten baru sebagai penunjang e-education		X	X
5.	Mendorong munculnya aplikasi-aplikasi baru untuk menunjang layanan e-Health bagi masyarakat		X	X
	Industri Pendukung			
1.	Prioritas pada industri dalam negeri dan penunjang TIK yang tidak membutuhkan investasi yang besar dan bukan teknologi tinggi yang sangat cepat mengalami perubahan. Misalnya: konten, perangkat lunak aplikasi, industri pendukung seperti menara, kabel, antena, baterai, jasa, konstruksi, dll.	X		
2.	Meningkatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah dan dunia usaha dalam bentuk konkret seperti memberikan fasilitas, kemudahan, serta kebijakan keberpihakan terhadap industri dalam negeri yang jelas	X		
3.	Memaksimalkan penggunaan perangkat produksi dalam negeri hingga lebih dari 60 persen perangkat yang digunakan di berbagai infrastruktur milik Negara		X	
4.	Memaksimalkan pemanfaatan produksi dalam negeri hingga lebih dari 30 persen perangkat pada prasarana milik swasta			X

Termin:

- Jangka Pendek adalah jangka waktu kurang dari 1 tahun sampai 1 tahun
- Jangka Menengah adalah jangka waktu dari 2 tahun sampai 5 tahun
- Jangka Panjang adalah jangka waktu dari 5 tahun sampai seterusnya

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					H2	H1														
1	Penetapan tatacara perhitungan pengenaan standar kualitas, persyaratan dan pengenaan sanksi denda terhadap standar kualitas	75 days?	Tue 15/09/09	Mon 28/12/09																
2	Penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan manara telekomunikasi	100 days?	Tue 15/09/09	Mon 01/02/10																
3	Penetapan regulasi Biaya Hak Pakai (BHP) Frekuensi berdasarkan besaran pita (bandwidth)	200 days	Tue 15/09/09	Mon 21/06/10																
4	Penyempurnaan Fundamental Technical Plan (FTP) 2000 untuk mengatasi masalah penomoran dan struktur jaringan	75 days	Tue 15/09/09	Mon 28/12/09																
5	Penyempurnaan regulasi terkait dengan standar minimal penggunaan TKDN	180 days	Tue 15/09/09	Mon 24/05/10																
6	Perumusan TKDN dengan memperhatikan keberadaan kemampuan teknologi dan komponen	60 days	Tue 25/05/10	Mon 16/08/10																
7	Penyusunan kebijakan terkait dengan jumlah penyelenggara telekomunikasi khususnya yang terkait dengan Sumber Daya yang terbatas	90 days	Tue 22/06/10	Mon 25/10/10																
8	Regulasi terkait dengan penetapan proporsi PNPB yang dapat digunakan industri	100 days	Tue 15/09/09	Mon 01/02/10																
9	Penggunaan alokasi PNPB dari sektor untuk selain dari pertambangan daerah tertinggal	1000 days	Tue 02/02/10	Mon 02/12/13																
10	Penyempurnaan regulasi guna mengantisipasi Unified Licensing dan menjaga persaingan pasar	120 days	Tue 26/10/10	Mon 11/04/11																
11	Cetak Biru Spektrum Frekuensi untuk menampung perkembangan teknologi dan kestabilan investasi	200 days	Tue 22/06/10	Mon 29/03/11																
12	Redefinisi USO dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur terpadu (bukan hanya infrastruktur telekomunikasi)	120 days	Mon 01/03/10	Fri 13/08/10																
13	Pembuatan kebijakan untuk mendorong peranan lokal dalam pengembangan industri TIK	120 days	Fri 01/01/10	Thu 17/06/10																
14	Peningkatan kompetensi SDM yang menangani regulasi di bidang TIK	1000 days	Tue 15/09/09	Mon 15/07/13																
15	Peningkatan kompetensi SDM Nasional di bidang TIK untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru	1000 days	Tue 15/09/09	Mon 15/07/13																
16	Sinkronisasi regulasi terkait antara telekomunikasi, penyiaran, media dan lain-lain	180 days	Tue 15/09/09	Mon 24/05/10																
17	Pembuatan Cetak Biru industri TIK dengan mengaitkan konsep konvergensi serta mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri	180 days	Mon 02/11/09	Fri 09/07/10																
18	Penyusunan Draft White Paper RUU Konvergensi	90 days	Mon 12/07/10	Fri 12/1/10																
19	Penyusunan RUU Konvergensi	90 days	Mon 15/11/10	Fri 18/03/11																
20	Pengesahan RUU Konvergensi	180 days	Mon 21/03/11	Fri 25/1/11																
21	Penciptaan stimulus agar tercapai economic of scale dibidang penggunaan komputer dan internet	120 days	Tue 15/09/09	Mon 01/03/10																
22	Perumusan kebijakan nasional tentang implementasi dan pemanfaatan internet protocol	339 days?	Tue 15/09/09	Fri 31/12/10																
23	Pembentukan dan pemberlakuan kawasan khusus bagi para inovator dan investor TIK untuk mengembangkan kemampuan teknologi/local content	1501 days?	Thu 01/04/10	Thu 31/12/15																
24	Penentuan prioritas industri dalam negeri dan TKDN dengan kriteria tidak membutuhkan investasi yang besar atau teknologi yang cepat mengalami perubahan misalnya konten dan aplikasi	90 days	Fri 18/06/10	Thu 21/10/10																
25	Memaksimalkan penggunaan perangkat produksi Dalam Negeri hingga lebih dari 60% dibarengi infrastruktur milik negara	1000 days	Wed 22/12/10	Tue 21/10/14																
26	Memaksimalkan penggunaan perangkat produksi Dalam Negeri hingga lebih dari 30% dibarengi infrastruktur milik swasta kecuali yang berhubungan dengan CPE	1000 days	Fri 18/06/10	Thu 17/04/14																
27	Promosi dan sosialisasi kemampuan industri konten dan aplikasi dalam negeri	1000 days	Thu 01/10/09	Wed 31/07/13																
28	Mendorong munculnya inovasi dan pemain baru di industri konten melalui pendirian pusat inkubasi dan pemberian insentif oleh pemerintah	1000 days	Mon 01/03/10	Fri 27/12/13																
29	Menumbuhkan konten-konten baru di bidang e-education, e-health, e-Government, e-budget	1000 days	Mon 30/12/13	Fri 27/10/17																
30	Menjadikan industri konten dan aplikasi lokal sebagai proyek unggulan industri TIK Indonesia dan menjadi sumber devisa	1000 days	Mon 30/12/13	Fri 27/10/17																
31	Pelaksanaan Uji Coba Televisi Digital	178 days?	Tue 15/09/09	Thu 20/05/10																
32	Pelaksanaan dan Evaluasi sistem siaran berjejaring	76 days?	Tue 15/09/09	Tue 29/12/09																
33	Penghentian Siaran Analog (analogue switch off) dan pengoperasian televisi digital diberbagai kota besar	708 days?	Fri 21/05/10	Tue 05/02/13																
34	Penghentian Siaran Analog dan pengoperasian Televisi Digital secara nasional	2425 days?	Fri 21/05/10	Thu 05/09/19																

C.I

IX. Telematika/16 september 2009

X. KEUANGAN

A. PERBANKAN

1. Kondisi Saat Ini

Di tengah kondisi krisis keuangan global, Perbankan Indonesia menunjukkan perkembangan yang relatif baik hingga pertengahan tahun 2009, meskipun terjadi penurunan NIM akibat peningkatan cost of fund pada kuartal pertama tahun 2009. Aset tumbuh Rp 455 triliun atau setara dengan 22.3%, kredit tumbuh hingga 16.3% atau setara dengan Rp 187 triliun, Dana Pihak Ketiga tumbuh 17.3% atau senilai dengan Rp 269 triliun. Pertumbuhan dana lebih besar dari pertumbuhan DPK sehingga Loan to Depositor Ratio (LDR) mengalami sedikit penurunan. Implikasi dari tingginya suku bunga deposito antara lain meningkatnya cost of fund yang pada gilirannya menyebabkan penurunan NIM

2. Maksud dan Tujuan Roadmap

Melalui Roadmap ini diharapkan akan terbentuk garis besar arah dan tujuan Industri Perbankan lima sampai enam tahun yang akan datang serta menjadi solusi awal bagi berbagai pihak seperti pemerintah, Otoritas Perbankan, Bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain roadmap ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi KADIN dalam memberikan masukan bagi Perbankan Indonesia, khususnya terkait pemberdayaan UMKM

3. Dasar Pemikiran Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM menjadi hal yang penting bagi perekonomian Indonesia mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja. Pengembangan UMKM tentu saja membutuhkan dukungan yang integral dan sinergis dari berbagai pihak. Di sisi lain Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan negara maju, sehingga dibutuhkan skema khusus untuk dapat mengembangkan UMKM melalui fungsi intermediasi perbankan. Sehingga pengembangan UMKM harus sejalan dengan kebijakan otoritas Perbankan

Beberapa isu penting yang terkait Perbankan antara lain mengenai peningkatan fungsi intermediasi Perbankan, Perhitungan Non Performing Loan, perhitungan ATMR, kesehatan Bank, pemupukan modal serta kebijakan Otoritas Perbankan yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah

Permasalahan yang umum terjadi terkait dengan pembiayaan UMKM antara lain rendahnya keterampilan para pengusaha dan UMKM yang belum berbadan hukum yang akhirnya mencerminkan UMKM yang belum Bankable, sebagian pengusaha masih mengandalkan modal secara mandiri dan enggan mengambil kredit di Bank, serta sektor Perbankan yang kurang inovatif untuk mendorong pemberdayaan UMKM.

4. Transformasi Sektor Perbankan

Kondisi 2009 yang belum optimal diharapkan dapat membaik pada tahun 2015. Realita terkini dari kondisi perekonomian antara lain ketidakpastian makroekonomi global, konsolidasi dan konsentrasi industri perbankan, melambatnya penyaluran kredit, ketatnya persaingan dalam

memperebutkan dana, naiknya kredit bermasalah akibat krisis keuangan global, serta tuntutan peningkatan modal seiring meningkatnya risiko.

Melalui roadmap ini, diharapkan akan terwujud transformasi positif yang mengubah kondisi tahun 2009 ke arah yang lebih baik, indikatornya antara lain munculnya bank-bank dengan spesialisasi industri tertentu, peningkatan portofolio pembiayaan sektor riil, terutama UMKM, perbankan yang memiliki modal kuat dengan risiko terkendali, dan fokus kepada peningkatan kompetensi dan daya saing.

5. Peran dan Kepentingan Stakeholders

Stakeholders	Peran	Kepentingan
Bank	Menetapkan portofolio bisnis UMKM, mengendalikan risiko, pertumbuhan usaha	Kompetensi bertambah, pendapatan meningkat, risiko terkendali, daya saing meningkat
Otoritas Perbankan	Kebijakan, pembinaan, pengaturan, pengawasan perbankan	Intermediasi meningkat, pengawasan yang efektif, kualitas kredit yang sesuai standar
Pemerintah pusat	Membuat kebijakan yang menyediakan kemudahan dan insentif bagi sektor riil	Perekonomian tumbuh, tercipta iklim usaha yang kondusif
Pemerintah Daerah	Memfasilitasi pengusaha kecil dan menengah dengan membuat kebijakan yang tepat	Pembebasan retribusi, pajak daerah, dan pungutan resmi lainnya, memajukan UMKM
Sektor riil	Meggerakkan roda perekonomian di daerah	Bankable, mendapatkan akses pembiayaan dengan mudah untuk tumbuh
Masyarakat umum	Kemaslahatan dari sektor riil, pasokan sumber daya manusia	Kesejahteraan masyarakat meningkat, penciptaan lapangan kerja baru

6. Roadmap Pemberdayaan UMKM

1) Dua tahun pertama (2009-2011)

Terfokus pada pembangunan landasan yang kuat bagi pembiayaan UMKM. Beberapa hal yang direkomendasikan untuk dijalankan antara lain perubahan mindset dan sikap mental, kebijakan yang pro UMKM melalui relaksasi peraturan, penyesuaian skema penjaminan, perhitungan ATMR dan kesehatan Bank, serta sinergitas antara stakeholders UMKM

2) Dua tahun kedua (2011-2013)

Terfokus pada penyiapan sumber daya Perbankan yang handal melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konseling, pembelajaran organisasi, serta dukungan teknologi informasi

3) Dua tahun ketiga (2013-2015)

Untuk fase yang terakhir, terfokus pada peningkatan keunggulan daya saing Perbankan Nasional melalui penciptaan produk-produk pembiayaan UMKM yang inovatif, penjualan silang dengan jasa keuangan lainnya, serta membangun aliansi dengan mitra strategis dan lembaga keuangan lainnya

7. Potensi Industri untuk Dibiayai Perbankan di Masa Depan

Beberapa industri yang berpotensi besar untuk dibiayai Perbankan di masa mendatang antara lain minyak dan gas, Agribisnis (seperti kelapa sawit, karet, gula, padi, jagung, bahan baku energi terbarukan dan lainnya), serta sektor pembangunan infrastruktur (jalan tol, pembangkit tenaga listrik, pelabuhan dan lainnya)

8. Analisis SWOT Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Nasional

- **Strengths**
Jaringan dan outlet yang semakin luas, semakin banyak Bank yang membidik sektor mikro dan UKM
- **Weaknesses**
Keterbatasan kapasitas dan kinerja terkait informasi dan teknologi, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perbankan
- **Opportunities**
Jumlah UMKM yang cukup besar (lebih dari 40 juta), pasar perkotaan yang terus berkembang, pasar ASEAN yang berkembang, meningkatnya jumlah pengguna internet (hingga kini telah mencapai angka 30 juta, dan 80 juta mobile terminal)
- **Threats**
Ketentuan yang dibuat berdasarkan adopsi dari ketentuan internasional yang tidak sepenuhnya cocok untuk diterapkan di Indonesia, masuknya Bank-Bank asing

9. Analisis SWOT Pembiayaan Korporasi oleh Perbankan Nasional

- **Strengths**
Kemajuan penggunaan IT, pemahaman nasabah yang semakin baik, produk dan jasa yang semakin berkualitas serta hubungan yang kondusif antara Perbankan, Pemerintah dan Swasta
- **Weaknesses**
Kualitas SDM yang spesifik dan specialist belum memadai, kurangnya modal dan jaringan internasional yang belum optimal
- **Opportunities**
Proyek pemerintah (ATMR rendah), eksistensi komoditi andalan dengan potensi pasar yang besar, dan recovery perekonomian dunia mendorong pasar akan berkembang
- **Threats**
Ketentuan-ketentuan yang mengadopsi ketentuan Internasional yang mungkin kurang sesuai untuk Indonesia, masuknya Bank-bank asing, lambatnya recovery ekonomi dunia

10. Rekomendasi:

- Meningkatkan bisnis UMKM dan korporasi melalui dukungan IT yang kuat dan akses yang lebih baik
- Mengembangkan bisnis melalui pola kemitraan
- Mengoptimalkan pasar domestik dan memanfaatkan pasar luar negeri melalui mobile terminal, dan kemitraan dengan perusahaan lokal ASEAN
- Mengembangkan fitur produk melalui upaya-upaya marketing dan didukung oleh IT yang handal dan optimal
- Mengembangkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk meningkatkan kewirausahaan dan kredibilitas korporasi Nasional
- Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas IT, SDM dan SLA untuk bersaing di pasar domestik dan internasional
- Melonggarkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk mengembangkan UMKM
- Mengembangkan layanan untuk memenuhi kebutuhan korporasi
- Meningkatkan keterlibatan otoritas dalam mengawasi ruang gerak Bank asing
- Memperkuat permodalan dengan penurunan dividen ratio
- Membangun jaringan di luar negeri baik langsung maupun melalui *strategic alliance*
- Melonggarkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, pembiayaan infrastruktur dan investasi pada sektor minyak bumi dan gas alam.

B. PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NONBANK

1. Kondisi Saat Ini

Industri keuangan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh perbankan. Peranan lembaga keuangan non bank sangat kecil dibandingkan dengan perbankan. Total asset perbankan saat ini mencapai Rp 2.352.110 miliar (SPI, Mei 2009), sementara nilai kapitalisasi pasar modal pada Juni 2009 baru mencapai Rp 1.675.164,70 (SPM, 2009). Sumber pembiayaan dari lembaga keuangan non bank, seperti pembiayaan konsumen, leasing, factoring sebagian besar juga berasal dari perbankan. Dominasi perbankan yang terlalu besar di sektor keuangan adalah salah satu faktor yang menyebabkan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate) tidak diikuti oleh penurunan suku bunga kredit.

Pasar modal dan lembaga keuangan nonbank dapat berperan lebih besar dalam mengurangi dominasi perbankan. Pasar modal diperlukan untuk menarik dana dari dalam dan luar negeri, dalam kapasitas besar, yang langsung dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya pada sektor riil. Sementara itu, peranan lembaga keuangan non bank lebih kepada jangkauannya kepada masyarakat kecil di daerah yang tidak terjangkau oleh perbankan.

Pasar Modal telah bertumbuh dan berkembang menjadi pilar perekonomian nasional, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian baik sebagai investor maupun emiten di pasar modal.

Jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2000 jumlah perusahaan yang terdaftar masih berada di bawah tiga ratus perusahaan. Jumlah ini meningkat terus mencapai mendekati 400 perusahaan pada tahun 2009. Walaupun demikian, pertumbuhan jumlah perusahaan yang terdaftar dibursa akhir-akhir ini amat lambat. Kapitalisasi pasar pun sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2003 kapitalisasi pasar saham kita hanya mencapai sekitar 500 triliun rupiah, pada tahun 2009 ini diperkirakan kapitalisasi pasar saham kita akan mencapai sekitar 1800 triliun rupiah.

Sementara itu, dalam struktur sistem keuangan di Indonesia, lembaga pembiayaan dan penjaminan berperan menjangkau kalangan masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank. Dalam prakteknya lembaga pembiayaan dan penjaminan merupakan kepanjangan tangan dari perbankan.

Jangkauan lembaga pembiayaan dan penjaminan yang lebih luas dan dalam kepada masyarakat dibandingkan dengan perbankan, membuat lembaga pembiayaan dan penjaminan terus mengalami perkembangan. Sampai dengan September 2006 tercatat 216 Perusahaan Pembiayaan. Jumlah perusahaan pembiayaan tersebut turun sebanyak 20 perusahaan dibandingkan dengan tahun 2005 karena dicabut izin usahanya. Kinerja Perusahaan Pembiayaan hingga September 2006 menunjukkan peningkatan yang terlihat dari meningkatnya total asset. Sampai dengan September 2006 total asset Perusahaan Pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 2,9% dibandingkan dengan akhir tahun 2005, yaitu dari Rp.96,5 triliun menjadi Rp.99,3 triliun. Sementara nilai piutang pembiayaan meningkat sebesar 6,1% dari Rp. 67,6 triliun menjadi Rp. 71,7 triliun dengan perolehan laba tahun berjalan selama 3 triwulan pertama tahun 2006 sebesar Rp. 2,0 triliun

Fokus lembaga pembiayaan dan penjaminan juga lebih kepada pembiayaan konsumsi, khususnya kendaraan bermotor. Penyebab tingginya pembiayaan konsumsi adalah selain konsumsi domestik yang meningkat akibat meningkatnya pendapatan masyarakat, resiko piutang jenis ini juga lebih rendah dibandingkan dengan yang lain.

Asuransi memegang peranan penting dalam perekonomian karena fungsinya untuk melindungi asset konsumen dan dunia usaha dari berbagai macam resiko. Industri asuransi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan kepastian dalam melakukan kegiatan usaha. Keuntungan bagi konsumen adalah dapat membeli perlindungan untuk berbagai jenis kerugian yang sulit diatasi sendiri. Sedangkan bagi dunia usaha, asuransi berperan dalam memperkecil resiko, dengan demikian meningkatkan tingkat kepastian dalam berusaha.

Seiring dengan semakin ketatnya peraturan di bidang asuransi, jumlah perusahaan asuransi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2003 terdapat sekitar 173 perusahaan asuransi. Jumlah ini menyusut menjadi 144 pada tahun 2008. Meskipun jumlah perusahaan asuransi berkurang, industri asuransi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, dilihat dari pertumbuhan premi bruto yang meningkat sangat tajam. Pada tahun 2003 premi bruto mencapai sekitar 34 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 74 triliun rupiah pada tahun 2007.

Sementara itu, Industri dana pensiun pun telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2002 total aset dana pensiun mencapai 39,7 triliun rupiah. Jumlah ini sudah meningkat menjadi sekitar 90,1 triliun rupiah pada tahun 2008. Namun, jumlah dana pensiun semakin lama semakin menurun, seiring dengan semakin ketatnya peraturan untuk menyelenggarakan program dana pensiun. Pada tahun 2002 terdapat sekitar 340 dana pensiun. Jumlah total dana pensiun menurun menjadi sekitar 280 pada tahun 2008.

Perusahaan modal ventura berfungsi untuk mendanai perusahaan yang baru berdiri, dengan potensi tinggi tetapi resiko yang juga tinggi. Perusahaan seperti ini pada umumnya kesulitan untuk mengakses permodalan pada institusi perbankan maupun non perbankan. Perusahaan modal ventura dapat berperan untuk menjembatani masalah permodalan tersebut, sekaligus memberikan dukungan teknis kepada perusahaan pasangan. Perusahaan modal ventura dapat berperan sebagai katalisator dalam pembangunan ekonomi.

Namun, industri Modal Ventur tampak mengalami stagnasi pertumbuhan, bahkan cenderung berkontraksi. Pada tahun 2002 jumlah perusahaan Modal Ventura mencapai 60 perusahaan. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan menyusut menjadi 55 perusahaan. Dari sisi aset pun terjadi penyusutan, dimana pada tahun 2002 total aset perusahaan ventura mencapai sekitar Rp 2,5 triliun. Pada tahun 2006 total aset menurun menjadi sekitar Rp 2,3 triliun.

Bagian terakhir dari sektor ini adalah Pendanaan alternatif. Pendanaan alternatif yang dimaksud disini pendanaan yang dilakukan oleh individu. Pendanaan alternatif ini tidak merupakan perantara, sehingga bersifat informal dan tidak berada pada otoritas tertentu. Dengan demikian, tidak ada data mengenai pengembangan pendanaan alternative ini. Walaupun demikian, pendanaan alternatif ini sangat besar kontribusinya dalam pasar keuangan, mengingat tradisi kebanyakan masyarakat Indonesia yang lebih mempercayai pendanaan alternative ini, juga sektor usaha yang masih sebagian besar bersifat informal.

2. Permasalahan

2.1. Pasar Modal

- 1) Peranan pasar modal terhadap perekonomian masih relatif kecil. Hal ini, antara lain, dapat dilihat dari relatif kecilnya nisbah kapitalisasi pasar kita terhadap PDB
- 2) Peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar sangat lambat dan tidak signifikan. Hal ini merupakan satu sisi permasalahan penawaran (*supply*) bagi pasar modal Indonesia.

- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat pada pasar modal di Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum mengenal pasar modal.

2.2. Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan

- 1) Ketergantungan yang tinggi terhadap perbankan.
- 2) Rumah tangga dan perusahaan yang memanfaatkan jasa lembaga peminjaman dan penjaminan akan dikenakan bunga yang lebih tinggi daripada bank.
- 3) Pembiayaan terbatas pada kredit konsumsi

2.3. Asuransi

- 1) Penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat kecil, ditunjukkan oleh persentase terhadap PDB yang kurang dari 2 persen.
- 2) Permintaan yang masih rendah.
- 3) Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai asuransi kepada masyarakat.
- 4) Tenaga kerja profesional (seperti aktuaris) di bidang asuransi masih sangat kurang.

2.4. Dana Pensiun

- 1) Tidak adanya kewajiban (*mandatory*) bagi masyarakat untuk memiliki dana pensiun.
- 2) Masih tumpang tindihnya berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan ekonomi masyarakat seperti Undang-Undang Sistim Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Jamsostek.
- 3) Kualifikasi dan kompetensi penyelenggara Dana Pensiun dan lembaga penunjang serta profesi penunjang di bidang penyelenggaraan Dana Pensiun masih perlu peningkatan.
- 4) Skema program pensiun masih kurang fleksibel Baik dalam program yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun (program kesejahteraan karyawan, seperti program pesangon) maupun cara, waktu dan tempat pembayaran manfaat.
- 5) Perpajakan di bidang pembayaran manfaat pensiun masih kurang kodusif dan tidak sesuai dengan standard internasional.

2.5. Modal Ventura

- 1) Belum ada spesialisasi dan klusterisasi dari perusahaan modal ventura, sehingga dukungan teknis yang diberikan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha belum optimal.
- 2) Belum ada aturan standard mengenai dukungan teknis seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan mitra.
- 3) Tidak adanya program kemitraan dengan perbankan ataupun akses keuangan lain yang lebih besar dengan perusahaan modal ventura.
- 4) Masih kecilnya skala usaha modal ventura, membuat biaya yang masih tinggi.

2.6. Pendanaan Alternatif

Tidak ada kerangka hukum yang melindungi pasar pendanaan alternatif.

3. Prospek/Target yang Ingin Dicapai

3.1. Pasar Modal

- 1) Tersedianya ruang yang cukup prospektif untuk memperluas basis investor domestik.

- 2) Potensi emiten yang cukup besar, mengingat masih relatif sedikitnya perusahaan yang terdaftar di bursa.
- 3) Ekonomi yang sudah masuk ke masa ekspansi lagi akan memberikan kesempatan pasar modal untuk berkembang.

3.2. Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan

- 1) Jangkauan lembaga pembiayaan dan penjaminan yang lebih luas dan dalam kepada masyarakat dibandingkan dengan perbankan.
- 2) Ruang untuk ekspansi di sektor ril masih terbuka lebar.

3.3. Asuransi

- 1) Jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga perkembangan industri asuransi memiliki basis yang kuat.
- 2) Pemain lama maupun pemain baru memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
- 3) Penempatan dana pada industri asuransi dengan basis jangka panjang, lebih stabil dibandingkan penempatan dana pada perbankan. Cocok untuk pembiayaan proyek berjangka panjang, seperti proyek-proyek infrastruktur.
- 4) Pertumbuhan sektor-sektor lain akan turut memperluas basis industri asuransi.
- 5) Konsumsi beberapa jenis barang tertentu, seperti kendaraan bermotor, terkait langsung dengan asuransi. Konsumsi barang-barang tersebut diperkirakan akan terus kuat ke depannya. Ini akan berdampak positif bagi industri asuransi.

3.4. Dana Pensiun

Mengingat besarnya jumlah perusahaan (pemberi kerja) di Indonesia, sesungguhnya potensi pengembangan dana pensiun dimasa depan masih sangat besar.

3.5. Modal Ventura

Masih banyak surplus dana masyarakat yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif, yang masih tersimpan di perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya.

3.6. Pendanaan Alternatif

Memiliki jangkauan luas terhadap UMKM, serta mengenal perilaku pengusaha secara individual

4. Program Aksi

Tujuan roadmap pasar modal dan lembaga keuangan non-bank:

- 1) Agar pasar modal dan lembaga keuangan non bank dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memobilisasi dana ke sektor riil, sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- 2) Agar surplus dana masyarakat dapat lebih digunakan untuk melakukan kegiatan usaha sehingga pendapatan masyarakat meningkat, dan pada akhirnya dapat melakukan konsumsi dan investasi lebih besar.

4.1. Pasar Modal

Jangka Pendek

- 1) Mendorong persiapan Demutualisasi Bursa Efek, agar BEI lebih transparan akuntabel dan memberi manfaat bagi Emiten, investor dan pengelola jasa pasar modal.
- 2) Meningkatkan kinerja, tata kelola, transparansi dan akuntabilitas lembaga pasar modal (Bapepam LK) dan juga self-regulating organization kepada publik sehingga dapat mengambil keputusan tanpa pengaruh pihak-pihak yang mungkin mempunyai benturan kepentingan.
- 3) Meningkatkan teknologi informasi di pasar modal.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan pemeran utama dalam pengembangan pasar modal yang teratur wajar dan efisien , termasuk pejabat Bapepam LK, wakil perusahaan efek, serta profesi penunjang pasar modal
- 5) Meningkatkan penegakan hukum.

Jangka Menengah

- 1) Meningkatkan jumlah emiten dan perusahaan publik, dengan target 500 emiten pada tahun 2014. Sementara target kapitalisasi pasar 3,000 triliun rupiah pada 2014 dengan pertumbuhan 25% per tahun.
- 2) Memperluas basis dan kualitas investor domestic, dengan target sebesar 1% dari populasi atau sekitar 2.3 juta orang pada tahun 2014.
- 3) Meningkatkan likuiditas pasar modal.
- 4) Mendorong perusahaan perusahaan kelas kecil atau menengah oleh perusahaan efek agar masuk bursa.

4.2. Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan:

- 1) Memperkecil ketergantungan dengan perbankan, dengan mencari alternatif sumber-sumber pendanaan lainnya dan alternatif kesepakatan dengan bank
- 2) Melakukan efisiensi dan memperbesar skala usaha, untuk mengurangi beban biaya, sehingga dapat mengurangi tingkat suku bunga yang dikenakan kepada konsumen.
- 3) Meningkatkan piutang pembiayaan untuk sewa guna usaha, untuk lebih mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor rill, tidak hanya di sektor konsumsi.
- 4) Memperluas pemberian pinjaman dan penjaminan kepada sektor-sektor usaha, khususnya usaha kecil dan menengah

4.3. Asuransi

- 1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berasuransi.
- 2) Penciptaan produk-produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
- 3) Mengusulkan untuk dibuatnya program Intensif Pajak Bagi Pemegang Polis.
- 4) Mengusulkan agar ada peningkatan kewajiban asuransi dalam berbagai transaksi ekonomi.
- 5) Membuka Lapangan Kerja Baru, dengan target 500.000 agen pada Tahun 2012.
- 6) Memperbesar peran industri asuransi dalam ketersediaan modal domestik jangka panjang serta menopang pasar modal dan investasi lainnya

4.4. Dana Pensiun

- 1) Mengusulkan reVisi terhadap pajak-pajak yang berlaku saat ini untuk dana pensiun sehingga dengan mengikuti standar internasional.

- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat pada program pensiun. Dengan melakukan promosi dan sosialisasi Dana Pensiun kepada masyarakat baik karyawan maupun para pekerja mandiri. Demikian juga sosialisasi terhadap pemberi kerja.
- 3) Melakukan kajian atas pengembangan jenis investasi untuk dana pensiun dan studi banding dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah.

4.5. Modal Ventura

- 1) Melakukan analisis spesialisasi dan klusterisasi potensi usaha, kebutuhan dana dan bentuk dukungan teknis yang perlu diberikan.
- 2) Identifikasi pihak-pihak yang dibutuhkan untuk mendukung perusahaan modal ventura memberikan dukungan teknis kepada perusahaan pasangan, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
- 3) Merumuskan bentuk kerjasama antara perusahaan modal ventura dengan pihak lain, dalam hal menyalurkan dana maupun memberikan bantuan teknis kepada perusahaan pasangan.
- 4) Merumuskan peraturan mengenai bentuk usaha modal ventura dan kegiatan usaha yang harus dilakukan

4.6. Pendanaan Alternatif

- 1) Melakukan pendataan jumlah perusahaan yang memanfaatkan jasa pendanaan alternative, karakteristik usaha, jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan sebagainya.
- 2) Melakukan studi banding mengenai pendanaan alternative di negara lain.
- 3) Menyusun aturan dan kerangka hukum untuk pendanaan alternatif.
- 4) Implementasi aturan dan kerangka hukum yang telah disusun.

5. Dukungan Pemerintah yang dibutuhkan

5.1. Pasar Modal

- 1) Percepatan pembentukan OJK menjadi otoritas pasar modal yang independen dan terintegrasi dengan otoritas perbankan dan lembaga keuangan non bank.
- 2) Kebijakan khusus untuk perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam, untuk mencatatkan di bursa.
- 3) Insentif pajak menurut jangka waktu investasi. Investasi yang lebih panjang diberikan pengurangan pajak lebih banyak.
- 4) Sumber daya pengawas dan perencana dengan kualitas yang memenuhi standard internasional.
- 5) Undang-undang dan peraturan yang harmonis dan tidak tumpang tindih, baik peraturan-peraturan pasar modal, maupun peraturan perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya.
- 6) Peningkatan penegakan hukum, dan bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, baik penegak hukum nasional maupun internasional.

5.2. Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan:

- 1) Mengurangi risiko usaha di sektor riil, sehingga persentase kredit macet piutang sewa guna usaha turun. Dengan demikian, lembaga pembiayaan dan penjaminan akan lebih banyak menyalurkan dana kepada sewa guna usaha.
- 2) Mempermudah lembaga pembiayaan dan penjaminan untuk memperoleh dana di luar perbankan, antara lain dengan mempermudah masuk dalam pasar modal.
- 3) Perhatian lebih besar untuk lembaga pembiayaan dan penjaminan, dengan melakukan riset, pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga pembiayaan.
- 4) Memberikan jaminan kredit bagi lembaga pembiayaan dan penjaminan, khususnya untuk pembiayaan modal usaha, sehingga lembaga pembiayaan dan penjaminan tidak hanya memberikan kredit konsumsi tetapi kredit usaha.
- 5) Memberikan pembinaan dalam pengelolaan keuangan bagi usaha kecil penerima pinjaman dan jaminan, khususnya bagi kredit yang dijamin pemerintah.

5.4. Asuransi

- 1) Situasi politik yang kondusif bagi dunia usaha, serta stabilitas makroekonomi.
- 2) Kemudahan untuk masuknya pemain baru dalam industri asuransi, untuk dapat meningkatkan kompetisi dan efisiensi dalam industri asuransi.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya asuransi melalui pemberian asuransi publik secara lebih luas, baik jenisnya maupun jangkauannya.
- 4) Memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi swasta untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan asuransi publik.
- 5) Peraturan yang tidak membatasi keluar masuknya pemain asing, tetapi menciptakan kondisi dimana investor asing harus melakukan investasi di industri asuransi Indonesia dalam jangka panjang.
- 6) ReVisi hukum dan undang-undang asuransi sebagai berikut:
 - Hukum/Undang-undang Perjanjian Asuransi (*Insurance contract law*), yang hingga saat ini masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan KUH Perdata yang telah berusia ratusan tahun.
 - Hukum/Undang-undang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (*Insurance Company Law / Business Law*), mengingat UU No.2 tahun 1992 sudah berusia 17 tahun.
 - Hukum/Undang-undang yang mengatur mengenai asuransi wajib, baik mengenai kecelakaan terhadap pihak ketiga (*Third Party Liability Insurance*) maupun risiko bencana alam (*Natural Disaster Insurance*), khususnya Gempa Bumi.
- 7) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pajak dalam menunjang peningkatan insentif masyarakat berinvestasi dalam produk asuransi.

5.5. Dana Pensiun

- 1) Pembenahan permasalahan "*Push & Pull*" Factors yang ada dalam industri dana pensiun.
 - a. *Push Factor* – Sinkronisasi dan Harmonisasi peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih, agar beban pengusaha tidak tinggi.
 - b. *Pull Factor* – membenahi permasalahan perpajakan di dana pensiun, agar para investor/ penabung dapat merasakan manfaat program tersebut secara financial.
- 2) Perubahan penyelenggaraan Dana Pensiun dari bersifat sukerela menjadi wajib.

- 3) Terciptanya industri dana pensiun yang sehat dan kuat dengan menyempurnakan berbagai peraturan di bidang dana pensiun dan memperkuat pengawasan Dana Pensiun.
- 4) Peningkatan fleksibilitas skema program pensiun.
- 5) Penerbitan aturan perpajakan di bidang dana pensiun sehingga pengenaan pajak dilakukan pada saat peserta menikmati manfaat pensiun (*EET*).
- 6) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pengurus, dewan pengawas dan sumber daya manusia pada setiap dana pensiun.

5.6. Modal Ventura

- 1) Penyediaan tenaga pengawas, perencana dan penyusun aturan-aturan khusus untuk perusahaan modal ventura.
- 2) Pengikutsertaan perusahaan modal ventura dalam program-program pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Mendorong sektor swasta, khususnya perbankan melakukan investasi dalam bentuk modal ventura.
- 4) Bantuan riset dan ilmu pengetahuan kepada perusahaan modal ventura.
- 5) Mendorong perguruan tinggi, lembaga riset dan industri untuk melakukan riset yang menumbuhkan ide-ide baru dalam pengembangan perusahaan modal ventura.
- 6) Melakukan koordinasi antara perusahaan modal ventura dengan program-program pemerintah dalam hal peningkatan kemampuan UMKM dalam mengelola usaha maupun memperoleh akses ke sector keuangan.

5.6. Pendanaan Alternatif

- 1) Tersedianya kerangka hukum untuk melindungi investor pendanaan alternatif.
- 2) Penyiapan aparat pengawas dan penegak hukum bagi jalannya pendanaan alternatif.

C.IX.b.Pasar_modal_lkbb/14 september 2009